



Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2020

tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021





**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Surat Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 050/395/11/Bapplitbang tanggal 3 Juli 2019 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5590);
 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya

- untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.
 10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Narasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 2021
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB VII: PENUTUP
 - b. Matrik RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Matrik hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi:
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD).
 - b. Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
 - c. Pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 untuk:

- a. bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat menelaah kesesuaian antara Renja-PD Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

Pasal 7

Program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, dapat diakomodasi dengan memperhatikan kesesuaian target RPJMD 2017-2022, pemenuhan SPM serta sumber pendanaan

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021.

Dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

Sesuai fungsinya, dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen rencana untuk perubahan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu dari 1 (satu) tahun berjalan dan menjadi pedoman dalam proses Penyusunan KUA dan PPAS serta Penyusunan RAPBD. Untuk itu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

Pangkalan Bun, Juli 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Hj. NURHIDAYAH, S. H., M. H.





**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Kajian.....	4
1.3. Sinergi Antar Dokumen.....	6
1.4. Maksud dan tujuan	10
1.5. Sistematika Dokumen RKPD 2021	10
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah	
2.1. Kondisi umum daerah.....	13
2.1.1. Aspek geografi daerah.....	13
2.1.1.1. Keadaan klimatologi.....	14
2.1.1.2. Keadaan hidrologi	15
2.1.1.3. Klimatologi	15
2.1.2. Aspek demografi.....	15
2.1.2.1. Aspek kependudukan.....	15
2.1.2.2. Aspek ketenagakerjaan.....	16
2.1.3. Aspek kesejahteraan masyarakat	17
2.1.3.1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.....	17
2.1.3.2. Fokus kesejahteraan sosial.....	20
2.1.3.3. Fokus seni budaya dan olahraga	25
2.2. Aspek pelayanan umum	25
2.2.1. Urusan Pemerintah wajib pelayanan dasar.....	25
2.2.2. Urusan Pemerintah wajib non pelayanan dasar.....	36
2.2.3. Urusan Pemerintah pilihan.....	45
2.3. Aspek daya saing daerah	51
2.3.1. Fokus kemampuan ekonomi daerah.....	52
2.3.1.1. Pertumbuhan ekonomi	52
2.3.1.2. Pertanian, perkebunan dan peternakan	53



2.3.1.3. Perikanan dan kelautan.....	54
2.3.1.4. Industri	54
2.3.1.5. Pariwisata	55
2.3.1.6. Nilai tukar petani	55
2.3.1.7. Angka konsumsi RT per kapita Kabupaten Kotawaringin barat.....	55
2.3.2. Fokus fasilitas wilayah / infrastruktur.....	56
2.3.2.1. Perhubungan	56
2.3.2.2. Air bersih dan listrik.....	57
2.3.3. Fokus iklim berinvestasi.....	58
2.3.3.1. Kriminalitas	58
2.3.3.2. Perkembangan Investasi.....	59
2.3.4. Fokus sumber daya manusia.....	59
2.3.4.1. Ketenagakerjaan	59
2.3.4.2. Rasio ketergantungan	60
2.3.4.3. Rasio Lulusan	60
2.4. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD.....	61
2.4.1. Urusan pendidikan.....	62
2.4.2. Urusan kesehatan.....	69
2.4.3. Urusan lingkungan hidup	79
2.4.4. Urusan pekerjaan umum.....	87
2.4.5. Urusan penataan ruang	94
2.4.6. Urusan perencanaan pembangunan.....	95
2.4.7. Urusan perumahan	96
2.4.8. Urusan kepemudaan dan olahraga.....	97
2.4.9. Urusan penanaman modal.....	99
2.4.10. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah	100
2.4.11. Urusan kependudukan dan pencatatan sipil	102
2.4.12. Urusan ketenagakerjaan.....	103
2.4.13. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.....	104
2.4.14. Urusan ketahanan pangan.....	105
2.4.15. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	109
2.4.16. Urusan perhubungan	111
2.4.17. Urusan komunikasi dan informatika	113
2.4.18. Urusan pertanahan	116
2.4.19. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.....	118



2.4.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....	120
2.4.21. Urusan pemberdayaan masyarakat desa	138
2.4.22. Urusan sosial.....	138
2.4.23. Urusan kebudayaan.....	142
2.4.24. Urusan Statistik dan Persandian.....	143
2.4.25. Urusan Kearsipan	145
2.4.26. Urusan Perpustakaan	145
2.5. Urusan pilihan yang dilaksanakan	146
2.5.1. Urusan kelautan dan perikanan	146
2.5.2. Urusan pertanian	147
2.5.3. Energi dan sumber daya mineral	149
2.5.4. Urusan pariwisata	150
2.5.5. Urusan industri	161
2.5.6. Urusan perdagangan	162
2.5.7. Urusan ketransmigrasian.....	163
2.6. Permasalahan pembangunan daerah.....	163
2.6.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	163
2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	164

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021

3.1. Arah kebijakan ekonomi daerah.....	175
3.1.1. Kinerja perekonomian daerah.....	175
3.1.2. Laju inflas	192
3.2. Arah kebijakan keuangan daerah	193
3.2.1. Arah kebijakan pendapatan daerah	193
3.2.2. Arah kebijakan belanja daerah.....	196
3.2.3. Kerangka kebijakan pendanaan daerah.....	202
3.2.4. Arah kebijakan pembiayaan daerah.....	202
3.2.5. Kerangka pendanaan pembangunan daerah	203

BAB IV SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi dan misi pembangunan.....	206
-------------------------------------	-----



4.2. Isue Strategis ,Tujuan dan sasaran	208
4.2.1. Isue Strategis.....	208
4.2.2. Tujuan	212
4.2.3. Sasaran	212
4.3. Arah kebijakan Pembangunan.....	213
4.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2021 ...	215
4.4.1. Tema Pembangunan	215
4.4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	215
4.4.3. Program Prioritas.....	215
4.4.4. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten Tahun 2021	218
4.5. Penanganan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	219

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Analisa Pendanaan Program dan Kegiatan Daerah.....	240
5.2. Gambaran Konsistensi Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021	242
5.3. Pokok Pikiran DPRD.....	252

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	299
6.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	300

BAB VII PENUTUP	303
------------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
2.1	Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah.....	13
2.2	Klasifikasi lereng Kabupaten Kotawaringin Barat.....	14
2.3	Kondisi Geologi.....	14
2.4	Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang Yang Dapat Dilayari dan Rata-rata Kedalaman.....	15
2.5	Jumlah penduduk dan Kepadatan per Kecamatan.....	16
2.6	Angkatan Kerja.....	17
2.7	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2012-2018.....	20
2.8	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018.....	24
2.9	Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2014 – 2019.....	24
2.10	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, 2014-2018.....	25
2.11	Pelayanan pemerintahan wajib pemerintah.....	25
2.12	Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2014-2019.....	27
2.13	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014-2019.....	30
2.14	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Statusnya Tahun 2015-2019.....	31
2.15	Spesifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2015-2018.....	31
2.16	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2015-2019.....	32
2.17	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kelas Jalan Tahun 2014-2018.....	32
2.18	Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2014-2018.....	32



Tabel	Judul	Hal
2.19	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang, 2014-2018.....	33
2.20	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2014-2019.....	33
2.21	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014-2018.....	34
2.22	Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018.....	35
2.23	Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat.....	35
2.24	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018.....	35
2.25	Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019.....	36
2.26	Kondisi Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2019.....	36
2.27	Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2015-2019.....	37
2.28	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015-2019.....	37
2.29	Indikator kinerja Urusan Ketahanan Pangan.....	38
2.30	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersediaan Pangan (Beras)	38
2.31	Indikator capaian Urusan pertanahan.....	39
2.32	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2019.....	39
2.33	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2019.....	40
2.34	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	40
2.35	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2018.....	41
2.36	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018.....	41
2.37	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.....	42



Tabel	Judul	Hal
2.38	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2019.....	42
2.39	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 2014-2019.....	42
2.40	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga 2014-2018.....	43
2.41	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2014-2018.....	43
2.42	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019.....	44
2.43	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2018.....	44
2.44	Indikator Kinerja Kearsipan.....	45
2.45	Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2014-2019	45
2.46	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018.....	46
2.47	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018.....	47
2.48	Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019.....	48
2.49	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019.....	48
2.50	Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2014-2019.....	48
2.51	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	49
2.52	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Volume dan Nilai Ekspor Pertambangan Tahun 2014-2018.....	49
2.53	Kontribusi Sektor Ketenagalistrikan Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2019.....	49
2.54	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2019.....	50
2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2019.....	50



Tabel	Judul	Hal
2.56	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2014-2019.....	51
2.57	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.....	53
2.58	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Target di RPJMD Tahun 2014-2019.....	54
2.59	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Target di RPJMD Tahun 2017-2019.....	55
2.60	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014-2018.....	55
2.61	Konsumsi Masyarakat Per Kapita.....	56
2.62	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Statusnya Tahun 2014-2019.....	56
2.63	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014-2019.....	56
2.64	Rasio Ketersediaan Daya Listrik.....	58
2.65	Jumlah dan Jenis Perda Yang Mendukung Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018.....	58
2.66	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Kabupaten Kotawaringin Barat.....	59
2.67	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran dan Penginapan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	59
2.68	Perkembangan Ivestasi.....	59
2.69	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan.....	59
2.70	Rasio ketergantungan.....	60
2.71	Rasio Lulusan.....	60
2.72	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019.....	68
2.73	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019.....	87
2.74	Indikator kinerja Urusan Pembinaan Kontruksi.....	93
2.75	Realisasi Anggaran Urusan Perumahan.....	97
2.76	Indikator sasaran Rumah layak huni.....	97



Tabel	Judul	Hal
2.77	Capaian program Urusan Penanaman modal.....	99
2.78	Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan.....	108
2.79	Capaian program Dinas Perhubungan.....	112
2.80	Capaian Target sasaran Dinas Perhubungan.....	112
2.81	Capaian dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah.....	117
2.82	Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah.....	124
2.83	Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan 2019.....	124
2.84	Total Belanja Langsung.....	129
2.85	Capaian indikator BPBD.....	131
2.86	Realisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pangkalan Banteng.....	136
2.87	Data Keuangan Kegiatan.....	141
2.88	Data Keuangan Kegiatan.....	141
2.89	Data Keuangan Kegiatan.....	142
2.90	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.....	142
2.91	Indikator Kinerja Urusan Persandian.....	144
2.92	Realisasi Program Energi sumber daya dan Mineral.....	150
2.93	Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata.....	161
2.94	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindagkop UKM Tahun 2017-2019.....	162
2.95	Prioritas Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2021.....	164
2.96	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	166
3.1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2013-2021 (Persen)).....	175
3.2	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret 2020).....	178



Tabel	Judul	Hal
3.3	Proyeksi Nilai PDRB (Milyar Rp) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.....	178
3.4	Nilai dan Distribusi PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha dan Distribusinya Periode 2010-2020 (Atas Dasar Harga Konstan 2010).....	179
3.5	Lanjutan Nilai dan Distribusi PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha dan Distribusinya Periode 2010-2020 (Atas Dasar Harga Konstan 2010).....	180
3.6	Distribusi dan Rata-Rata Distribusi PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat 2010-2021 (ADHK 2010, Dalam Persen).....	183
3.7	Perkembangan Indikator Makro Perekonomian Terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2021.....	184
3.8	Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Kotawaringin Barat.....	185
3.9	Nilai Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP).....	187
3.10	Nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW).....	188
3.11	Nilai Pertumbuhan Bersih (PB)	189
3.12	Pemetaan Notasi LQ, PP, dan PPW Berdasarkan Tipologi Klassen	190
3.13	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2021	191
3.14	Nilai Inflasi Tahun 2015-2021 Kabupaten Kotawaringin Barat.....	192
3.15	Realisasi dan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2020* Kabupaten Kotawaringin Barat.....	195
3.16	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2021.....	196
3.17	Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2021.....	201
3.18	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018–2021.....	202
3.19	Kerangka Pendanaan Daerah Berdasarkan Urusan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.....	203
4.1	Penjabaran Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.....	207



Tabel	Judul	Hal
4.2	Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2021.....	215
4.3	Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun 2021.....	218
4.4	Penanganan Permasalahan Pernikahan dini (atau usia dibawah 18 tahun), Stunting dan Kemiskinan	219
4.5	Rencana Optimalisasi Penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil.....	223
4.6	Inovasi Program Permasalahan Optimalisasi Ekonomi Kreatif, Ketahanan pangan dan UMKM.....	224
4.7	Penanganan Infrastruktur Dasar Permukiman (Pembangunan Perumahan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi).....	226
4.8	Biaya Pembuatan Mesin Chopper 30 PK.....	235
4.9	Spesifikasi Mesin Chopper 30 PK.....	236
4.10	Biaya Produksi Mesin Chopper 30 PK di dalam pengolahan Cocopeat.....	236
5.1	Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung PD Tahun 2021.....	241
5.2	Program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 Yang Bukan Bagian dari RPJMD Tahun 2017-2022 (Program-Program Inkonsisten).....	243
5.3	Program dalam RPJMD Tahun 2017-2022 yang Tidak Dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.....	247
5.4	Rincian Usulan dan Pagu Kegiatan Pokir Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2021.....	253
5.5	Rekapitulasi Usulan dan Pagu Kegiatan Pokir Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2021.....	280
6.1	Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022.....	282
6.2	Realisasi dan Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2021.....	282
6.3	Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021 dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019.....	283



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
1.1	Alur penyusunan RKPD.....	3
1.2	Alur penyusunan.....	7
2.1	Sex ratio Kabupaten Kotawaringin Barat.....	16
2.2	IPM Kabupaten Kotawaringin Barat 2014-2019.....	18
2.3	Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2019.....	19
2.4	PDRB Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat (Juta Rupiah) 2014-2018.....	19
2.5	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat 2014-2019.....	21
2.6	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018 (%).....	21
2.7	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018 (%).....	22
2.8	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018.....	22
2.9	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018.....	23
2.10	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018.....	23
2.11	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2014-2018.....	27
2.12	Cakupan Pertolongan persalinan.....	28
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan.....	28
2.14	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Paru.....	29
2.15	Grafik Cakupan rujukan pasien miskin.....	29
2.16	Grafik Cakupan Kunjungan Pelayanan kesehatan Bayi.....	30
2.17	Grafik Pertumbuhan Ekonomi.....	53



2.18	Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	53
2.19	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat.....	55
2.20	Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	57
2.21	Grafik Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	57
3.1	Diagram Perbandingan Perkembangan Inflasi Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan Nasional 2015-2019.....	192
4.1	Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK.....	234
4.2	Mesin Chopper 30 PK (Tampak Muka).....	235
4.3	Mesin Chopper 30 PK (Tampak Belakang).....	235
4.4	Mesin Chopper 30 PK (Tampak Samping).....	236
4.5	Mesin Chopper 30 PK (Tampak Atas).....	237





**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**



Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah. Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2020, Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2020 dan Musrenbang RKP Nasional Tahun 2020. RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Persiapan penyusunan;
- ii. Penyusunan rancangan awal;
- iii. Penyusunan rancangan;
- iv. Pelaksanaan musrenbang;
- v. Perumusan rancangan akhir; dan
- vi. Penetapan

Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik:

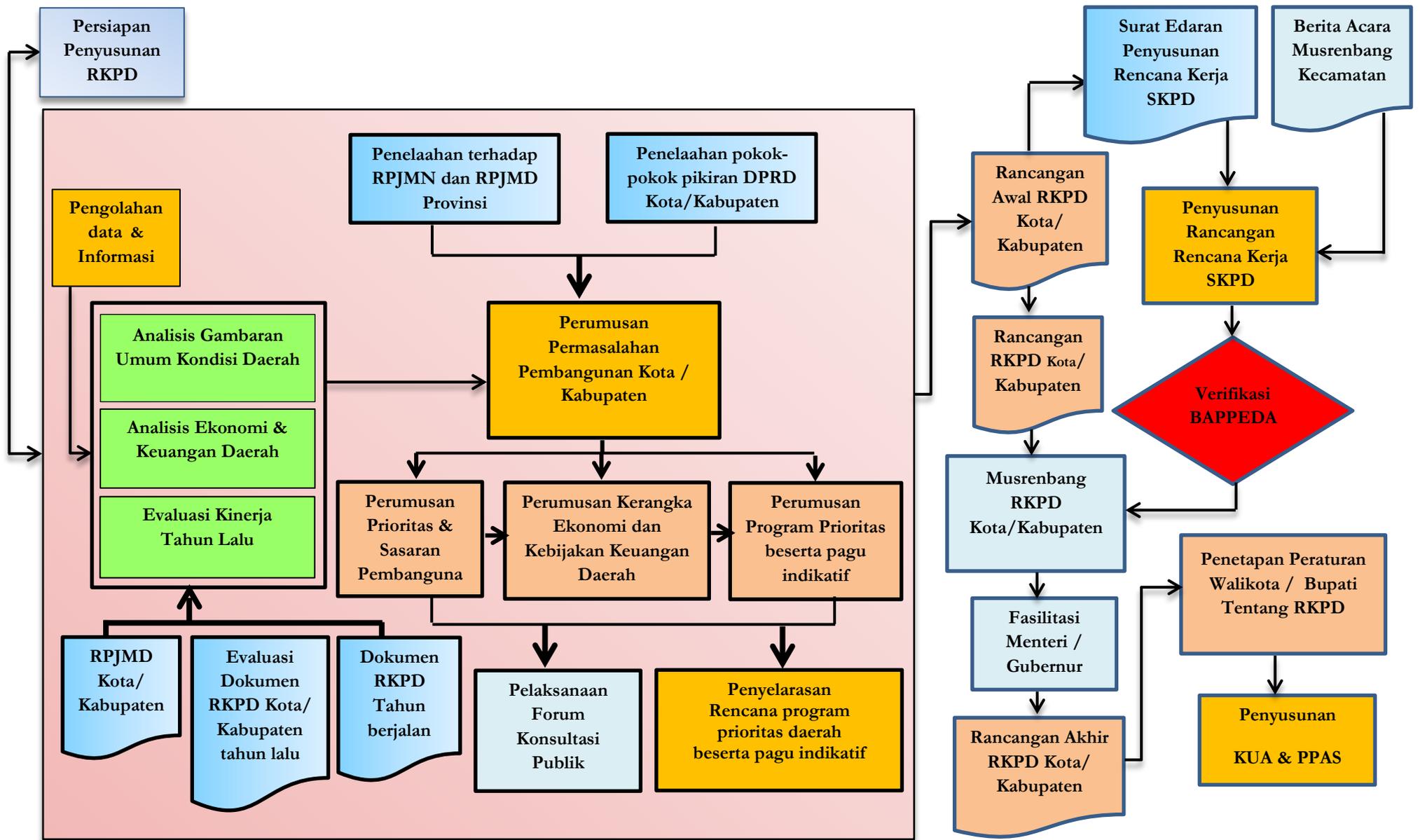
1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah,
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Proses perumusan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:





Gambar 1.1
Alur penyusunan RKPD

1.2. Dasar Hukum Kajian

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2);



Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional dan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebagai berikut:

A. RPJM Nasional dan RKP Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: (i) Buku I dengan judul: "Agenda Pembangunan Nasional", (ii) Buku II dengan judul: "Agenda Pembangunan Bidang", dan (iii) Buku III dengan judul: "Agenda Pembangunan Wilayah". RPJM Nasional menjadi acuan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam menjabarkan program sektoral dan program kewilayahan/regional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, tema RKP Nasional pada Tahun 2021, yaitu: "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**", maka fokus pembangunan diarahkan kepada **Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana**, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen
2. Tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
3. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen;
4. IPM menjadi 72,78-72,90;
5. Gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379;
6. Tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
7. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Kalimantan 3,6-5,7 persen.

B. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

RPJMD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021. Visi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tersebut mengandung tiga elemen pembangunan yaitu Maju, Mandiri, dan Adil yang bertujuan untuk mencapai Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 adalah "**Pengembangan Agroindustri berbasis Teknologi Ramah Lingkungan**". Program



prioritas Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2021 mengacu Visi dan Misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan infrastuktur wilayah, dengan fokus sebagai berikut :
 - a. Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi.
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
 - c. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota yang layak
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai dengan fokus sebagai berikut :
 - a. Peningkatan ketercukupan energi
 - b. Pemberdayaan petani
 - c. Peningkatan ketersediaan sumber daya air
 - d. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
 - e. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai
3. Stabilitas Ekonomi Daerah, dengan fokus sebagai berikut :
 - a. Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis
 - b. Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
4. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - a. Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian
 - b. Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian
5. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi
 - a. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik
 - b. Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan
 - c. Peningkatan standar pelayanan publik
 - d. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - e. Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi
6. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
 - a. Perbaiki sistem tata kelola pemerintahan
 - b. Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan
 - c. Pengoptimalisasi manajemen pendidikan
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
 - e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
7. Pengelolaan Industri Pariwisata
 - a. Pengembangan objekobjek pariwisata
8. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan
 - a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - b. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis
 - c. Pengelolaan pertambangan



9. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
 - a. Pemanfaatan hasil SDA
 - b. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.

C. RPJMD dan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat

Dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, termuat visi dan misi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni Visi: **“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas”** dengan Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tema RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah **“Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, Dan Kepariwisata Terhadap Pendapatan Daerah”**

Penyusunan rancangan Renja perangkat daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja perangkat daerah yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Tahun 2021 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2021, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja perangkat daerah Tahun 2021, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2021.
2. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD 2021 yang disusun ke dalam rancangan renja perangkat daerah 2021.
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk



tercapainya sasaran renstra perangkat daerah berdasarkan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan renja perangkat daerah, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan perangkat daerah, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan renja perangkat daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
6. Memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat

1.4. Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2021 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek.
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Akhir Renja PD.
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 2021

RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan	<p>Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, dalam bab ini point pembahasan tertuju pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. • Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal • Hubungan antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota
------------------------------------	--



BAB I Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPd bagi daerah yang bersangkutan. • Sistematika Dokumen RKPd Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPd terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah	<p>Evaluasi pelaksanaan RKPd tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPd tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPd tahun berjalan sebagai bahan acuan. Dalam bab ini point pembahasan tertuju pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Umum Kondisi Daerah Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah • Aspek Geografi dan Demografi Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. • Aspek Kesejahteraan Masyarakat diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. • Aspek Pelayanan Umum diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. • Aspek Daya Saing Daerah diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. • Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPd sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPd tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD • Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. • Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori • Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah
BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah	<p>Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam bab ini point pembahasan tertuju pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/ kabupaten/kota. • Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.



BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah	<p>Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Dalam bab ini point pembahasan tertuju pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. • Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.
BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah	<p>Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.</p>
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<p>Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.</p>
BAB VII Penutup	<p>Penutup</p>





**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**



Bab 2

Gambaran Umum Kondisi

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi Daerah

Kabupaten kotawaringin barat yang beribukota di pangkalan bun, berada di provinsi kalimantan tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara: 1°19' sampai dengan 3° 36' lintang selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' bujur timur. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas wilayah sebesar 10.759 Km2. Dengan 7 Kecamatan. Luas masing-masing Kecamatan di 7 Kecamatan yang ada dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase
Kotawaringin Lama	1.218,00	11,32
Arut Selatan	2.400,00	22,31
Kumai	2.921,00	27,15
Pangkalan Banteng	1.306,00	12,14
Pangkalan Lada	229,00	2,13
Arut Utara	2.685,00	24,96
Kotawaringin Barat	10.759,00	100

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2019

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 2.1 luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar luas wilayah ada di 3 Kecamatan yaitu Kumai , Arut Utara dan Arut selatan . Secara presentasi Kecamatan Kumai luas wilayahnya sebesar 27,15% dari total luas wilayah , Arut Utara 24,96% , dan Arut selatan 22,31 % . Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

1. Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi;
2. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi;



3. Sebelah selatan adalah danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung air.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya pertanian jika faktor lain mendukung.

Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan < 40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara. Topografis kabupaten kotawaringin barat digolongkan menjadi 4 bagian dengan ketinggian antara 0 - 500 m dari permukaan laut dan kemiringan antara 0 – 40 persen, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit.

Tabel 2.2
Klasifikasi lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Jumlah
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	
1	Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
2	Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
3	Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
4	Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
5	Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
6	Arut Utara	0	55.648,75	121.342,23	72.460,00	249.450,98
	Jumlah	462.109,68	292.410,95	159.305,86	72.460,00	986.286,49
	%	46,85%	29,6%	16,2%	7,3%	100,0%

Sumber : RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037

2.1.1.1. Keadaan Klimatologi

Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Geologi

No	Jenis Tanah	Tersebar di Daerah
1	Podsolik Merah Kuning	Tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai
2	Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol)	Di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama
3	Kompleks Regosol (Podsol)	Bagian timur Kecamatan Kumai
4	Aluvial	Aliran sunga Lamandau, Arut dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah Kecamatan Kumai
5	Organosol	Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan
6	Okisol (Lateritik)	Bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara

Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037



2.1.1.2. Hidrologi

Pada umumnya di Kalimantan sungai mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, selain tempat mencari nafkah berperan sebagai sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya. Terdapat 3 sungai yang melintasi kabupaten kotawaringin barat yaitu sungai arut, sungai kumai, dan sungai lamandau dengan kedalaman rata-rata 5 meter dan lebar 100-300 meter.

Tabel 2.4
Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang Yang Dapat Dilayari dan Rata-rata Kedalaman

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1	Sungai Kumai	175	100	6,00	300,00
2	Sungai Arut	250	190	4,00	100,00
3	Sungai Lamandau	300	250	6,00	200,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2019

2.1.1.3. Klimatologi

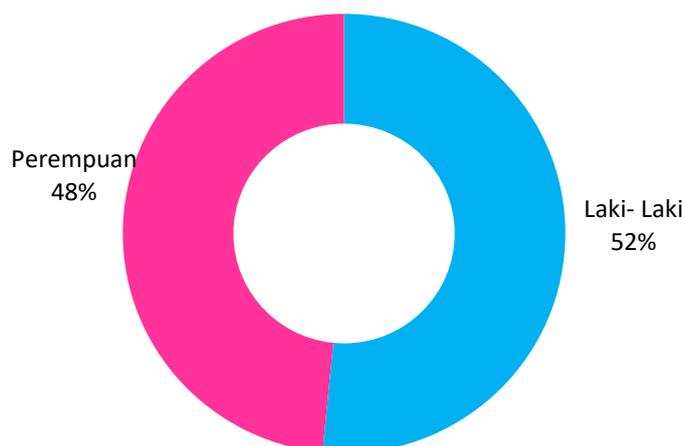
Iklim daerah kabupaten kotawaringin barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan desember yaitu 511,0 mm, dengan jumlah hari hujan pada tahun 2015 tercatat 181 hari dan bulan maret merupakan bulan dengan hari hujan terbanyak yaitu 24 hari. Suhu udara maksimum berkisar antara 35,9°C – 32,1°C dan suhu minimum antara 23,6°C – 19,8°C dan kecepatan angin maksimal 20 knot.

2.1.2. Aspek Demografi

2.1.2.1. Aspek Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebanyak 253.881 jiwa yang terdiri 130.881 jiwa penduduk laki-laki dan 123.000 jiwa penduduk Perempuan. Dibandingkan dengan jumlah Penduduk Tahun 2018, penduduk Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan sebesar 1,54 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk Laki-laki sebesar 1,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,64 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk Laki-laki terhadap penduduk Perempuan sebesar 113. Data sex ratio dapat dilihat sebagai berikut :





Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2017, 2018 dan Semester II 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (LKPJ 2019)

Gambar 2.1
Sex ratio Kabupaten Kotawaringin Barat

Kepadatan penduduk di kabupaten kotawaringin barat tahun 2019 sebesar 23,59 jiwa/km². Kepadatan penduduk di keenam kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Pangkalan Lada sebesar 150 jiwa per Km² dan disusul Kecamatan Arut Selatan 46 jiwa per Km², Kecamatan Pangkalan Banteng 25 jiwa per Km², Kecamatan Kumai 16 jiwa per Km², Kecamatan Kotawaringin Lama 14 jiwa per Km² dan terakhir Kecamatan Arut Utara 3 jiwa per Km². Sebaran kepadatan penduduk yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah penduduk dan Kepadatan per Kecamatan

Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
Kotawaringin Lama	1.218	17.283	14
Arut selatan	2.400	111.248	46
Kumai	2.921	49.552	17
Pangkalan Banteng	1.306	33.544	26
Pangkalan Lada	229	34.443	150
Arut Utara	2.685	7.811	3
Total	10.759	253.881	24

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2017, 2018 dan Semester II 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (LKPJ 2019)

2.1.2.2. Aspek KetenagaKerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 sebanyak 253.881 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 58,63% merupakan angkatan kerja, sedangkan 41,37% bukan merupakan angkatan kerja. Dari 148.859 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan kerja, terdapat pengangguran sebanyak 4.902 orang . Angka Pengangguran pada tahun 2019 sebesar 1,98% sudah berada dibawah target RPJMD



2019 yang sebesar 2,82%. Berikut data ketenaga kerjaan berdasarkan data historis 5 tahun terakhir :

Tabel 2.6
Angkatan Kerja

No	Tahun	AK (Jiwa)	TPAK (%)	TKK (%)	TPT (%)
1	2015	145.749	71,96	96,75	3,25
2	2016	156.605	74,19	96,84	3,16
3	2017	145.749	71,96	96,75	3,25
4	2018	148.404	68,44	97,83	2,17
5	2019	148.859	72,28	96,15	1,98

Sumber: Disnakertrans Kotawaringin Barat, 2019 (dalam LKPJ 2019)

Dari sisi Upah minimum regional (UMR) di kabupaten kotawaringin barat pada 2019 sebesar Rp 2.808.528,- mengalami kenaikan sebesar 8 persen dari tahun sebelumnya. Umr sektoral tertinggi ada pada sektor bangunan dan pertambangan dan penggalian yaitu sejumlah Rp 2.808.528,00. UMR dirilis oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melakukan survei harga dilapangan untuk bahan pokok dan mempertimbangkan nilai inflasi yang terjadi. Jika diurutkan dari UMR semua kabupaten/kota di provinsi kalimantan tengah, nilai umr kotawaringin barat berada pada urutan ke-7. Data tersebut sebagai berikut:

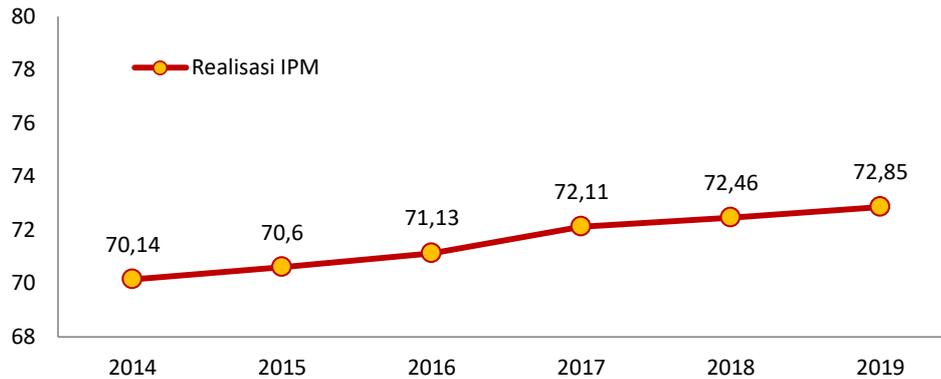
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari segi aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk itu maka, review indikator-indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

2.1.3.1. Fokus kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggunakan metode baru ditunjukkan pada gambar diagram sebagai berikut :



Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

**Gambar 2.2 Grafik
IPM Kabupaten Kotawaringin Barat 2014-2018**

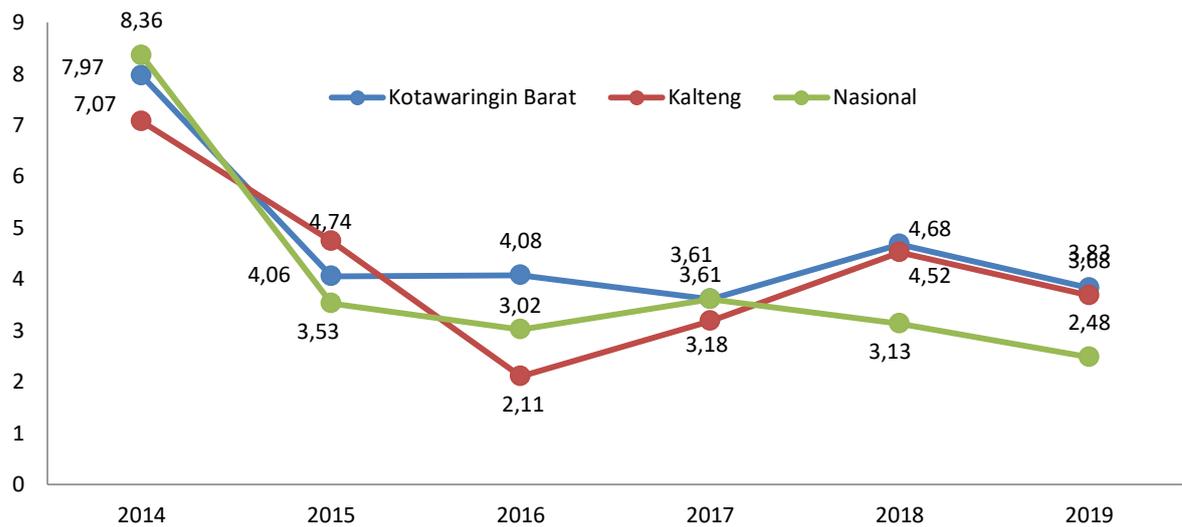
b. Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB saat ini mengacu pada angka tahun dasar 2010. Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha. PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pada tahun 2019, PDRB ADHK sebesar 12.875.812 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 12.171.160. Sedangkan PDRB ADHB berada pada angka Rp.19.334.838 atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp.17.825.889. Sementara berdasarkan PDRB ADHK, pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Barat tumbuh sebesar 5,79%. sedikit lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya sekitar 6,46%.

c. Inflasi

Tingkat Inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Perkembangan inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 5 tahun cukup fluktuatif dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 7,97%. Angka tersebut masih tergolong dalam kategori inflasi ringan yang nilainya dibawah angka 10%. Pada tahun 2019 Inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 3,83%. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat kebutuhan bahan pokok Kabupaten Kotawaringin Barat banyak yang didatangkan dari Pulau Jawa. Beberapa komoditi yang menyumbang inflasi di Kotawaringin Barat adalah : daging ayam ras, cabe rawit, telur ayam ras, bawang putih, beras, udang basah, tomat sayur, sandang, angkutan udara, BBM. Angka Inflasi pada Tahun 2014-2018 sebagaimana Diagram 2.2. berikut ini:

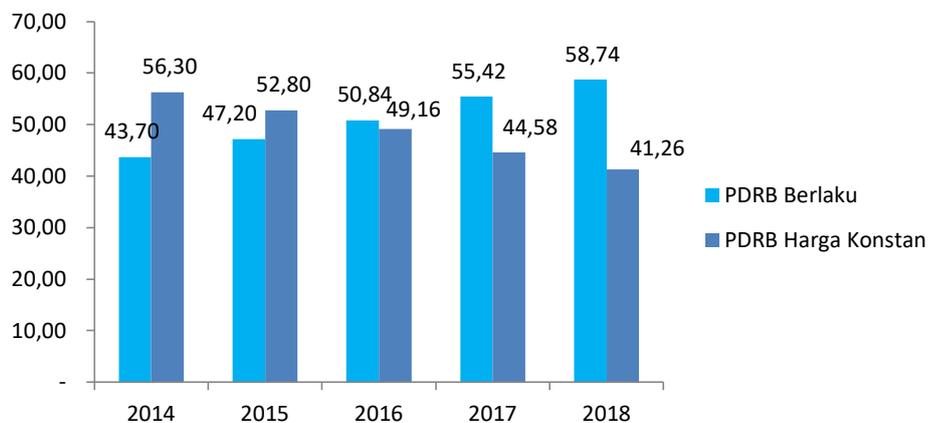


Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

**Gambar 2.3 Grafik
Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2019**

d. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto/ PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 tercatat mengalami peningkatan sebesar 8,46 persen atau senilai 19.334.838 miliar rupiah. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar ada pada Industri Pengolahan dengan persentase 24,69 persen. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan pada 2019 sebesar 5,79 persen, melambat 0,67 poin dari tahun sebelumnya. Jika ditinjau dari besaran share kontribusi PDRB pada tahun 2019 Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi penyumbang share PDRB terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Disisi pengeluaran, PDRB pengeluaran tahun 2018 terlihat bahwa kontribusi pengeluaran terbesar adalah ada pada Ekspor barang dan Jasa yaitu sebesar 83.95 persen.



Sumber : Kotawaringin dalam angka 2019

**Gambar 2.4 Grafik
PDRB Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat (Juta Rupiah) 2014-2018**



e. Presentase penduduk diatas Garis kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 sebesar Rp. 360.942,00. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 merilis data mengenai klasifikasi keluarga menurut kategori Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan II kondisi tahun 2015. Hasilnya sebanyak 49 persen keluarga di Kabupaten Kotawaringin Barat tergolong dalam Keluarga Sejahtera II. Jumlah penduduk dalam garis kemiskinan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.7
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2019

Tahun	Garis kemiskinan	Jumlah (000)	%
2012	263.840	14.37	5.63
2013	273.467	14.33	5.44
2014	279.080	14.33	5.27
2015	293.436	14.01	5.07
2016	319.064	14.11	4.96
2017	338.230	13.27	4.52
2018	344.337	12.90	4.27
2019	360.942	12,76	4,11

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2019

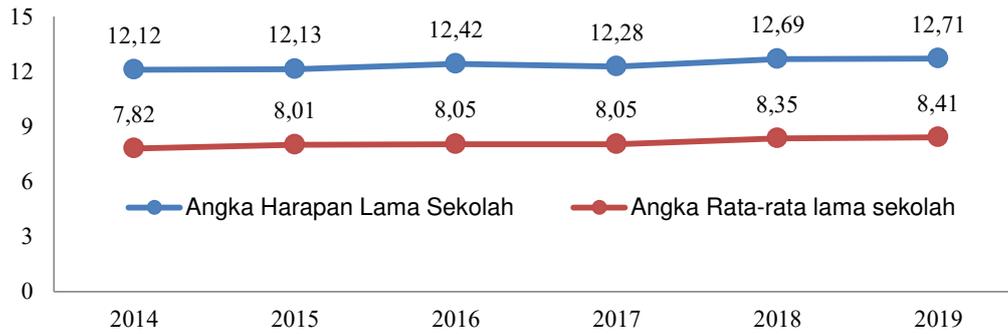
Berdasarkan data di atas, bahwa angka kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada masih relatif cukup banyak yaitu 12,76 ribu jiwa pada tahun 2019. Disisi lain, BPS juga melakukan pendekatan berbeda untuk mengetahui kualitas kehidupan masyarakat Kotawaringin Barat yang dihimpun dalam Indeks Pembangunan Manusia/IPM. IPM Kotawaringin Barat mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 69,42. Kabupaten Kotawaringin Barat menduduki peringkat ke-5 dari 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka harapan lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun belajar pada pendidikan formal yang telah diselesaikan penduduk berusia 15 tahun ke atas. Perkembangan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada diagram 2.5. berikut:



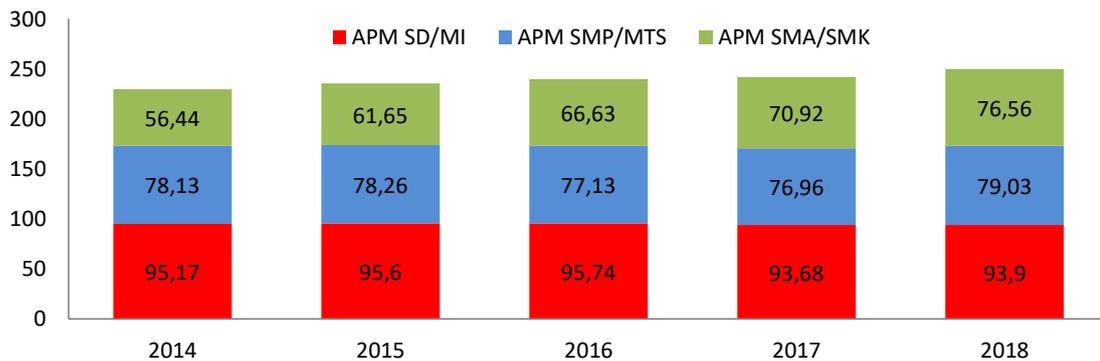


Sumber : LKPJ Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019

**Gambar 2.5 Grafik
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Kotawaringin Barat 2014-2019**

Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2019, penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kotawaringin Barat rata-rata menempuh pendidikan selama 8,41 tahun (setara kelas 2-3 SLTP). Angka ini sedikit meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, anak usia tujuh tahun pada tahun 2019 diharapkan akan menempuh pendidikan selama 12,71 tahun, atau tamat SLTA, bahkan sudah mulai masuk ke jenjang pendidikan tinggi.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APM Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014-2019 disajikan sebagai berikut:



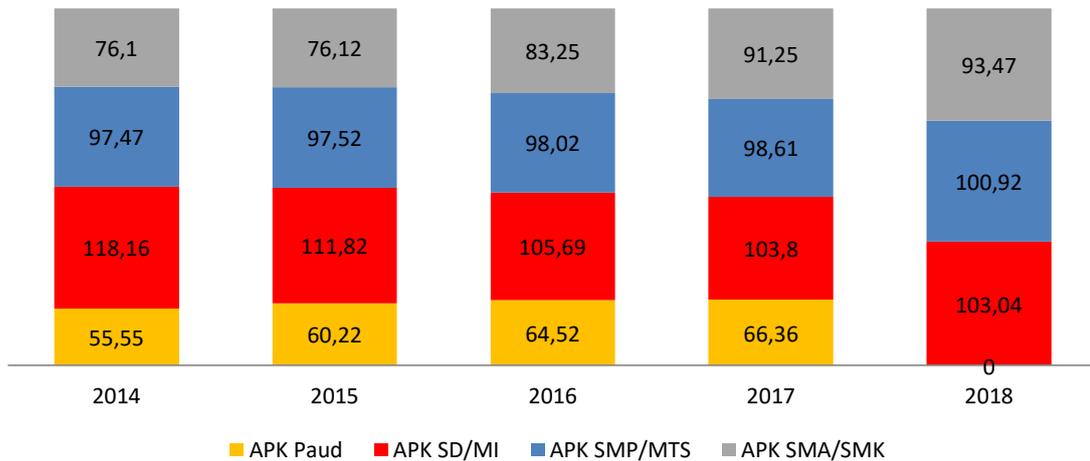
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ktw. Barat Tahun 2018

**Gambar 2.6 Grafik
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018 (%)**

Dari data di atas menunjukkan bahwa seluruh APM baik jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Sedangkan Grafik 2.7 di bawah ini menunjukkan bahwa APK jenjang SD/MI mengalami penurunan, sedangkan APK SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan

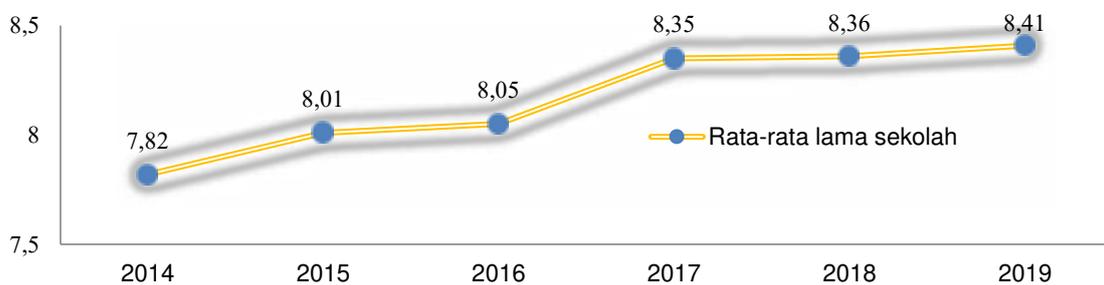


dengan jenjang pendidikan tertentu. Rekap data perkembangan APK Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014-2018 disajikan pada diagram berikut:



Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018 (%)

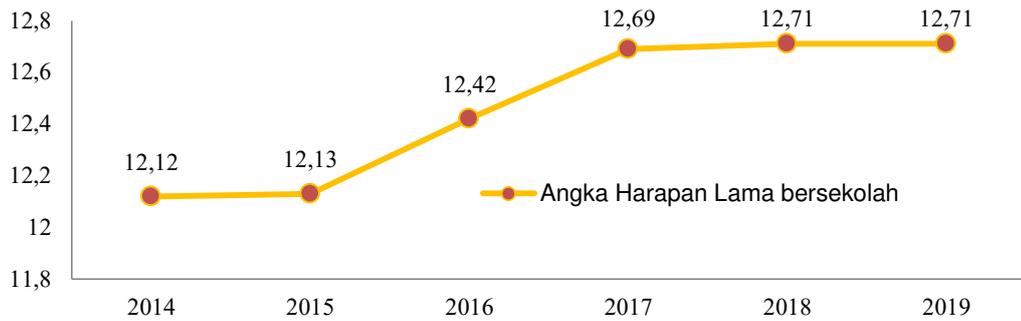
Dari gambar di atas menunjukkan masih ada penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum mengenyam pendidikan sampai jenjang menengah atau SMA. Kondisi ini terjadi karena masih terbatasnya SMA/SMK/MA yang sebagian besar di ibukota kecamatan belum terjangkau oleh semua lulusan SMP/MTs yang berada jauh dari ibukota kecamatan. Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014-2019 disajikan pada diagram berikut:



Sumber : LKPJ Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019

Gambar 2.8 Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018

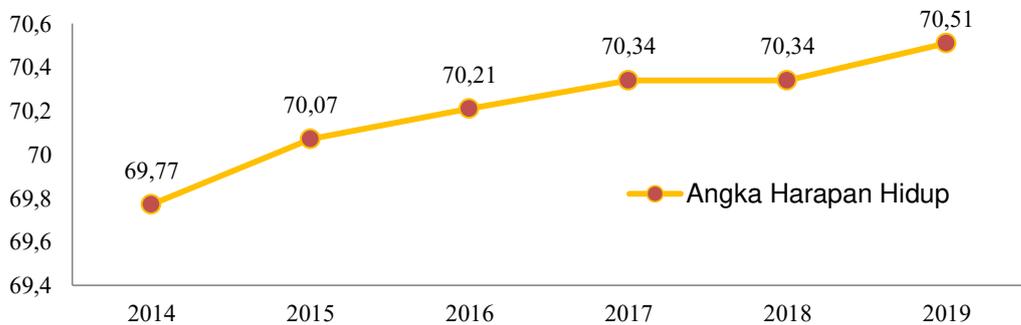
Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014-2019 disajikan pada diagram berikut:



Gambar 2.9
Grafik Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018

b. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan meningkatnya angka harapan hidup dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan Angka harapan hidup Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada diagram 2.8. berikut:



Sumber : LKPJ Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019

Gambar 2.10
Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti pada gambar di atas menunjukkan program dan kegiatan pada sektor lingkungan, kesehatan, sosial dan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian perlu ditingkatkan dan dikembangkan program-program inovasi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik/lebih tinggi. Status gizi masyarakat pada balita di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2014-2019.

Tabel 2.8
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018

Indikator	2017	2018	2019
Prevelansi Stunting	17%	7,14%	10,01

Sumber : LKPJ Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019

c. Ketenagakerjaan

Data terakhir tentang ketenagakerjaan yang dirilis adalah data ketenagakerjaan kondisi 2019, Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2019 tercatat bahwa terdapat 162.602 penduduk yang termasuk dalam penduduk angkatan kerja. Keterlibatan Penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). Dari total penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar 72,28% berada dalam usia kerja (15 tahun ke atas). Rasio antara angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2014 – 2019

Jenis Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan kerja	145.749	156.605	145.749	148.404	162.602
Bekerja	141.011	150.689	141.011	145.191	157.700
Pengangguran	4.738	4.916	4.738	3.213	4.902
Bukan angkatan kerja	56.796	54.112	56.796	68.425	62.358
Sekolah	18.135	18.981	18.135	19.642	13.310
Mengurus Rumah	33.405	29.336	37.949	44.573	44.370
Lainnya	5.256	5.765	3.992	4.210	4.678
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,96%	74,19%	71,96%	68,44%	72,28

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dimulai dari tahun 2014 sebesar 70,05%, tahun 2015 sebesar 71,96%, tahun 2016 sebesar 74,19%, tahun 2017 sebesar 71,96%, tahun 2018 sebesar 68,44% kemudian untuk tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 72,28%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun), semakin banyak jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dan menganggur), maka akan besar pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), hal yang sama juga berlaku untuk sebaliknya.



2.1.5. Fokus Seni Budaya dan Olah raga

Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.13. berikut:

Tabel 2.10
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Barat, 2014-2018

No	Capaian Pembangunan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Grup Kesenian	86	86	43	13	26
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah Klub Olah raga	120	122	124	84	84
4	Jumlah Gedung Olah raga	7	7	8	8	8

Sumber : LKPJ 2018

2.2. Aspek Pelayanan Umum

2.2.1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

Dalam melakukan analisa terhadap gambaran umum kondisi di suatu daerah salah satu indikator yang dilakukan penilaian adalah mengenai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu beberapa urusan sebagai berikut :

a. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan wajib pemerintah adalah bidang pendidikan, dalam mengukur keberhasilan pelayanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah terkait bidang pendidikan terdapat 10 indikator kinerja pelayanan yang diukur yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pelayanan pemerintahan wajib pemerintah

No	Indikator kinerja pembanguna daerah	Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka melek huruf (%)	96,12	97	97,05	97,05		
2	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,82	8,01	8,05	8,05	8,35	8,35
3	Angka putus sekolah						
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,2	0,2	0,14	0,26	0,26	0,17
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,19	0,4	0,7	0,37	0,37	0,19
4	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV						
	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,94	97,08	98	88,06	94,1	93,50
	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91,34	95,56	98,5	96,06	97,21	97,22
5	Angka Kelulusan						
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,92	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,58	100	100	98,9	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,09	99,09	99	98,91	98,88	
6	Angka Melanjutkan						



No	Indikator kinerja pembanguna daerah	Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	89,67	99,75	99,75	99,75	99,75	89,54
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,64	99,66	99,66	98,65	98,65	100
7	Fasilitas Pendidikan						
	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	89	33,05	33,1	33,1		
	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	89,5	52,78	52,8	52,8		
8	Rasio (perbandingan) jumlah guru/murid						
	SD/MI	1:32	1:21	1:21	1:26	1:38	
	SLTP/MTs	1:28	1:19	1:14	1:19	1:28	
	SMU/MA/SMK	1:28	1:14	1:14	1:24	1:28	
9	Angka Partisipasi Sekolah						
	SD/MI	99,82	99,53	94,81	99,15	88,24	
	SLTP/MTs	100	95,42	99,25	92,86	66,04	
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah						
	SD/MI	185	162,09	162,15	162,15	162,61	
	SLTP/MTs	310,12	123	332,19	332,19	180,9	

Sumber : LKPJ 2018 & 2019

b. Kesehatan

Tahun 2019 sebesar 76,00% hal ini menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur pasien masih ideal, dengan jumlah pasien rawat inap sebesar 15.719 orang. Beberapa indikator capaian kinerja terkait dengan pelaksanaan urusan kesehatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Cakupan dan Mutu Pelayanan Dilihat Melalui Indikator antara lain:

- Angka Kematian Neto/Net Death Rate (NDR) . Rata-rata NDR di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebesar 21,1%, berarti pelayanan rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat baik.
- Angka Kematian Umum / Gross Death Rate (GDR). Rata-rata GDR di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebesar 37,77%, berarti pelayanan rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat baik.
- Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit dapat dilihat dari BOR (Bed Occupancy Rate), LOS (Length of Stay) rata-rata lama dirawat (dalam satuan hari) seorang pasien dan TOI (Turn Over Interval).

Pada tahun 2016, Kabupaten Kotawaringin Barat secara resmi membuka Rumah Sakit Umum Daerah / RSUD baru yang berada di Kecamatan Parenggean. Adanya RSUD baru ini membuat semakin mudahnya akses kesehatan bagi warga utamanya di wilayah hulu yang sebelumnya harus memakan waktu 5 sampai 7 jam untuk sampai di RSUD di



kota. Penambahan RSUD ini juga membuat ketersediaan fasilitas rawat inap menjadi meningkat dari 243 pada 2015 menjadi 270 tempat tidur untuk rawat inap. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebanyak 565 orang. Secara kuantitas ada penambahan tenaga, baik tenaga profesi maupun tenaga administrasi dan penunjang . Data fasilitas kesehatan secara menyeluruh dapat dilihat sebagai berikut :

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu; LOS adalah rata-rata lama perawatan (dalam satuan hari) seorang pasien; dan TOI adalah lamanya pemakaian tempat tidur oleh pasien (dalam satuan hari). Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

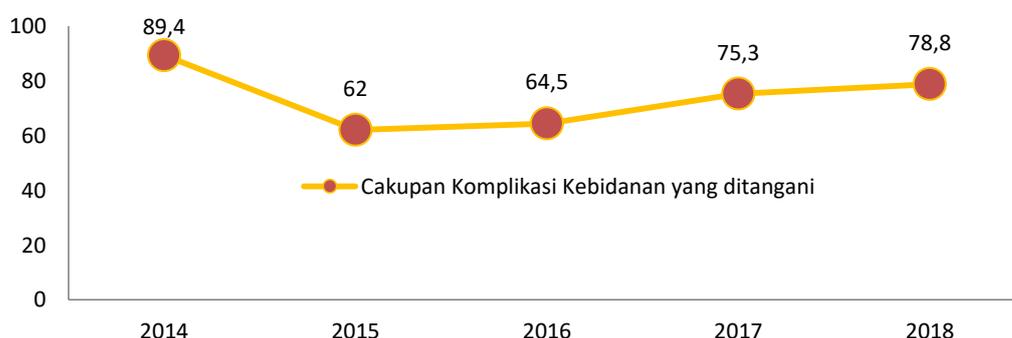
Tabel 2.12
Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2014-2019

Indikator	Tahun						Ideal
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
BOR	72,41	77	53,98	73,74	74,26	76,00	60–85%
LOS (Hari)	3,19	3,54	2,47	3,46	3,44	3,49	6–9 hari
TOI (Hari)	1,22	1,06	2,1	1,23	1,23	1,1	1–3 hari
BTO (Kali)	82,74	79,34	69,98	77,66	77,66	79,55	40-50 kali
GDR (%)	31,5	34,8	36,16	36,86	43,57	37,33	< 45%
NDR (%)	16,5	14,4	12,03	17,2	19,12	21,1	< 25%

Sumber: RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, 2019

2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2014-2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Kondisi pada tahun 2018 sebesar 78,80%, masih di bawah target yang diharapkan yaitu sebesar 80%.

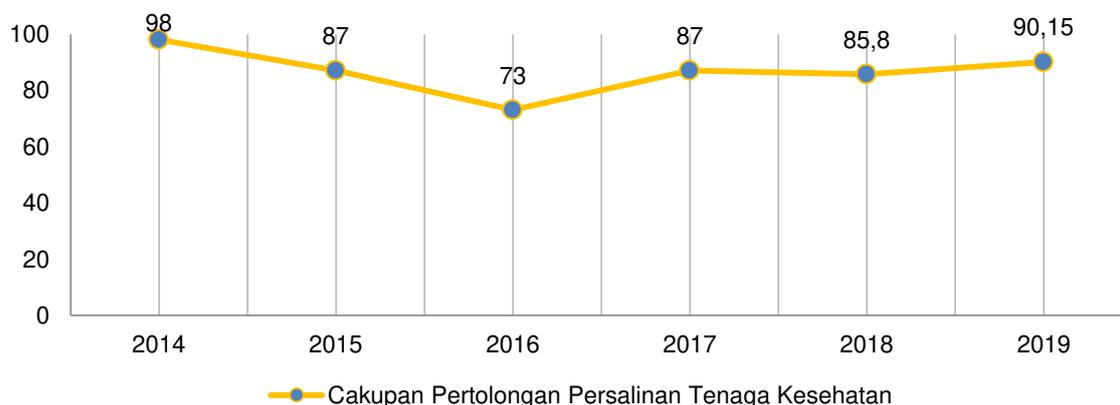


Gambar 2.11
Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2014-2018

3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Nakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (nakes) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes tahun 2014 sebesar 98,00% terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 73%. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 87% dan turun kembali pada tahun 2018 sejumlah 85,50% dan pada 2019 naik menjadi 90,15%. Penurunan capaian

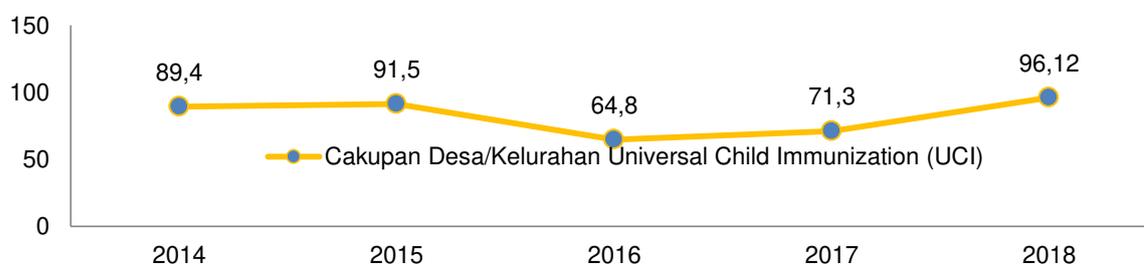
persalinan oleh tenaga kesehatan terjadi karena masih banyak sarana kesehatan swasta yang memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat yang belum melaporkan cakupan pelayanannya kepada dinas kesehatan setempat.



Gambar 2.12 Grafik Cakupan Pertolongan persalinan

4. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Target cakupan UCI menurut indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 95%. Indikator keberhasilan GAIN UCI pada tahun 2016 mencapai UCI 64,80% sedangkan pada tahun 2017 capainnya hanya 71,30%. Tahun 2018 meningkat menjadi 96,12%.

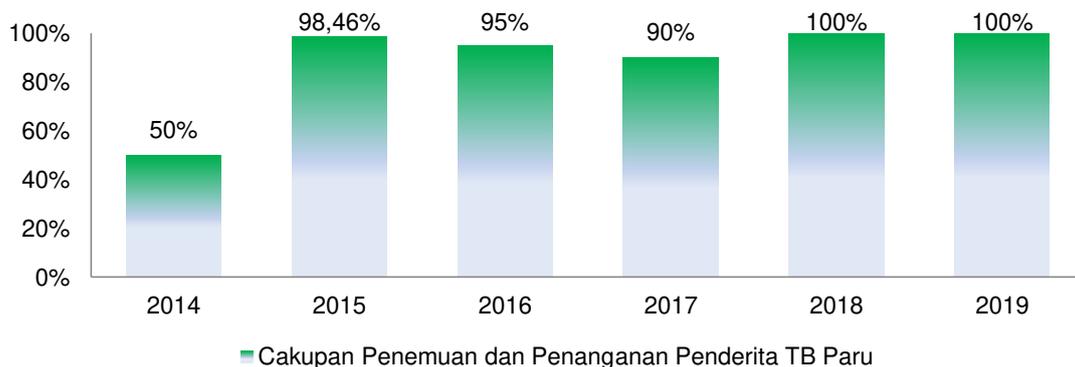


Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dari tahun 2014 - 2019 yaitu 100%. Semua kasus gizi buruk yang terlacak, mendapat perawatan dengan pemberian bantuan MP-ASI selama perawatan/ penanganan.



Gambar 2.13 Grafik Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Paru Kabupaten Kotawaringin dapat dilihat pada gambar berikut ini:



TB Gambar 2.14
Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Paru

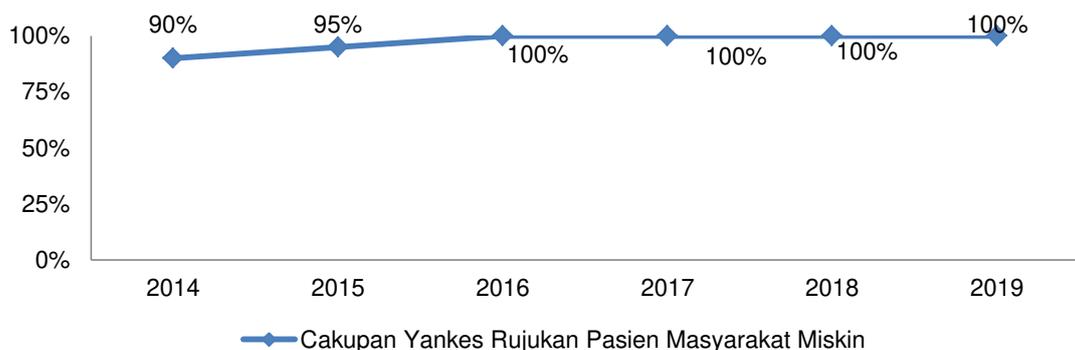
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita menunjukkan angka yang fluktuatif, Pada tahun 2014 (50%), tahun 2015 (98,46%), dan tahun 2016 (95,00%), tahun 2017 menurun menjadi 90,00% dan pada tahun 2018 penanganan penderita TB meningkat menjadi 100% dan 2019 dapat realisasi penanganan dapat dipertahankan 100%

5. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, diutamakan pada pelaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan. Angka Bebas Jentik (ABJ) DBD diharapkan dapat mencapai lebih dari 90%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD sejak tahun 2014 hingga 2018 mencapai target 100.

6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

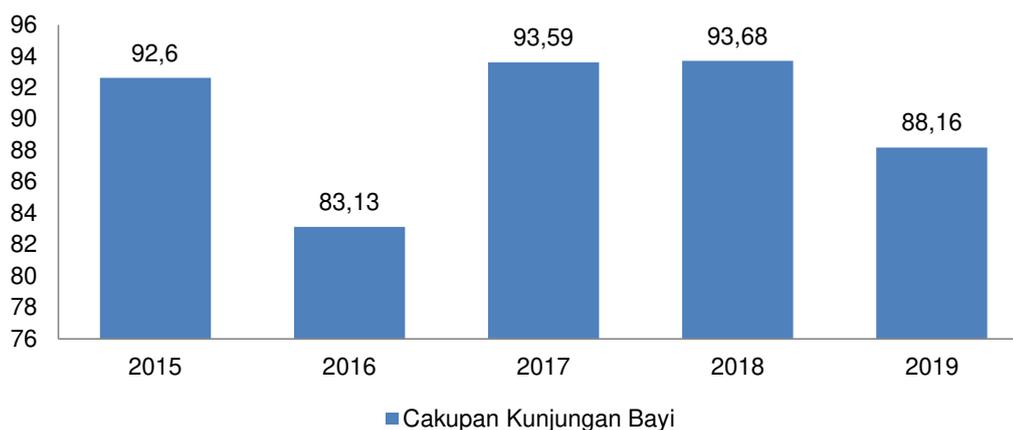
Cakupan pelayanan rawat inap masyarakat miskin (dan hampir miskin) dari tahun ketahun selalu menunjukkan peningkatan, terutama pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 100% hingga tahun 2019.



Gambar 2.16
Grafik Cakupan rujukan pasien miskin

7. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejak tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2014 sebesar 96,50% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 83,13% akan tetapi mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 senilai 93,59% dan tahun 2018 sebesar 93,68% sedangkan untuk tahun 2019 cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan menjadi 88,16%. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan puskesmas PONEB dalam melakukan pelayanan kegawatdaruratan neonatus baik dari alat dan sarana. Hal ini dapat diatasi dengan peningkatan standarisasi puskesmas PONEB baik dari alat, bahan dan kompetensi petugas termasuk rujukan neonatus.



Gambar 2.17
Grafik Cakupan Kunjungan Pelayanan kesehatan Bayi

c. Pekerjaan umum dan Penataan ruang

1) Pekerjaan Umum

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014-2018

Urusan Pemerintah / Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					2019
	2014	2015	2016	2017	2018	
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,26	0,45	0,36	0,37	0,37	0,37
Rasio Jaringan Irigasi	0,86	0,75	0,7	0,76	0,86	
Luas Wilayah Kebanjiran	14,00%	13,80%	12,00%	-	-	
Persentase rumah tinggal bersanitasi	100	100	77,96	84,5	86,6	
Persentase penanganan sampah	70,45	51,63	80,8	86,66	90,43	
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1,57	2,2	1,26	0,087	0,093	

Sumber: LKPJ, 2018

Beberapa indikator yang belum mencapai target yaitu rasio jaringan irigasi, luasan wilayah yang mengalami banjir dan rasio rumah layak huni. Persentase penanganan sampah

menunjukkan angka yang fluktuatif. Sedangkan rasio tempat pembuangan sampah pada tahun 2018 justru mengalami penurunan. Selain hal tersebut diatas capaian kinerja urusan pekerjaan umum juga dapat ditunjukkan melalui kondisi infrastruktur yang ada khususnya kondisi jalan dan jembatan. Berdasarkan statusnya, jalan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Statusnya Tahun 2015-2019

Klasifikasi Jalan	2015		2016		2017		2018		2019	
	Panjang (Km)	%								
Jalan Nasional	156,96	6,36	156,96	6,36	156,96	6,36	156,96	6,36	156,96	6,36
Jalan Provinsi	55,4	2,24	55,4	2,24	55,4	2,24	55,4	2,24	55,4	2,24
Jalan Kabupaten	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51
Jalan Desa	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89
Total	2469,75	100								

Sumber: Dinas PU Kab. Ktw. Barat Tahun 2019

Tabel 2.15
Spesifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2015-2018

No	Spesifikasi Jalan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Panjang (Km)	%								
1	Jalan Aspal	1.022,37	41,4	1.039,46	44,09	1.053,35	42,65	1.068,74	43,27	1161,78	47,04
2	Jalan batu/ krikil	100,65	4,08	92,03	3,73	90,56	3,67	66,93	2,71	68,75	2,78
3	Jalan Tanah	1.082,92	43,85	1.074,44	43,5	1.058,52	42,86	1.058,32	42,85	956,57	38,85
4	Tidak dirinci										
	Beton	137,81	5,58	137,81	5,58	141,02	5,71	148,87	6,03	161,88	6,55
	Titian	29,85	1,21	29,85	1,21	30,15	1,22	30,15	1,22	31,51	1,28
	Lainnya	96,16	3,89	96,16	3,89	96,16	3,89	96,76	3,92	86,26	3,49
Total		2469,75	100								

Sumber: Dinas PU Kab. Ktw. Barat Tahun 2019

Panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2019 adalah 2.469,75 Km, panjang jalan beraspal pada tahun 2019 ini meningkat dari 1.068,74 Km menjadi 1161,78 Km. Secara presentase penambahan panjang jalan beraspal di Kabupaten Kotawaringin barat sebesar 3,77 % menjadi 47,04%.



Tabel 2.16
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2015-2019

No	Klasifikasi Jalan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Panjang (Km)	%								
1	Jalan Baik	890,5	36,06	897,27	36,33	915,63	37,07	923,09	37,37	961,879	38,95
2	Jalan Sedang	761,46	30,83	772,31	31,27	768,86	31,13	746,8	30,24	729,46	29,54
3	Jalan Rusak Ringan	608	24,62	610,18	24,71	607,7	24,61	547,68	22,18	542,26	21,96
4	Jalan Rusak Berat	209,79	8,49	189,99	7,69	177,56	7,19	252,18	10,21	236,16	9,56
Total		2.469,75	100,00								

Sumber: Dinas PU Kab. Ktw. Barat Tahun 2019

Tabel 2.17
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Kelas Jalan Tahun 2014-2018

No	Klasifikasi Jalan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Panjang (Km)	%								
1	Kelas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kelas III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kelas III A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelas III B	212,36	8,6	212,36	8,6	212,36	8,6	212,36	8,6	212,36	8,6
6	Kelas III C	456,12	18,47	465,9	18,86	465,9	18,86	465,9	18,86	465,9	18,86
7	Kelas Tidak di rinci	1801,27	72,93	1.791,49	72,54	1.791,49	72,54	1.791,49	72,54	1.791,49	72,54
Total		2.469,75	100,00								

Sumber : LKPJ 2018, 2019

Sedangkan kondisi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut ini:

Tabel 2.18
Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2014-2018

No	Kondisi Jembatan	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Jembatan Baik	141	74,6	141	77,47	162	76,06	205	87,61	221	92,86	237	97,93
2	Jembatan Sedang	30	15,87	26	13,76	20	9,39	11	4,7	8	3,36	3	1,24
3	Jembatan Rusak	16	8,47	14	7,41	15	7,04	8	3,42	5	2,1	2	0,83
4	Jembatan Rusak Berat	2	1,06	1	0,53	16	7,51	10	4,27	4	1,68	0	0
Total		189,00	100,00	182,00	99,17	213,00	100,00	234,00	100,00	238	100	242	100

Sumber: Dinas PU Kab. Ktw. Barat Tahun 2019



2) Penetapan Tata ruang

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang, 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
2	Perda RTRW	-	-	-	-	1
3	Dokumen RDTR	2	-	-	-	-
4	Ketaatan pada RTRW	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PU Kab. Ktw. Barat Tahun 2017

d. Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja pada Urusan Perumahan Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					2019
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih	70	70,55	72	74,21	70,56	80,10
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (jamban sendiri)	72,1	75,49	77,96	80,39	87,62	
3	Persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik	98,12	98,78	98,8	81	86	
4	Rasio rumah layak huni	0,95	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95
5	Rasio permukiman layak huni	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	

Sumber: Dinas PU dan BPS Kab. Ktw Barat Tahun 2019

Capaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2014 sampai 2019 antara lain dapat dilihat pada persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih yang menunjukkan adanya peningkatan mencapai 74,21%, Rumah tangga bersanitasi mencapai 80,10 %, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam mengelola sanitasi sangat baik.

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

Adapun Capaian Kinerja yang berhasil dicapai dalam penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah tenaga/satuan linmas (orang)	1.226	1.226	1.226	1.220	1.220
2	Jumlah pos jaga/ronda (unit)	8	4	8	4	2
3	Jumlah tenaga/satuan linmas yang dilatih (orang)	1.226	1.226	1.226	1.220	1.220
4	Tingkat gangguan kebisingan lingkungan	5	10			
5	Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	79	50	154	90	134
6	Data laporan hasil monitoring			6 buku		
7	Kondisi daerah yang kondusif (kec)	6	6	6	6	6
8	Tingkat Kehamonian umat beragama (org)	150	150	25	100	100
9	Tingkat Kehamonian antar etnis (org)	220	300	200	90	100
10	Tingkat partisipasi pemuda pemudi pada kegiatan IBAB dan Hari Sumpah Pemuda (org)	80	80	40	70	70
11	Peningkatan SDM tokoh lintas agama dan forum (forum)	4	3	3	3	2
12	Implementasi SKB 3 Menteri (org)	200	300	84	94	
13	Tingkat penyalahgunaan miras & narkoba (org)	400	300			
14	Tingkat praktek prostitusi (org)	100		250		
15	Data laporan hasil monitoring			10buku		
16	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pendidikan politik (org)	70	360	150	186	610
17	Jumlah parpol dan ormas/LSM (parpol/ormas dan LSM)	12/70	12/70	12/40	9	9
18	Jumlah data base parpol dan ormas/LSM (buku)		10			
19	Data laporan hasil monitoring (kec)		6	6		
20	Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya bencana	100	100			

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Kab. Ktw. Barat Tahun 2018

Adapun perkembangan dari hasil pengawasan terhadap Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.22
Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2014-2018

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	3	3	43	27	10
2	Minuman Keras (Miras)	50	80	61	59	48
3	PSK liar/prostitusi/Pasangan Mesum	20	39	81	2	20
4	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)	6	6	13	2	7
5	Premanisme	-	-			
6	Judi Togel	-	1			
7	Mucikari	-	14	9	8	1
8	KTP	-	9	4	-	-
9	Ngelem Fox	-	1	6	-	-

Sumber: LKPJ, 2018

Adapun capaian kinerja penanggulangan bencana, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Urusan Pemerintah / indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa / kelurahan yang telah mendapat sosialisasi pelatihan / pembinaan	12	23	29	33	39
2	Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih	5	5	5	19	
3	Presentase kejadian bencana yang dapat ditangani	75	75	-	51,7	77

Sumber: LKPJ 2019

f. Sosial

Untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja		
		2016	2017	2018
1.	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	21	21	26
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2.675	4.014	4.948
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (kasus)	1.024	1.186	9.270

Sumber: Dinas Sosial Kab. Ktw. Barat Tahun 2018

Sumber: Dinas Sosial Kab. Ktw. Barat Tahun 2018



2.2.2. Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Ketenaga kerjaan

Program yang diupayakan pemerintah untuk mengoptimalkan tenaga kerja Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tabel 2.25
Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target	Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,25	2,82	1,98
2	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	9,14	100	24,3
3	Pencari kerja yang mengikuti pelatihan	%	72	100	100
4	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh	%	72,31	100	96,94
5	Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	-	50	100
6	Upah Minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	%	-	100	100
7	Persentase Hukum di Bidang Norma Ketenagakerjaan	%	-	100	100

Sumber: Disnakertrans Kab. Ktw. Barat 2019 (Dalam LKPJ 2019)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama pada Urusan Tenaga Kerja yang harus dicapai berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,82 dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 1,98 % artinya bahwa target yang ditetapkan dalam RPJMD sudah tercapai. Dari sisi pencari kerja yang ditetapkan capaian saat ini masih sangat minim namun ada peningkatan 19,41% dari tahun sebelumnya yaitu 4,8 % menjadi 24,3 .

Tabel 2.26
Kondisi Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Upah Minimum Regional (UMK) /Rp	2.003.745	2.204.120	2.391.470	2.599.000	2.808.528
Kondisi Pasar kerja						
2	Pendaftaran	2.669	876	908	1.206	1.115
3	Permintaan	346	177	403	1.368	552
4	Pengiriman	210	92	264	59	271
5	Penempatan	176	78	83	59	271

Sumber : LKPJ 2019



Kondisi pasar kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat dilihat dari tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja mencapai 96,07%. Tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 sebesar 2,17% dan capaian menjadi 1,98% di Tahun 2019 dari target 2,82% di tahun 2019.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dapat lebih lagi mengoptimalkan lagi berbagai upaya terkait dengan peningkatan penyediaan kesempatan kerja guna untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang cukup signifikan sehingga bisa lebih lagi menekan tingkat pengangguran di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Adapun capaian kinerja pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2015-2019

No	Peserta KB Aktif	2015	2016	2017	2018	2019
1	IUD	1.015	1.054	1.033	1.113	1.219
2	MOP	140	134	126	129	129
3	MOW	758	762	727	775	775
4	IMPLANT	3.175	2.463	2.362	2.148	2.218
5	SUNTIK	19.174	18.261	17.721	17.900	17.911
6	PIL	8.610	9.085	9.126	6.733	6.740
7	KONDOM	1.044	884	921	1.029	1.032

Sumber : LKPJ 2019

Selanjutnya capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,8	3	3	3	3
2	Jml peserta KB aktif	33.916	32.643	32.016	30.432	34.013
3	Rasio akseptor KB (%)	69,92	72,25	48,85	72,65	69,69
4	Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera	-	22678	22678	22678	19.405

Sumber : LKPJ 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara jumlah peserta KB aktif pada tahun 2019 meningkat , namun secara rasio akseptor KB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk rata-rata jumlah anak sebagai upaya penekanan jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 hingga 2019 dapat tercapai, dan jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan.

c. Pangan

Capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Indikator kinerja Urusan Ketahanan Pangan

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	12 / Th				
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,1	92,7	97,3	96,8	97,04
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	66,6	70,77	77,5	-	-
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	12 Desa				

Sumber : LKPJ 2019

Mulai tahun 2017 SPM ketahanan pangan sudah tidak berlaku. Indikator capaian urusan ketahanan pangan adalah skor PPH, sehingga terkait dengan capaian kinerja urusan ketahanan pangan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,24%

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersediaan Pangan (Beras)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk (Jiwa)	278.141	286.714	295.249	304.230	313.397
2	Jumlah produksi (Ton)	11.797	12.494	9.373,19	10.290	
3	Jumlah Kebutuhan (Ton)	33.866	34.910	35.961,69	37.044,14	38.159,22
4	Jumlah Kekurangan (Ton)	22.070	22.417	26.588,50	26.754,14	35.660,27

Sumber : LKPJ 2019

Berdasarkan tabel di atas, dalam sistem ketersediaan pangan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masih mengalami defisit atau tergantung dari luar daerah yang mencapai rata-rata 25% - 30% per tahun.



d. Pertanian

Perkembangan jumlah tanah bersertifikat dan luas tanah yang bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2018, dari 280,81 Hektar. Sedangkan jumlah tanah yang belum bersertifikat tahun 2018 seluas 533,89 hektar.

Tabel 2.31
Indikator capaian Urusan pertanahan

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas tanah bersertifikat	Hektar	808,88	808,88	280,65	280,81	
2	Luas tanah yang belum bersertifikat	Hektar			532,89	533,89	
3	Jumlah bidang tanah bersertifikat	bidang	103.470	103.470	426	428	
4	Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat	bidang			385	386	
5	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten	bidang	769	769	813	813	
6	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemkab yang sudah bersertifikat	bidang	429	429	426	428	
7	Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten dengan status hak pakai/ hak guna bangunan kepada pihak ketiga	bidang	1.254	1.254	-	-	-
8	Jumlah Ijin lokasi yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan tanah kas desa	Ijin	-	-	-	-	-
9	Konflik pertanahan yang terjadi	Kasus	4	4	3	3	
10	Konflik pertanahan yang terselesaikan	Kasus	3	3	1	1	

Sumber: LKPJ 2018, 2019

e. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kinerja urusan lingkungan hidup sesuai indikator kinerja selama tahun 2015 - 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Penanganan sampah	51,63	60,75	86,7	90,43	
2	Jumlah Duta Lingkungan (orang)	-	-	2	-	-
3	Jumlah Kader lingkungan (orang)	40	-	-	-	-
4	Jumlah Adhiwiyata (orang)	50	50	50	70	
5	Pencemaran status mutu air	2	2	2	2	
6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air: Mangrove (bibit)	-	-	-	-	-
	Ruang Terbuka Hijau (bibit)	200	-	-	1.040	-
	Biopori (Lubang Tanam)	-	-	-	1.000	-
7	Penegakan Hukum Lingkungan	4	-	-	3	-

Sumber : LKPJ 2018



f. Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014-2018 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Nasional	95	97,78	101,17	101,61	
2	Persentase jumlah penduduk yang memiliki Elektronik KTP (e_KTP)	54,13	90	101,2	101,61	76,75%
3	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KK Nasional	76,25	76,6	78,37	98,57	
4	Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	58,36	61,26	73,46	74,41	84,62
5	persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan dan Akta lainnya	271	167	102,4	105	

Sumber : LKPJ 2019*

Persentase target jumlah pemilik KTP berbasis NIK pada tahun 2019 mengalami penurunan . Pada tahun 2018 sejumlah 101,61% turun menjadi 76,75% di tahun 2018. Pada tahun 2018 persentase jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) terjadi peningkatan 20,2% dibandingkan tahun 2017. Persentase kepemilikan akte kelahiran dari tahun 2014-2019 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2014 sebesar 58,36% meningkat menjadi 84,62% di tahun 2019. Meningkatnya persentase kepemilikan akte kelahiran ini disebabkan oleh adanya kebijakan penerbitan akte kelahiran secara gratis atau bebas bea bagi bayi yang berusia kurang dari 60 hari.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa yang Terperbaharui Profil Desanya	77	77	80	80
2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	81	81	94	94
3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih	-	-	-	-
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	1	1	1	1

Sumber : LKPJ 2018



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ada satu target IKK yang belum tercapai 100%, yaitu Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, dari target 94 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan akhir tahun 2018 baru ada 80 Desa yang telah memiliki Profil Desa yang representatif.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2018

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Aparatur Desa, Anggota BPD SM2L yang mengalami Kelembagaan Desa dan Peningkatan Pemahaman tentang Pembangunan Partisipatif	120	120	81	81
2	Jumlah Siswa/Siswi yang mendapat penyaluran dana PMT-AS untuk anak sekolah di Desa Tertinggal	276		290	290
3	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan Monitoring	94	94	94	94
4	Jumlah Desa yang dapat difasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes	94	94	94	94
5	Jumlah Fasilitas Pembentukan BUMDes	57	62	70	74
6	Jumlah Perempuan yang terlatih dalam Pelatihan Keterampilan P2W	60	60	60	60
7	Jumlah Profil Desa Yang Terperbahurui	77	77	80	80
8	Jumlah pelaksanaan BBG-RM	1	1	1	1
9	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih				
10	Jumlah Juara Lomba Desa/Kelurahan	6	6	6	6
11	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	1	1	1	1
12	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	7	7	13	15

Sumber : LKPJ 2018

h. Perhubungan

Adapun beberapa indikator kinerja dalam usaha pencapaian target kinerja pembangunan dibidang urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pelabuhan Laut	3	3	3	2	3
3	Jumlah Terminal	4	4	3	1	3
4	Jumlah Halte	12	12	11	12	13
5	Jumlah Jaringan Trayek AKDP	3	3	4	4	4
6	Jumlah Jaringan Trayek Perdesaan	9	9	7	5	
7	Jumlah Dermaga LLASDP	19	22	4	13	13
8	Jumlah Trayek LLASDP	4	4	4	4	4

Sumber : Dishub Kotawaringin Barat , LKPJ 2019



i. Komunikasi dan Informatika

Pencapaian kinerja dari tahun 2014-2018 dalam usaha mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Tingkat capaian			
			2015	2016	2017	2018
1	Ketersediaan web site pemerintah daerah	unit	16	16	-	14
2	Terselenggaranya pameran/ ekspo	kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
3	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	media	7 media	5 media	4 media	5 media
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal/ Media Online	media	6 media	4 media	2 media	3 Media
5	Jumlah Pemberitaan melalui media cetak	media	7 media	7 media	2 media	5 media
6	Siaran Keliling /Publikasi Keliling	kali	48 kali	47 kali	25 kali	-

Sumber : LKPJ 2018

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2014-2017

	2017	2018	2019
Prosentase Koperasi yang berkualitas (%)	5%	6%	6,5%
Presentase Wirausaha baru	2,36%	2,17%	2,45%
Presentase UKM / UMKM	1,17%	1,17%	1,80%

Sumber: LKPJ 2019

Berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah, perkembangan jumlah persentase koperasi yang berkualitas dan UMKM terus mengalami peningkatan. Jumlah koperasi berkualitas meningkat dari tahun 2017 sebesar 5% menjadi 6,5% pada tahun 2019. Presentase wirausaha baru juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 2,36% menjadi 2,45% pada tahun 2019.

k. Penanaman Modal

Capaian kinerja utama urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dilihat dari sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 2014-2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	35	45	40	51	
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)				10.737.406.800.000	



PMDN (Rp)	714.448.540.000	3.710.499.700.000	265.396.300.000	8.739.363.200.000	11.860.597.625.36
PMA (\$)	920.119.034	455.203,99	1.996.616,4	4.489.380,00	6.078.333
Rasio daya serap tenaga Kerja PMA	667,86				32
Rasio daya serap tenaga Kerja PMDN	108,81	459,1	-3.445.1	8.473.9	3.642

Sumber : DPMPSTP, 2019 (data realisasi PMA/PMDN s/d Triwulan III Tahun 2019) LKPJ 2019

Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Investor semakin berminat untuk membuka Investasi baru dan sudah mulai melihat prospek dan peluang pasar yang lebih baik. Hal ini didukung pula dengan kemudahan dalam proses pengurusan ijin usaha yang telah menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

I. Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.40
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	Tingkat capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional		12	14	-	1	2
2	POPNAS	medali	4	7		1	1
3	POSPENAS	medali	3	3			
4	Jumlah organisasi pemuda	buah	105	235	235	236	236
5	Jumlah organisasi (klub) olah raga	buah	122	124	29	29	
6	Gedung olah raga/balai remaja	unit	8	8	3	3	
7	Lapangan olahraga	unit	150	150	100	110	

Sumber : LKPJ 2019

m. Statistik

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik tahun 2014-2018 Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.41
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	Target	Tingkat capaian			
				2015	2016	2017	2018
1	Ketersediaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka	Buku	Ada	ada	ada	ada	ada
2	Ketersediaan buku PDRB Kotawaringin Barat	Buku	Ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : LKPJ 2018



n. Kebudayaan

Tabel 2.42
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019

No.	Indikator	Capaian		
		2017	2018	2019
1	Persentase Seni Budaya yang Lestari	33%	35%	41%
2	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang Lestari	11%	22%	33%

Sumber LKPJ 2018

Persentase seni budaya yang dilestarikan tahun 2017 adalah sebesar 33% dan terjadi peningkatan di tahun 2019 sebesar 41%. Jumlah sanggar seni budaya yang dikelola atau dilestarikan pada tahun 2018 sebanyak 41 sanggar seni dari 118 sanggar seni yang ada. Sedangkan tahun 2019 sebanyak 51 sanggar yang dikelola atau dilestarikan dari 124 sanggar seni yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk persentase situs dan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2017 sebesar 11% dan terjadi peningkatan di tahun 2019 yaitu sebesar 33%. Capaian ini berdasarkan jumlah situs dan cagar budaya yang dikelola/dilestarikan pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) buah cagar budaya dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 4 buah cagar budaya dari 18 cagar budaya yang ada.

o. Perpustakaan

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perpustakaan	328	343	122	5	182
2	Jumlah anggota perpustakaan	7.012	8.732	1.599	9.017	9.908
3	Jumlah pengunjung perpustakaan	75.309	93.737	124.582	133.831	77.229
	Jumlah peminjam	45.287	73.393	13.158		
	Jumlah koleksi bahan pustaka	18.173	21.799	25.376	26.830	28.330
	Ratio Jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	328 : 278.141				
	Ratio jumlah pustakawan terhadap jumlah penduduk	1 : 278.141				

Sumber : LKPJ 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2014 sampai 2019 mengalami peningkatan dari 18.173 judul buku menjadi 28.330 judul buku.



p. Kearsipan

Terkait dengan Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44
Indikator Kinerja Kearsipan

No.	Indikator	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)	Ada	ada	ada	ada	
2	Ketersediaan Peraturan Perundangundangan Kearsipan		5			
3	Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis	4	4	1	8	19
4	Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)	4:36	4:36	4:36	5:36	
5	Arsip audio visual		265	30	756	
6	Arsip Foto/Album	309	30	36	252	
7	Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa	21	21	21	21	13
8	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	19.515	19.515	300	39.801	41.557
9	Jumlah Arsip Statis/Vital yang dikelola	1.008	7	311	1.327	1.340

Sumber : LKPJ 2019

Capaian indikator pembangunan daerah urusan kearsipan adalah tersediannya pengelolaan arsip secara baku yang telah diselenggarakan pada tahun 2014 yaitu 19.462 Arsip In Aktif yang dikelola. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 41.557 Arsip In Aktif.

2.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Pertanian dan Peternakan Serta Perkebunan

Capaian kinerja urusan Pertanian berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian		
		2017	2018	2019
1	Tingkat produktivitas tanaman pangan (Kwintal / Ha)	26,84	28,38	30,51
2	Tingkat produktivitas Tanaman Holtikultura (Ton / Ha)	4,19	7,75	4,89
3	Tingkat Produktivitas perkebunan (Ton / Ha)	3,79	3,72	4,17

Sumber : LKPJ 2019

Pada tabel di atas capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari produktivitas tanaman pangan , dimana dari tahun ke tahun selama 2017-2019 produktivitasnya cenderung meningkat. Untuk produktivitas tanaman holtikultura menurun , dan untuk tingkat produktivitas perkebunan mengalami peningkatan . Sedangkan untuk capaian kinerja sub sektor peternakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan
di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Populasi Ternak					
	Sapi (ekor)	14.397	17.203	18.726	25.770	27.983
	Kerbau (ekor)				12	
	Kambing /Domba (ekor)	2.764	2.538	3.997	3.035	3.503
	Babi (ekor)	5.718	5.881	6.178	6.084	6.394
	Ayam buras (ekor)	345.661	346.843	451.038	424.742	445.129
	Ayam ras petelur (ekor)	46.500	50.794	293.219	173.820	149.920
	Ayam ras pedaging (ekor)	158.253	210.115	224.984	6.243.880	9.292.785
	Itik (ekor)	41.527	42.574	880	45.008	46.166
2	Produksi Daging Ternak					
	Sapi (Ton)	572,24	625,86	1.047,68	575,50	665,11
	Kerbau (Ton)					
	Kambing / Domba(Ton)	58,14	33,02	42,88	36,981	38,89
	Babi (Ton)	94,47	86,53	11,514	166,576	183,67
	Ayam buras (Ton)	340,5	400,6	433,95	313,979	314,71
	Ayam Ras Petelur (Ton)			20,39		16,64
	Ayam Ras Pedaging (Ton)	817,78	1.031,75	892,10	5769,35	5.047,98
	Itik (Ton)	14,12	17,09	15,14	27,27	29,08
3	Produksi Telur					
	Ayam buras (Ton)	207,98	212,71	281,84	361,031	378,36
	Ayam Ras Petelur (Ton)	209,25	366,39	388,31	2.181,44	1.908,68
	Itik (Ton)	133,19	179,97	161,17	264,623	271,43
4	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	0,63	0,61			
5	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,2	1,12			
6	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%)	26,38	26,06			

Sumber : LKPJ 2019

Berdasarkan Tabel di atas terlihat populasi sapi potong dari tahun 2014 – 2019 cenderung mengalami peningkatan. Secara umum populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah ternak sapi, kambing, ayam petelur dan ayam ras pedaging. Populasi ternak kambing/domba dari tahun 2014-2019 cenderung mengalami peningkatan populasi. Tahun 2014 sebesar 2.398 menjadi 3.503 pada tahun 2019. Populasi ternak babi dari tahun 2014-2019 cenderung mengalami peningkatan. Populasi sebesar 5.498 menjadi 6.394 pada tahun 2019. Capaian kinerja sub sektor perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Perkebunan
di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	21,61	21,61	25,25	24,88	23,90
Kontribusi PDRB subsektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)	88,6	88,6	42,81		
Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US\$)	189.439,16	189.439,16	28.920.764		
Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	55.160	55.160	55.160	22.733	
Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	15	15	14		
Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	12.447.807,38 4	12.447.807,38 4	7.511.246,815		
Kemitraan/Plasma	28.785,91	28.785,91	28.785,91		
Pengembangan/ perluasan areal perkebunan	212.426	212.426	214.7450	220.361	
Karet	14.560,30	14.560,30	12.470	17.724,99	
Kelapa sawit	196.541,30	196.541,30	200.759,35	201.113,35	
Kelapa	738,75	738,75	938,75	938,75	
Lada	318,6	318,6	312,90	314,60	
Lainnya	267,51	267,51	268,51	268,51	
Produksi komoditi perkebunan	2.981.823,68	2.981.823,68	2.739.175,85	3.272.840,38	
Karet (lump)	7.253,8	7.253,8	7.235,00	7.822,39	
Kelapa (kopra)	265,45	265,45	260,22	210,26	
Kelapa Sawit (Tbs)	2.974.134,28	2.974.134,28	2.731,51	3.264.711,14	
Lada (putih/hitam)	156,49	156,49	156,00	82,96	
Lainnya	13,63	13,63	13,63	13,63	

Sumber : LKPJ 2018

Produksi perkebunan per komoditi dari 2014-2018 mengalami penurunan pada semua komoditi karena pengaruh musim kemarau panjang. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari 2.739.175,85 menjadi 3.272.840,38.

b. Kelautan dan Perikanan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kelautan dan Perikanan dari tahun 2014 sampai 2019 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 2.48
Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi perikanan (Jumlah Produksi dibagi target daerah dikalikan 100%)	109,38	106,54	105,52	107,30	118,18
Konsumsi Ikan (Jumlah konsumsi dibagi target daerah dikalikan 100%)	99,06	106,71	100	100	
Cakupan Bina kelompok Nelayan (Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda dibagi jumlah kelompok nelayan pada tahun n dikalikan 100%)	36,95	40,12			
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Jumlah produksi ikan hasil kelompok nelayan dibagi jumlah produksi ikan daerah dikalikan 100%)	20,09	10,16			

Sumber : LKPJ 2019

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014-2019 seperti tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.49
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019

NO	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi perikanan (TON)	16.661,43	19.922,39	20.813,94	22.992,96	26.096,60
2	Perikanan tangkap (TON)	12.050,40	14.792,70	15.851,87	17.356,46	18.972,63
3	Perikanan Budi daya (TON)	4.611,03	5.129,69	4.962,07	5.636,50	7.123,97
4	Konsumsi ikan (KG/KAPITA)	38	41,35	45	47	
5	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan (KELOMPOK)	458	453	440	445	
6	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang dibina (KELOMPOK)	165	209	220	235	
7	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	431,30	4.698,39	-167,62	674,43	1.487
8	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	-178,90	2.806	1.059,17	1.504,59	1.616
9	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	0,45	1,7	1,5	2,0	

Sumber : LKPJ 2019

c. Pariwisata

Pencapaian kinerja dari tahun 2014-2019 dalam usaha mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	61.070	134.095	111.482	152.406	439.534

Sumber : Dinas Pariwisata LKPJ 2019



Jumlah kunjungan wisatawan dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan. Penurunan jumlah wisatawan dikarenakan krisis Ekonomi Eropa dan adanya bencana kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan dan Sumatera, walaupun jumlah wisatawan menurun tetapi pendapatan retribusi meningkat terutama TNTP.

d. Energi dan Sumberdaya Mineral

Capaian kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 - 2019 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,45	1,34	1,35	1,25	1,36

Sumber : Kotawaringin Barat dalam angka 2019

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja di atas Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terus mengalami penurunan sebesar 0,42%. Penurunan tersebut sebagai akibat dari adanya penutupan lokasi atau penertiban penambangan secara berkala di seluruh 6 kecamatan.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Volume dan Nilai Ekspor Pertambangan Tahun 2014-2018

Uraian	Volume Ekspor(MT)				Nilai Ekspor(dalam Ribuan Rp)			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Zircon Sand	13.998	12.446	14.043	13.244	2.779.600	2.489.200	2.808.600	2.640.800
Jumlah	13.998	12.446	14.043	13.244	2.779.600	2.489.200	2.808.600	2.640.800

Sumber LKPJ 2018

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja diatas, volume dan nilai perdagangan ekspor di Kabupaten Kotawaringin Barat terus berjalan dari tahun 2014-2019 walaupun mengalami fluktuasi.

Tabel 2.53
Kontribusi Sektor Ketenagalistrikan Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2019

Uraian	Capaian kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi sektor listrik terhadap PDRB	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

Sumber : LKPJ 2018



Kontribusi sektor Ketenagalistrikan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut pada tahun 2015 sebesar 0,05% dikarenakan adanya perubahan tarif dasar listrik (TDL) oleh pemerintah, meningkatnya pemasangan jaringan listrik untuk rumah masyarakat dan adanya perubahan tegangan voltase atau KWH dari 450 ke 900, 1300 atau 2200 yang berdampak kepada meningkatnya penerimaan dari sektor listrik ini untuk daerah.

e. Perindustrian

Capaian Indikator kinerja Urusan Perindustrian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dituangkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2019

NO	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	25,49	25,46	26,11	26,10	24,69
	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	6,2	4,82	N/A	N/A	
	Pertumbuhan Industri (unit)	43	17	N/A	N/A	
	Cakupan bina kelompok pengrajin (Kelompok)	19	0	N/A	N/A	

Sumber : Kotawaringin dalam angka 2019

Sebagaimana disampaikan di atas, pada skala makro pembangunan perekonomian daerah pada sektor industri pengolahan mempunyai Indikator yaitu Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan dimana dari target pertumbuhan yang ditetapkan pada 2018 sebesar 5,80% dan terealisasi 6,81%. Adapun untuk realisasi PDRB pada sektor industri pengolahan Tahun 2019 masih menunggu rilis data resmi dari BPS.

Peningkatan pertumbuhan yang terjadi salah satunya disebabkan karena meningkatnya produksi hasil perkebunan kelapa sawit. Hal ini tidak lepas dari peningkatan produksi hasil industri turunan kelapa sawit, khususnya CPO. Permintaan pasar dan didukung dengan harga yang cukup tinggi mampu mendorong peningkatan produksi industri CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat.

f. Perdagangan

Capaian kinerja urusan perdagangan pada tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	12,59	12,67	12,54	12,53	13,79
	Ekspor Bersih Perdagangan (\$)	186.428.669	120.298.709	269.470.000	253.957.273	
	Cakupan bina kelompok Pedagang/ usaha informal	-	-	-	-	

Sumber : Kotawaringin dalam angka 2019



Capaian kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Pada tahun 2016 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Nilai ekspor bersih perdagangan dari tahun 2014 ke 2015 mengalami peningkatan dan di tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan.

g. Transmigrasi

Capaian kinerja urusan Transmigrasi berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2014-2017

NO	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Jenis sarana dan prasarana yang dibangun di wilayah transmigrasi	Pengadaan tanah kuburan di UPT kumai seberang, Penimbunan badan jalan dan Pembuatan siring batu	Pengadaan Tanah kuburan di UPT kumai Seberang (0,5 ha), Penimbunan badan jalan (700 m) dan Pembuatan siring batu (220 m ³)	Terbangunnya sarana dan prasarana UPT.Kumai Seberang (kegiatan Pembangunan tidak terlaksana dikarenakan pada anggaran perubahan, anggaran tidak bisa dilaksanakan karena rasionalisasi, berfokus untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi perihal pembinaan Eks transmigrasi dan identifikasi calon kawasan transmigrasi baru)		Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

Sumber : LKPJ 201

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Beberapa perspektif tentang daya saing yang mencakup wilayah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Daya saing tempat (lokalitas dan daerah) merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal (setempat) untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi warga/penduduknya.
2. Daya saing daerah berkaitan dengan kemampuan menarik investasi asing (eksternal) dan menentukan peran produktifnya.



3. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Beberapa indikator untuk mengukur daya saing adalah:

- a) Indikator makroekonomi, di mana indikator daya saing dilihat dari beberapa aspek seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca antara ekspor dan impor.
- b) Indikator kualitas infrastruktur. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan sektor infrastruktur, sektor ini diketahui telah mengalami peningkatan dari semula dari peringkat 96 menjadi peringkat 90.
- c) Indikator kesehatan dan pendidikan dasar yang meningkat dari peringkat 82 menjadi peringkat 62. Menurut laporan Program (Millenium Development Goals/MDG's), pada 2010 bidang kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama dalam masalah gizi buruk, kematian ibu sewaktu melahirkan, dan penyakit HIV AIDS.

Secara umum, daya saing dapat dilihat dari posisi dibandingkan dengan daerah lain. Salah satu penilaian yang dilakukan dan dijadikan parameter umum keunggulan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah analisis tipologi klassen. Analisis tersebut membagi daerah dalam empat kuadran wilayah, yaitu:

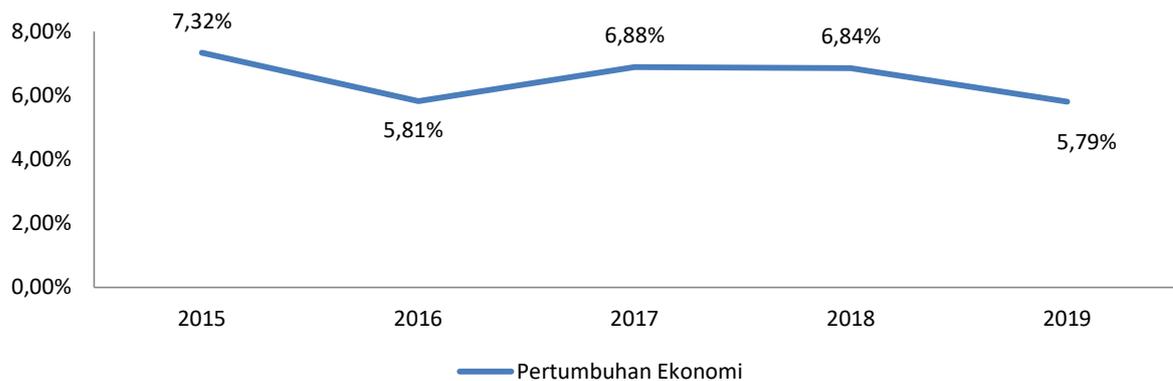
- Kuadran 1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota.
- Kuadran 2. Daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota.
- Kuadran 3. Daerah Maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.
- Kuadran 4. Daerah relatif tertinggal yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014-2015 meningkat dari 6,91% menjadi 7,32%. Namun pada tahun 2015 - 2016 terjadi penurunan dari 7,32% menjadi 5,81% dan pada tahun 2017 naik menjadi 6,88%, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 5,79%.





Gambar 2.18
Grafik Pertumbuhan Ekonomi

2.3.1.2. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

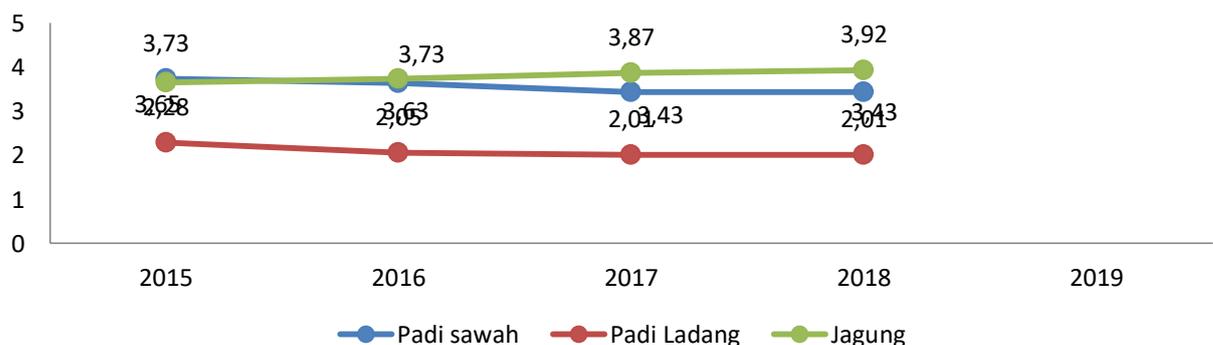
Salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022, yaitu “Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup”, menyiratkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan adanya upaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan kemandirian ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian.

Pada tahun 2016 Sektor Pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebesar 24,13%, meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.57
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

Lapangan Usaha	Capaian kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi sektor Pertanian, terhadap PDRB (%)	24,36	25,89	26	24,88	23,90

Sumber : Kotawaringin dalam angka 2019



Gambar 2.19
Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian produktivitas tanaman pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 produktivitas tanaman padi sawah mencapai 3,42 Ton/Ha naik menjadi 3,43 Ton/Ha pada tahun 2018. Tanaman padi ladang ada kecerungan mengalami penurunan produktivitas dari 2,18 Ton/Ha pada tahun 2014, menjadi 2,01 Ton/Ha pada tahun 2018. Sedangkan Capaian produktivitas tanaman jagung pada tahun 2014 yaitu 3,75 Ton/Ha, lalu mengalami peningkatan hingga 3,92 Ton/Ha pada tahun 2018.

2.3.1.3. Perikanan dan Kelautan

Produksi Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami fluktuatif dimana terjadi peningkatan dan penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 106,71 pada tahun 2016. Namun mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu menjadi 100. Pada indikator cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Kondisi yang sama juga terjadi pada Produksi Perikanan Kelompok dimana pada tahun 2014 menunjukkan capaian tertinggi sebesar 18,57% dan pada tahun 2017 capaiannya mengalami penurunan menjadi 23,8%. Potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Luas Areal Penangkapan ikan di perairan umum yang mencapai 135.00 Ha, Potensi Perikanan Lestari 50%/tahun: (48.120 ton/th); dengan rincian Perairan Umum 5.400 ton/th dan Perairan laut 42.720 ton/th, dan Lahan pertambakan udang sebesar 766 Ha.

2.3.1.4. Industri

Capaian persentase tingkat pertumbuhan IKM Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami penurunan, pada tahun 2017 mencapai 7,80%, menurun pada tahun 2018 menjadi -5,54% dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2019. Persentase peningkatan nilai tambah sektor IKM mengalami peningkatan secara drastis dari tahun 2017 sebesar 8,10% pada tahun 2018 menjadi 32% dan naik 3,35 % di tahun 2019.

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Target di RPJMD Tahun 2014-2017

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi								
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	15,35	25,53	15,5	25,46	26,11	26,26		25,55		24,69
	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	1,4	6,2	7	4,82						
	Pertumbuhan Industri (unit)	2,19	43	2,23	17						
	Cakupan bina kelompok pengrajin (Klpk)	12	19	3	0						

Sumber: Kotawaringin dalam angka 2019



Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Berdasarkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Beserta Target di RPJMD Tahun 2017-2018

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase tingkat pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	8%	7,80%	10%	-5,54%	12%	5,49%
2	Persentase peningkatan nilai tambah sektor IKM	6%	8,10%	8%	32%	10%	35,35%

Sumber : LKPJ 2018

2.3.1.5. Pariwisata

Keberhasilan sector pariwisata diukur dengan jumlah wisatawan dan kontribusi sector pariwisata terhadap perekonomian wilayah.



Gambar 2.20
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat

2.3.1.6. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani mencerminkan kemampuan petani. Angka NTP di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.60
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014-2018

No	uraian	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Tukar Petani	97,74	98,81	99,16	95,02

Sumber : LKPJ 2018

2.3.1.7. Angka Konsumsi RT Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif

bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel . 2.61
Konsumsi Masyarakat Per Kapita

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
	Pengeluaran RT rata-rata (pangan)	5.782,26	7.311,375	5.1140,29	6 466,62
	Pengeluaran RT rata-rata (non pangan)	6.196,74	7.238,63	105.826,5	
	Total Pengeluaran RT	11.979,00	14.550,00	156.966,8	
	Jumlah RT	72.886	75.133	77.395	
	Rasio (1/2)	93,31%	101,01%		

Sumber : Kotawaringin barat dalam angka 2019

2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.3.2.1. Perhubungan

Tabel 2.62
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Statusnya Tahun 2014-2018

Klasifikasi Jalan	2015		2016		2017		2018		2019	
	Panjang (Km)	%								
Jalan Nasional	156,96	6,36	156,96	6,36	156,96	6,36	156,96	6,36	156,96	6,36
Jalan Provinsi	55,4	2,24	55,4	2,24	55,4	2,24	55,4	2,24	55,4	2,24
Jalan Kabupaten	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51
Jalan Desa	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89
Total	2469,75	100								

Sumber : LKPJ 2018,2019

Panjang Jalan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2015 hingga 2019 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan . rasio jalan kabupaten masih mendominasi panjang jalan di Kabupaten Kotawaringin barat

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018

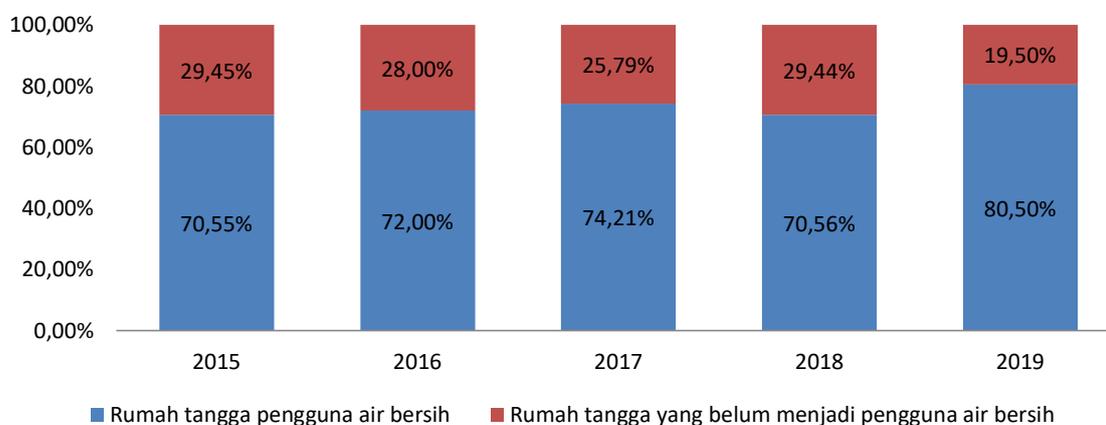
No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pelabuhan Laut	3	3	3	2	3
3	Jumlah Terminal	4	4	3	1	3
4	Jumlah Halte	12	12	11	12	13
5	Jumlah Jaringan Trayek AKDP	3	3	4	8	4



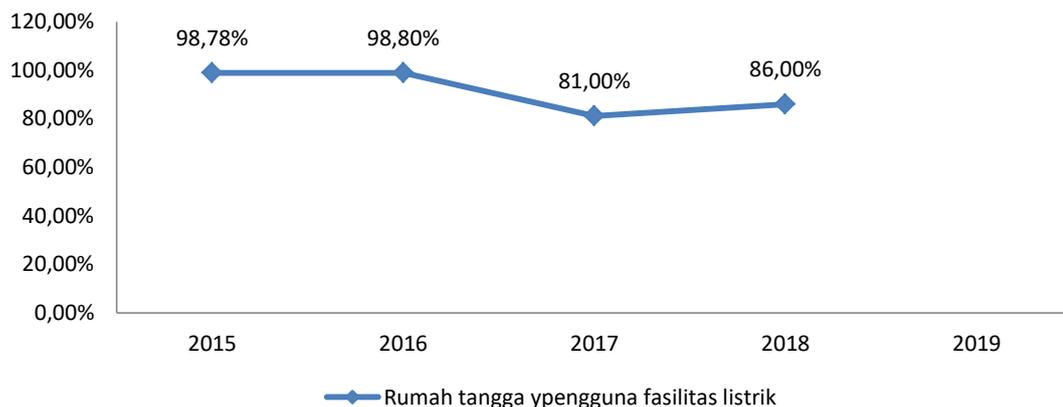
No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
6	Jumlah Jaringan Trayek Perdesaaan	9	9	7	5	
7	Jumlah Dermaga LLASDP	19	22	4	13	13
8	Jumlah Trayek LLASDP	4	4	4	1	4

Sumber : LKPJ 2019

2.3.2.2. Air Bersih dan Listrik



Gambar 2.21 Grafik Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 2.22 Grafik Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang sesuai dengan standar hidup masyarakat diperlukan indikator-indikator kinerja yang mampu mendukung sasaran pembangunan tersebut. Presentase rumah tangga pengguna air minum bersih merupakan salah satu indikatornya. Tahun 2014-2018 presentase rumah tangga pengguna air minum bersih Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada angka 70 - C dengan target pada RPJMD di angka 90. Secara interpretasi pencapaian tersebut masih jauh dan yang ditetapkan di RPJMD. Sementara untuk indikator persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dari 98,12 menjadi

98,78 dan berhasil melampaui target pada RPJMD di angka 80. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendapatkan akses listrik.

Tabel 2.64
Rasio Ketersediaan Daya Listrik

No	Uraian	2018	2019
1	Jumlah Pelanggan (RT)	70.735	76.103
2	Daya Tersambung (Kva)	103.718.220	119.570.000
3	Rasio Elektrifikasi	80,79	

Sumber : Kotawaringin dalam angka 2019

2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk kesuatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemudahan perijinan, keamanan dan ketertiban daerah.

2.3.3.1 Kriminalitas

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013, pada tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat naiknya jumlah demo. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan tantangan berat bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, karena menyangkut beberapa peraturan baik di pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundangundangan daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Berikut tabel kondisi iklim investasi Kabupaten Kotawaringin Barat :

Tabel 2.65
Jumlah dan Jenis Perda Yang Mendukung Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah				
	-Pajak Daerah	11	11	11	11
	-Retribusi	-	19	19	17
2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	11	11	11	11

Sumber : LKPJ 2018

Tabel .266
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Bank Umum (Pemerintah dan Swasta)	11	13	12	12
	BPR	3	3	3	3
	Jumlah	14	16	15	15

Sumber : LKPJ 2018



Tabel 2.67
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran dan Penginapan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Jenis dan jumlah Restoran		163		
	Restoran				4
	Rumah Makan				31
2	Jenis dan Jumlah Hotel	30	30	33	33
3	Hotel Berbintang	3	3	3	3
4	Hotel Melati	27	27	30	30

Sumber : LKPJ 2018

2.3.3.2. Perkembangan Investasi

Tabel .2.68
Perkembangan Ivestasi

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
	PMDN (Rp)	714.448.540.000	3.710.499.700.000	265.396.300.000	8.739.363.200.000	11.860.597.625.364
	PMA(\$)	455.203,99	1.996.616,40	4.489.380,00		6.078.333

Sumber : LKPJ 2018

2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.3.4.1 Ketenagakerjaan

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

Jenis Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan kerja	145.749	156.605	145.749	148.404	162.602
Bekerja	141.011	150.689	141.011	145.191	157.700
Pengangguran	4.738	4.916	4.738	3.213	4.902
Bukan angkatan kerja	56.796	54.112	56.796	68.425	62.358
Sekolah	18.135	18.981	18.135	19.642	13.310
Mengurus Rumah	33.405	29.336	37.949	44.573	44.370
Lainnya	5.256	5.765	3.992	4.210	4.678
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,96%	74,19%	71,96%	68,44%	72,28

Sumber : LKPJ 2018, 2019

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 sebanyak 224.960 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 72,28% merupakan angkatan kerja, sedangkan 27,72% bukan merupakan angkatan kerja. Dari 162.602 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan kerja, terdapat pengangguran sebanyak 4.902 orang . Angka Pengangguran pada tahun 2019 sebesar 1,98% sudah berada dibawah target RPJMD 2019 yang sebesar 2,82%.

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan



mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dimulai dari tahun 2014 sebesar 70,05%, tahun 2015 sebesar 71,96%, tahun 2016 sebesar 74,19%, tahun 2017 sebesar 71,96%, tahun 2018 sebesar 68,44% kemudian untuk tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 72,28%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun), semakin banyak jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dan menganggur), maka akan besar pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), hal yang sama juga berlaku untuk sebaliknya.

2.3.4.2. Rasio Ketergantungan

Tabel .2.70
Rasio ketergantungan

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	76.705	77.951	79.213	62.937	63.001
2	Jumlah Penduduk Usia >64 tahun	7.535	7.952	8.417	9.677	11.132
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1 dan 2)	84.240	85.903	87.630	72.614	74.133
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	193.901	200.811	207.719	176.177	179.748
5	Rasio Ketergantungan (3/4)	43,44%	42,78%	42,18%	41,21%	41,24%

Sumber : Kotawaringin barat dalam angka 2019

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka rasio ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 41,24% pada tahun 2019.

2.3.4.3. Rasio Lulusan

Tabel 2.71
Rasio Lulusan

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah lulusan S1	6.741	7.451	7.905	8.583
2	Jumlah lulusan S2	212	249	277	312
3	Jumlah lulusan S3	2	3	5	11
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	6.955	7.703	8.187	8.906
5	Jumlah Penduduk *)	278.141	286.714	295.349	250.041
	Rasio lulusan S1/S2/S3	250,05	268,66	33,20	35,61

Sumber : LKPJ 2018



2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun berjalan dan Realisasai RPJMD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD, maka urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

- A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1. Pendidikan
 - 2. Kesehatan
 - 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan
 - 6. Sosial
- B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1. Tenaga Kerja
 - 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3. Pangan
 - 4. Pertanahan
 - 5. Lingkungan Hidup
 - 6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 9. Perhubungan
 - 10. Komunikasi dan Informatika
 - 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 12. Penanaman Modal
 - 13. Kepemudaan dan Olahraga
 - 14. Statistik
 - 15. Persandian
 - 16. Kebudayaan
 - 17. Perpustakaan
 - 18. Kearsipan.
- C. Urusan Pilihan, meliputi:
 - 1. Kelautan dan Perikanan
 - 2. Pariwisata
 - 3. Pertanian
 - 4. Kehutanan
 - 5. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 6. Perdagangan
 - 7. Perindustrian



8. Transmigrasi.

Belanja Langsung (BL) dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai urusan yang tertuang dalam program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 820.445.621.000,00realisasi Rp. 716.449.175.187,61 atau sebesar 87,32 %. Selengkapnya, berkenaan dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.4.1. Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan urusan pendidikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini. Program Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung, Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah meningkatkan akses pelayanan pendidikan bidang PAUD. Pagu tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 450.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 447.913.592,00 atau 99,51%.
- 2) Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses pelayanan pendidikan bidang PAUD melalui penambahan ruang kelas untuk peningkatan kapasitas daya tampung. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 465.439.000,00 dan terealisasi Rp. 465.095.000,00 atau 99,93%.
- 3) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary ; Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan pendidikan bidang PAUD melalui Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary untuk peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 225.500.000,00 dan terealisasi Rp. 222.853.000,00 atau 98,83%.
- 4) Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bidang PAUD. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 320.000.000,00 dan terealisasi Rp. 199.664.720,00 atau 62,40%. Dikarenakan ada salah satu kegiatan pengadaan alat peraga edukatif yang tidak terealisasi karena keterlambatan lelang E-Katalaog oleh pemerintah pusat sesuai Juknis DAK Fisik TA. 2019, sedangkan batas waktu penginputan usulan tersebut pada tanggal 22 Juli 2019.
- 5) Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah ; Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bidang PAUD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 262.437.500,00 dan terealisasi Rp. 260.299.900,00 atau 99,19%.



- 6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas akse pelayanan pendidikan bidang PAUD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 280.112.500,00 dan terealisasi Rp. 278.763.833,04,00 atau 99,52%.
- 7) Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik ; Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bidang PAUD. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 55.075.000,00 dan terealisasi Rp. 34.290.000,00 atau 62,26%. Target kegiatan telah mencapai 100% tetapi serapan anggaran 62,26 % dikarenakan efesiensi dari penggunaan anggaran.
- 8) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini; Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bidang PAUD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 47.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.620.427,00 atau 93,30%.
- 9) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini; Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bidang PAUD melalui kegiatan publikasi dan sosialisasi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 137.765000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 131.145.000,00 atau 95,19%.
- 10) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang PAUD Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara PAUD Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bidang PAUD. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 379.205.000,00 dan terealisasi Rp. 366.124.214,00 atau 96,55%.
- 11) Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bidang PAUD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 88.800.000,00 dan terealisasi Rp. 86.610.000,00 atau 97,53%.
- 12) Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Jenjang PAUD ;Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bidang PAUD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.792.552,00 atau 86,89%.
- 13) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bidang PAUD. kegiatan telah dilaksanakan 100%. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 123.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96.666.000,00 atau 78,21%, dikarenakan efesiensi anggaran.

b. Program Pendidikan Sekolah Dasar

Tujuan program ini adalah meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar.

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah; Tujuan Kegiatan ini adalah meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar. Pagu Rp.3.006.560.800,- terealisasi Rp.3.000.473.200,- atau 99,80%.



- 2) Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.600.000.000,- terealisasi sebesar Rp.596.277.000,- atau 99,38%.
- 3) Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar melalui penambahan ruang kelas untuk peningkatan kapasitas daya tampung. Pagu Rp.3.119.765.000,- terealisasi sebesar Rp.2.839.911.600,- atau 99,03%.
- 4) Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar melalui pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir untuk peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan. Pagu Rp.1.464.155.000,- terealisasi sebesar Rp.1.459.771.400,- atau 99,70%.
- 5) Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.918.440.000,- terealisasi sebesar Rp.900.440.000,- atau 98,04%.
- 6) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.99.697.500,- terealisasi sebesar Rp.99.121.000,- atau 99,42%.
- 7) Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.096.460.000,- atau 99,68%.
- 8) Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.210.000.000,- terealisasi Rp.200.400.000,- atau 95,43%.
- 9) Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.733.299.000,- terealisasi Rp.731.359.000,- atau 99,74%.
- 10) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.733.299.000,- terealisasi Rp.731.359.000,- atau 99,74%.
- 11) Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir . Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.733.299.000,- terealisasi Rp. 731.359.000,- atau 99,74%.



- 12) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar. Pagu Rp.14.678.271.000,- terealisasi sebesar Rp.13.690.462.124,- atau 93,27%.
- 13) Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar melalui pengembangan minat, bakat dan kreativitas siswa. Pagu Rp.421.940.000,- terealisasi sebesar Rp.353.696.500,- atau 83,83%.
- 14) Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar. Pagu Rp.37.100.000,- terealisasi sebesar Rp.28.545.000,- atau 76,94%.
- 15) Kegiatan Penyediaan Beasiswa Berprestasi. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.200.000.000,- terealisasi Rp.199.835.000,- atau 99,92%.
- 16) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.484.988.000,- terealisasi sebesar Rp. 458.774.825,- atau 94,60%.

c. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Tujuan program ini adalah meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah ; Tujuan Kegiatan ini adalah meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pagu Rp.1.219.182.500,- terealisasi Rp.1.218.282.000,- atau 99,93%.
- 2) Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pagu Rp.885.400.000,- terealisasi Rp.884.862.000,- atau 99,94%.
- 3) Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui penambahan ruang kelas untuk peningkatan kapasitas daya tampung. Pagu Rp.1.689.635.500,- terealisasi Rp.1.689.051.000,- atau 99,97%.
- 4) Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir ; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir untuk peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan. Pagu Rp.299.620.000,- dan terealisasi Rp.298.654.000,- atau 99,68%.
- 5) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi ; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah

- Menengah Pertama dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.228.935.000,- terealisasi Rp.228.034.100,- atau 99,61%.
- 6) Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Untuk Siswa Tidak Mampu Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pagu Rp.601.150.000,- terealisasi sebesar Rp.596.975.000,- atau 99,31%.
 - 7) Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa ; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.90.000.000,- terealisasi Rp.89.600.000,- atau 99,56%.
 - 8) Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.892.500.000,- terealisasi Rp.717.445.375,- atau 80,39%.
 - 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah ; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.351.897.500,- terealisasi Rp.350.874.000,- atau 99,71%.
 - 10) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.182.440.000,- terealisasi Rp.1.182.257.000,- atau 99,98%.
 - 11) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pagu Rp.14.678.271.000,- terealisasi Rp.13.690.462.124,- atau 93,27%.
 - 12) Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui pengembangan minat, bakat dan kreativitas siswa. Pagu Rp.378.695.000,- terealisasi Rp.241.774.654,- atau 63,84.
 - 13) Kegiatan Penyediaan Beasiswa Berprestasi ; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.199.835.000,- atau 99,92%.
 - 14) Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.1.465.560.000,- terealisasi Rp.1.465.228.000,- atau 99,98%.

- 15) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pagu Rp.617.230.000,- terealisasi Rp.562.361.500,- atau 91,11%.

d. Program Pendidikan Non Formal

Tujuan program ini adalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat

- 1) Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan non formal. Pagu Rp.133.200.000,- terealisasi sebesar Rp.132.950.000,- atau 99,81%.
- 2) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan non formal melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal. Pagu Rp.302.840.000,- terealisasi sebesar Rp.302.785.000,- atau 99,98%.
- 3) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses pelayanan pendidikan non formal melalui publikasi dan sosialisasi tentang pendidikan non formal. Pagu Rp.114.550.000,- terealisasi Rp.95.350.000,- atau 83,24%.

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

- 1) Kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik; Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pelaksanaan sertifikasi pendidik. Pagu Rp.39.900.000,- terealisasi Rp.38.206.636,- atau 95,76%.
- 2) Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG); Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG). Pagu Rp.168.235.000,- terealisasi sebesar Rp.155.560.000,- atau 92,47%.
- 3) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tujuan sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pagu Rp.212.400.000,- terealisasi Rp.177.022.000,- atau 83,84%.
- 4) Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.924 285 000,- terealisasi sebesar Rp.1.641.437.800,- atau 85,34%.
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ; Tujuan sub kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pagu Rp. Rp.30.600.000,- terealisasi Rp.28.700.000,- atau 93,79%.

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan



Tujuan program ini adalah menciptakan perencanaan pendidikan yang merata, berkualitas, relevan, dan akuntabel.

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Pagu anggaran Rp.168.180.000,- terealisasi sebesar Rp.129.635.000,- atau 77,08%.
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan. Pagu anggaran Rp.154.640.000,- terealisasi sebesar Rp.139.053.600,- atau 89,92%.
- 3) Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan; Pagu anggaran Rp.61.100.000,- terealisasi Rp.54.670.000,- atau 89,48%.
- 4) Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Pagu anggaran Rp.86.906.260,- terealisasi sebesar Rp.74.800.000,- atau 86,07%.

Tabel 2.72
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019

No.	Indikator RPJMD	Satuan	Capaian		2019	
			2017	2018	Target	Realisasi
1	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,28	12,69	12,46	12,69
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,05	8,35	8,27	8,35
	Indikator Renstra					
3	Angka Partisipasi Kasar					
	a. PAUD	%	38,04	38,04	38,70	35,25
	b. SD/Paket A	%	95,02	96,19	98,00	95,67
	c. SMP/Paket B	%	80,68	81,21	82,18	81,35
4	Angka Partisipasi Murni					
	a. SD/Paket A	%	80,74	88,24	81,90	88,17
	b. SMP/Paket B	%	56,90	66,04	61,11	65,64
5	Angka Kelulusan					
	a. SD/Paket A	%	100	100	99,01	100
	b. SMP/Paket B	%	98,65	98,65	99,40	100
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	%	99,75	99,75	99,82	89,54
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	%	98,65	98,65	99,22	100
8	Angka Putus Sekolah					
	a. SD	%	0,26	0,02	0,12	0,17
	b. SMP	%	0,37	0,013	0,44	0,19
9	Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	33,22	33,22	39,54	30,00
10	Persentase Pendidik SD Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	100	100	90,38	93,50
11	Persentase Pendidik SMP Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	100	100	97,24	97,22
12	Persentase Pendidik PAUD Bersertifikat Profesi	%	6,38	6,38	9,00	7,18
13	Persentase Pendidik SD Bersertifikat Profesi	%	51,22	51,22	64,00	45,04
14	Persentase Pendidik SMP Bersertifikat Profesi	%	45,14	45,14	54,10	45,44

Sumber : Disdikbud, 2019

*Keterangan : Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah sumber BPS Kotawaringin Barat



2.4.2. Urusan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah:

a. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi jumlah, mutu dan penyebarannya, efektifitas dan efisiensi penggunaan biaya kesehatan dalam meningkatkan ketersediaan sarana prasarana, peralatan kesehatan, dan dukungan obat dan perbekalan kesehatan yang semakin merata terjangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Program ini memiliki 20 (dua puluh) kegiatan di dalamnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.261.558.980,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 39.666.248.816,12 atau 87,64% dan realisasi fisik 91,24%.

- 1) Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya jenis, jumlah obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan PKD (Pelayanan Kesehatan Dasar) di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.334.475.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 5.692.827.214,30 atau 89,87%, realisasi fisik sebesar 91,99%.
- 2) Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan ; Kegiatan ini bertujuan agar pengelolaan distribusi obat dan bahan medis habis pakai merata, tepat waktu, dan sesuai sasaran serta mutu tetap terjamin sesuai standar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 309.906.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 275.274.765,00 atau 88,83%, realisasi fisik sebesar 95,36%.
- 3) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Penyimpanan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan ini bertujuan agar terkontrolnya penyimpanan Obat dan bahan medis habis pakai sesuai standar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100%, realisasi fisik sebesar 100%.
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya ; Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas yang dibangun dan dipelihara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.247.344.399,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.3.191.786.318,00 atau 98,29%, realisasi fisik sebesar 100%.
- 5) Pembangunan Puskesmas Pembantu ; Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis pedesaan/berbasis desa secara menyeluruh di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.331.573.498,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.1.313.891.500,00 atau 98,67%, realisasi fisik sebesar 100%.



- 6) Pembangunan Puskesmas; Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas dan jaringannya, melalui terselenggaranya survei, monitoring pembangunan dan pengawasan pembangunan sarana prasarana ke puskesmas di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.967.280.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.903.965.324,00 atau 96,78%, realisasi fisik sebesar 100%.
- 7) Pengadaan Ambulan/Pusling Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin proses rujukan sesuai standar serta terlaksananya akses pelayanan kesehatan yang merata dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%, realisasi fisik sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena pengadaan kendaraan puskesmas keliling single gardan sesuai dengan Rencana Kegiatan/Berita Acara desk DAK TA 2019 metode pengadaannya menggunakan e-katalog sehingga untuk proses selanjutnya harus menunggu produk tersebut tayang di ekatalog, untuk merubah Rencana Kegiatan/Berita Acara des DAK harus melalui mekanisme khusus yang dijadwalkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2019. Pada bulan juni memperoleh informasi bahwa kendaraan roda 4 (empat) puskesmas keliling baik single gardan maupun double gardan tidak tayang di ekatalog. Setelah dilakukan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan, pengadaan kendaraan puskesmas keliling diperbolehkan mengganti metode pengadaan dengan metode tender cepat. Hasil metode tender cepat tahap 1 (satu) tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran harga sehingga pekerjaan barang jasa tersebut dinyatakan gagal. Sampai dengan batas waktu kontrak tanggal 22 juli 2019 proses lelang tetap dinyatakan gagal sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dibiayai dengan dana DAK.
- 8) Perbaikan Ambulan/Pusling Kegiatan ini bertujuan agar proses rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit terlaksana dengan baik dengan menggunakan sarana kendaraan yang standar sehingga dapat menjamin penanganan yang optimal kepada pasien yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 100%, realisasi fisik sebesar 100%.
- 9) Pengadaan Meubeler Puskesmas dan Jaringannya Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya dengan sarana prasarana yang memadai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.99.957.000,00 atau 99,96%, realisasi fisik sebesar 100%.
- 10) Pemantauan, Evaluasi, Bimbingan Teknis Sarana Prasarana Kesehatan Swasta Kegiatan ini bertujuan agar fasilitas kesehatan swasta di kabupaten Kotawaringin Barat mampu memberikan pelayanan sesuai standart sesuai



ketentuan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 27.392.300,00 atau 94,46%, realisasi fisik sebesar 100%.

- 11) Pembangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses pelayanan Rumah Sakit yang terjangkau oleh masyarakat daerah terpencil yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang prima dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.300.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.2.244.499.000,00 atau 97,59%, realisasi fisik sebesar 100%.
- 12) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.535.419.083,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 12.579.867.600,00 atau 80,98%, realisasi fisik sebesar 86,61%.
- 13) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Kegiatan ini bertujuan agar konsumen atau masyarakat khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat terlindungi dari bahan pangan berbahaya. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 129.530.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 118.646.997,00 atau 91,60%, realisasi fisik sebesar 100%.
- 14) Pemeliharaan Alat Kesehatan Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya pemeliharaan peralatan kesehatan sesuai persyaratan mutu, tercapainya kondisi peralatan kesehatan yang selalu dalam kondisi layak pakai dan dapat berfungsi dengan baik. Pagu anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 101.570.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 69.679.436,00 atau 68,60%, realisasi fisik sebesar 90%. Rendahnya realisasi keuangan terjadi karena kesalahan rekening belanja untuk perbaikan kulkas vaksin sebesar Rp. 3.000.000,00 dan perbaikan dental unit sebesar Rp. 22.574.000,00.
- 15) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.729.953.500,00 sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp.1.370.106.131,20 atau 79,20%, realisasi fisik sebesar 84,17%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena ada paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan alat promosi kesehatan. Hal ini terjadi karena metode pengadaan yang tidak sesuai sedangkan untuk dilakukan perubahan metode pengadaan sudah tidak dimungkinkan. Selain itu, harga satuan barang yang tercantum didalam dokumen belanja tidak sesuai dengan



harga pasar. Efisiensi juga terjadi pada paket pengadaan alat kesehatan di puskesmas.

- 16) Pengadaan Alat Kesehatan Pustu/Polindes Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan di Pustu/Polindes dengan pagu anggaran sebesar Rp.107.250.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 90.697.000,00 atau 84,57%, realisasi fisik sebesar 82,14%.
- 17) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan guna mengoptimalkan pelaksanaan program yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.049.876.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.9.772.788.289,00 atau 97,24%, realisasi fisik sebesar 99,94%.
- 18) Pembinaan Tenaga Kesehatan Kegiatan ini bertujuan agar tercapainya pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 33.675.400,00 atau 67,35%, realisasi fisik sebesar 76,33%. Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan menghindari duplikasi karena perjalanan dinas luar kota dalam daerah dilaksanakan lintas program dengan biaya dari kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan sehingga anggaran pada kegiatan ini tidak terserap. Selain itu, honor tim penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan tidak bisa diserap karena dasar pembayaran SK Bupati yang harus di revisi, sedangkan proses revisi SK tersebut tidak sempat dilaksanakan.
- 19) Pengembangan Mutu Tenaga Kesehatan Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan mutu tenaga kesehatan agar memenuhi standar akreditasi puskesmas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di puskesmas dan jaringannya. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 490.181.500,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 433.457.258,00 atau 88,43%, realisasi fisik sebesar 95,06%.
- 20) Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana dan Peralatan Laboratorium Kesehatan Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana laboratorium daerah agar tercapainya kapasitas standart laboratorium kesehatan daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 383.200.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 382.737.283,62 atau 99,88%, realisasi fisik sebesar 100%.

b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program ini bertujuan mencegah serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit. Program ini memiliki 6 (enam) kegiatan didalamnya dengan pagu anggaran Rp.1.464.635.500,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.392.447.519,00 atau 95,07%, realisasi fisik sebesar 97,87 %.



- 1) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan program penyakit menular langsung, meningkatkan kemitraan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat tentang bahaya penyakit menular sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular di lingkungan masyarakat. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 616.490.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 604.777.059,00 atau 98,10%, realisasi fisik sebesar 99,05%.
- 2) Pelayanan Kesehatan Hipertensi Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas serta terapi farmakologi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 405.106.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 388.453.370,00 atau 95,89%, realisasi fisik sebesar 99,11%.
- 3) Pelayanan Kesehatan DM ; Kegiatan ini bertujuan agar mengurangi atau mencegah terjadinya komplikasi dan memperbaiki harapan hidup dan kualitas hidup pasien dengan pagu anggaran sebesar Rp.81.200.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 81.200.000,00 atau 100%, realisasi fisik sebesar 100%.
- 4) Pelayanan Kesehatan ODGJ Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada ODGJ agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka serta terintegrasi dalam sistem di masyarakat. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 110.250.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 93.463.500,00 atau 84,77%, realisasi fisik sebesar 94,44%.
- 5) Peningkatan Imunisasi ; Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga terwujudnya desa Universal Child Immunization (UCI) di 92 desa/kelurahan. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 193.899.600,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 168.986.083,00 atau 87,15%, realisasi fisik sebesar 92,79%.
- 6) Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat secara menyeluruh serta terlaksananya surveillance epidemiologi KLB, SKD KLB dan penanganan KLB < 24 jam, mitigasi faktor resiko KLB. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 57.689.900,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 55.567.507,00 atau 96,32%, realisasi fisik sebesar 97,09%.



c. Program Peningkatan Mutu dan Akses Layanan

Program ini bertujuan untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program. Program ini memiliki 9 (sembilan) kegiatan didalamnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.889.881.800,00 dan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 22.906.733.793,00 atau 88,48%, realisasi fisik sebesar 95,05%.

- 1) Akreditasi Puskesmas ; Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.497.459.800,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.191.179.155,00 atau 79,55%, realisasi fisik sebesar 97,06%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena ada 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu workshop pemantauan standar dan instrumen dikarenakan kegiatan ini baru bisa dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2019, sehingga mengalami kesulitan dalam mencari narasumber pada kegiatan tersebut.
- 2) Labkesda yang Terakreditasi ; Kegiatan ini bertujuan agar laboratorium kesehatan dapat memenuhi standar sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 425.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 269.100.048,00 atau 63,32%, realisasi fisik telah mencapai 75,74%. Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan karena ada 1 (satu) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu simulasi survey akreditasi dikarekan nilai atau hasil self assesment terakhir setelah bimbingan kedua sudah mencukupi (sudah koordinasi dengan bagian mutu Kementerian Kesehatan atau sesuai dengan arahan dari tim mutu Kementerian Kesehatan).
- 3) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatnya FKTP yang terakreditasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 241.549.800,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.230.485.500,00 atau 95,42%, realisasi fisik sebesar 96,71%.
- 4) Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya standar pelayanan kesehatan dan secara umum dapat melayani seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat secara menyeluruh. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 63.266.800,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.25.266.800,00 atau 39,94%, realisasi fisik sebesar 51,95%. Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan karena perjalanan dinas luar kota dalam daerah untuk pengumpulan data penyusunan profil Dinas Kesehatan Kabupaten dari puskesmas tidak dilakukan secara langsung oleh tim penyusun profil Dinas Kesehatan melainkan data langsung disampaikan oleh puskesmas. Selain itu, anggaran untuk



perjalanan dinas luar kota ke provinsi dan pusat tidak digunakan karena pelaksanaan kegiatan menggunakan dana bantuan dari program lain atau undangan dari provinsi dan pusat.

- 5) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya standar pelayanan kesehatan yang lebih optimal dengan pagu anggaran sebesar Rp.405.259.600,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 394.251.172,00 atau 97,28%, realisasi fisik sebesar 99,05%.
- 6) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Kegiatan ini bertujuan agar penyehat tradisional mendapat pembinaan dan pengawasan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 130.865.500,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 93.777.200,00 atau 71,66%, realisasi fisik sebesar 77,00%. Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan karena terdapat 2 (dua) belanja penggandaan yang belum terlaksana karena resep-resep ramuan toga yang dihimpun khususnya bahan-bahan lokal belum lengkap. Transport panitia dan tim penilai kelompok ASMAN (asuhan mandiri) kesehatan tradisional tingkat kabupaten (12 orang x 3 kelompok) tidak bisa dilaksanakan semua karena waktu penilaian tingkat Kabupaten sudah lewat. Kontribusi pelatihan akupuntur tidak dapat direalisasikan/dilaksanakan karena tenaga medis yang akan diberangkatkan berhalangan dan tidak ada jadwal pelatihan lagi di tahun 2019.
- 7) Penyediaan Alat dan Bahan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya kesehatan promotif preventif yang mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan secara mandiri, serta bisa menjadi alternatif pilihan/pengganti ataupun pelengkap/komplemen dari upaya kuratif atau pengobatan konvensional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.670.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 39.191.000,00 atau 78,90%, realisasi fisik sebesar 85,90%. Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan karena pada perjalanan dinas luar kota belum mendapatkan undangan/pemberitahuan terkait kegiatan yang mempunyai korelasi untuk konsultasi teknis pangan fungsional khususnya terkait dengan kesehatan tradisional.
- 8) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan persentase ketersediaan operasional pelayanan kesehatan rujukan dari desa ke kecamatan sampai rumah sakit daerah sehingga dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu anggaran pada kegiatan kegiatan ini Rp. 2.166.399.800,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.848.358.359,00 atau 85,32%, realisasi fisik sebesar 94,51%.
- 9) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan



preventif di wilayah kerja puskesmas Kabupaten Kotawaringin Barat yang berjumlah 18 puskesmas. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 20.910.410.500,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 18.815.124.559,00 atau 89,98%, realisasi fisik sebesar 95,52%.

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar terwujudnya masyarakat sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Program ini memiliki 7 (tujuh) kegiatan dengan pagu anggaran Rp.1.664.282.900,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.166.175.618,00 atau 70,07%, realisasi fisik sebesar 71,88%.

- 1) Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi serta konsumsi pangan sehingga berdampak pada perbaikan keadaan atau status gizi, terutama status gizi kurang dan status gizi buruk, serta mempertahankan keadaan status gizi baik. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 174.498.200,00 sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp.160.441.409,00 atau 91,94%, realisasi fisik sebesar 96,12%.
- 2) Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan ini bertujuan untuk membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungan serta mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat agar dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang berbasis lingkungan. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.988.356.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 517.683.409,00 atau 52,38%, realisasi fisik sebesar 54,10%. Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan karena gagalnya proses pengadaan IPAL. Hal ini disebabkan oleh upload dokumen perencanaannya pada tanggal 15 Juli 2019 sedangkan draf usulan proses kepada pejabat pengadaan pada tanggal 15 Juli 2019, kemudian dilakukan proses pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan dengan cara mengundang penyedia melalui aplikasi SAKIP yang terdaftar di aplikasi LPSE pengadaan langsung, namun penyedia yang diundang tidak memasukkan penawaran pada jadwal yang telah ditentukan.³
- 3) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat menjadi waspada dan memiliki kesadaran akan kesehatan serta memiliki pengetahuan tentang kesehatan. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 258.800.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp.257.579.700,00 atau 99,53%, realisasi fisik sebesar 99,97%.



- 4) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar memiliki perilaku hidup bersih dan sehat sehingga masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan secara mandiri. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.46.650.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 38.235.800,00 atau 81,96%, realisasi fisik sebesar 86,05%.
- 5) Pembinaan UKBM ; Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mampu mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan lingkungan yang kondusif melalui pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.51.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 50.550.000,00 atau 99,12%, realisasi fisik sebesar 100%.
- 6) Peningkatan pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan ; Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keterampilan, sikap, dan pengetahuan tenaga promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sehingga tenaga penyuluh/tenaga promosi kesehatan memiliki wawasan yang luas dalam pengembangan media baik media KIE, media cetak lain (multimedia), dan media online di wilayah puskesmas. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 26.255.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 24.700.000,00 atau 94,08%, realisasi fisik sebesar 98,32%.
- 7) Peningkatan Kesehatan masyarakat Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan status kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Karat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 118.723.700,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 116.985.300,00 atau 98,54%, realisasi fisik sebesar 99,53%.

RSUD Sultan Imanuddin

Alokasi anggaran RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2019 sebesar Rp.161.934.772.000,00 dan terealisasi Rp. 132.125.687.588,12,00 atau 81,59% dari rencana anggaran. Realisasi pelaksanaan Program Kegiatan RSUD Sultan Imanuddin ini, masing masing bisa dilihat dalam tabel berikut:

a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan standar system informasi di Rumah Sakit. Dengan adanya sistem informasi yang menyesuaikan kebutuhan rumah sakit sehingga dapat mempermudah kinerja pelayanan rumah sakit. Adapun salah satu tujuan dengan adanya penambahan system informasi yang baru agar SPM yang sudah ditargetkan bisa tercapai. Pagu anggaran untuk kegiatan pada program ini adalah sebesar Rp.150.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 148.170.000,00 atau sebesar 98,78%. Adapun sumber dana dari kegiatan tersebut berasal dari dan APBD. Kegiatan tersebut sudah sesuai dengan target yang sudah direncanakan.



b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang layak dan memadai, yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke rumah sakit, baik itu kunjungan rawat jalan maupun kunjungan rawat inap dan juga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah:

1) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

Kegiatan pembangunan rumah sakit ini berfokus pada pembangunan satu buah gedung instalasi rawat jalan dan rawat inap 3 lantai yaitu pembangunan gedung Hemodialisa. Kegiatan ini bertujuan menyediakan ruang rawat inap yang baik dan mempunyai ruangan yang cukup untuk menampung jumlah pasien yang mau dan akan dirawat di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Selain fokus pada pembangunan Gedung tersebut, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun juga merehab beberapa gedung rawat inap, antara lain rehabilitasi lanjutan gedung VIP, rehabilitasi gedung Instalasi Bedah Sentral, pemasangan teralis jendela, pembuatan taman, pembangunan Pos satpam, rehabilitasi selasar, rehabilitasi gedung bengkirai (kebidanan) dan pemasangan paving halaman IGD. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan di ruangan rawat inap dan rawat jalan itu sendiri. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.635.643.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 36.943.778.175 atau sebesar 98,16%. Realisasi tersebut sudah sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan. Adapun sumber dana dari kegiatan tersebut berasal dana APBD sebesar Rp.4.750.000.000,00 dan dari dana APBN/DAK sebesar Rp.32.885.643.000,00.

2) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis di rumah sakit guna menunjang pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pengadaan alat-alat kedokteran ini juga bertujuan untuk memenuhi kelengkapan alat-alat kesehatan di rumah sakit dikarenakan RSUD Sultan Imanuddin yang sudah menjadi kelas B merupakan salah satu rumah sakit rujukan Regional untuk wilayah barat Kalimantan Tengah. Pagu untuk anggaran alat-alat kesehatan rumah sakit bersumber dari APBD kabupaten sebesar Rp. 815.877.800,00 dan APBN/DAK Rp.8.517.500.000,00 dengan total Rp.9.333.377.800,00. Sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi Rp.9.302.641.083,00 atau sebesar 99,67%.

3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain) Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan alat-alat prasarana rumah sakit dan kebutuhan perlengkapan rumah sakit lainnya. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar



Rp.3.248.855.000,00 dan realisasi keuangannya sebesar Rp.3.238.368.700,00 atau sebesar 99,68%.

2.4.3 Urusan Lingkungan Hidup

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mengendalikan dampak pembuangan sampah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini, maka dilakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut

- 1) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. Maksud kegiatan adalah penyediaan prasarana dan sarana persampahan pada cakupan kelompok pengelolaan persampahan berbasis masyarakat. Sedangkan tujuan kegiatan adalah tersedianya prasarana dan sarana persampahan serta terciptanya kondisi yang bersih dan nyaman. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 4 buah (Pembangunan TPS sampah) sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 7 paket terkait TPS sampah 2 bilik, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah (kendaraan roda 3), kotak sampah volume 240 liter dan 120 liter, dump truck sampah dan dokumen study pengelolaan persampahan, pada tahun anggaran 2019 menerima DAK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa pengadaan dump truck sampah 1 unit, dan kendaraan roda 3. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 8 sub kegiatan dengan nilai pagu anggaran Rp.1.674.310.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.167.863.747,00 atau 69,75%, dari 8 sub kegiatan tersebut, 7 sub kegiatan secara fisik telah terealisasi 100% dan terdapat 1 sub kegiatan yang tidak teralisasi yaitu sub kegiatan pengadaan alat angkut sampah dump truck yang bersumber dari dana DAK. Pengadaan dump truck sampah yang bersumber dari dana DAK (APBN) yang tidak teralisasi dikarenakan produk yang diinginkan belum masuk dalam daftar e-catalog LKPP atau epurchasing (dalam kurun waktu 2019) dan terjadi di seluruh Indonesia. Namun demikian telah diupayakan melalui pelaksanaan lelang cepat akan tetapi tidak ada peminat/pendaftar untuk dump truck sampah yang sesuai spesifikasi juknis dimaksud, sehingga menyebabkan realisasi dibawah 80%.
- 2) Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan. Maksud kegiatan adalah meningkatkan operasi, memelihara prasarana dan sarana persampahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan tujuan kegiatan adalah terpeliharanya prasarana dan sarana persampahan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran Rp.10.613.235.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.452.987.716,00 atau 98.49 %.
- 3) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan. Maksud kegiatan adalah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan persampahan melalui sistem 3R



(reuse, reduce dan recycle). Sedangkan tujuan kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah melalui sistem 3R pada kelompok pengelolaan persampahan berbasis masyarakat. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 300 peserta sosialisasi pengelolaan persampahan di 2 kecamatan (Arut Selatan dan Kumai), sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 150 peserta sosialisasi persampahan di 2 kecamatan (Arut Selatan dan Pangkalan Lada), secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.86.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.80.358.800,00 atau 92,63%. Perbedaan target kegiatan pada renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan di Kecamatan Kumai telah dilaksanakan dan keterbatasan dari ketersediaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup.

- 4) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan. Maksud kegiatan adalah untuk pelaksanaan kebijakan dan peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sedangkan tujuan kegiatan adalah terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di kelompok masyarakat. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 12 kelompok peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan/pendampingan pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 12 kelompok peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan/pendampingan pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran Rp.64.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.995.279,00 atau 79,68%. Adanya penundaan penyerahan Anugerah Piala Adipura sehingga belanja untuk berita/iklan di media tidak terlaksana sehingga capaian kurang dari 80%. Piala Adipura di serahkan pada tahun 2020.
- 5) Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Penanganan B3 dan Limbah B3. Maksud kegiatan adalah pelaksanaan pembinaan B3 dan Limbah B3 pada usaha/kegiatan/industri. Sedangkan tujuan kegiatan adalah terlaksananya pembinaan B3 dan Limbah B3 pada usaha/kegiatan/ industri. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 15 usaha/kegiatan (Usaha/kegiatan yang dilakukan pengendalian/pembinaan pengelolaan B3 dan LB3), sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 10 (sepuluh) usaha/kegiatan (Usaha/kegiatan yang dilakukan pengendalian/ pembinaan pengelolaan B3 dan LB3), secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.24.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.21.300.000,00 atau 88,75%. Perbedaan target kegiatan pada renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran disebabkan oleh jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan izin TPS LB3 hanya sebanyak 10 perusahaan.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup (perairan darat dan laut, tanah dan udara) yang disebabkan oleh makin meningkatnya kegiatan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan. Maksud kegiatan adalah untuk mengetahui kualitas air sungai yang dipantau dengan perbandingan terhadap baku mutu air sungai tersebut. Sedangkan tujuan kegiatan adalah terpantaunya kualitas air sungai dan teridentifikasinya pencemaran air sungai. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 2 kali (semester I dan II) pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan/pengujian kualitas air sungai sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 2 kali (semester I dan II) pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan/pengujian kualitas air sungai. Secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran Rp.110.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 105.387.700,00 atau 95,81%.
- 2) Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan. Maksud kegiatan adalah untuk mengukur kualitas air dalam rangka mengetahui ketaatan pelaku usaha/kegiatan dengan melakukan pengambilan sampel air dan uji sampel air limbah dan air sungai. Sedangkan tujuan kegiatan adalah tersedianya layanan jasa pengujian kualitas air, terlaksananya kegiatan teknis untuk menunjang tugas dan fungsi DLH di dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 5 aktivitas (operasional laboratorium lingkungan) dan 3 paket (bahan laboratorium lingkungan), sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 1 aktivitas (operasional laboratorium lingkungan) dan 2 paket (bahan laboratorium lingkungan), Perbedaan target kegiatan pada renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran disebabkan oleh keterbatasan dari ketersediaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup. Secara fisik kegiatan sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.146.744.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.144.549.629,00 atau 98.50%.

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air. Maksud dari kegiatan ini adalah agar tercipta kelestarian sumber air bawah tanah dan berkurangnya sampah organik serta meningkatnya kesuburan tanah. Tujuannya :



- a. Memelihara keberadaan, sifat dan fungsi, serta keberlanjutan sumber daya air supaya senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai, guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup.
 - b. Pencegahan terhadap bencana banjir.
 - c. Sebagai penanggulangan atau penanganan limbah organik. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 1 kecamatan (Daerah yang dilakukan konservasi sumber daya air), Tahun 2019 lokasi di Kecamatan Arut Selatan, sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 1 kecamatan (Daerah yang dilakukan konservasi sumber daya air) melalui pembuatan biopori, Tahun 2019 lokasi di Kecamatan Arut Selatan, secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.22.413.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.318.500,00 atau 99,58%.
- 2) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan. Maksud kegiatan adalah menjaga potensi dan konservasi sumber daya alam. Sedangkan tujuan kegiatan adalah tersedianya baliho pencegahan kebakaran hutan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat guna meminimalisir terjadinya kebakaran hutan. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 6 buah pengadaan baliho pencegahan kerusakan hutan dan lahan, sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 6 buah, secara fisik sudah terealisasi 87,08%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 12.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.750.000,00 atau 81,25%. Target ada 6 buah baliho dan terlaksana hanya 5 buah baliho karena ada 1 buah kerangka/tiang baliho yang rusak sehingga baliho tidak diadakan.

d.Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatankegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan. Maksud kegiatan adalah memberikan wawasan/ pengetahuan tentang lingkungan kepada masyarakat dalam mewujudkan sinergitas yang baik antara penikmat lingkungan dengan pengelola lingkungan. Sedangkan tujuan kegiatan adalah terciptanya masyarakat yang memiliki pengetahuan dalam hal lingkungan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan komunikasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 2 (dua) kampung organik, lokasi Kecamatan Arut Selatan, sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 2 kampung organik, lokasi Kecamatan Arut Selatan (Kelurahan Mendawai RT. 1 dan RT. 2), secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini

dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 28.728.700,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.728.700,00 atau 100%.

- 2) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan. Maksud kegiatan adalah memberikan layanan berupa data/dokumen tentang lingkungan. Sedangkan tujuan kegiatan adalah tersedianya laporan DIKPLHD dan Laporan IGRK. Dokumen Informasi Kinerja Pedoman Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) wajib disusun setiap tahunnya sebagai salah satu syarat Kabupaten/Kota penerima Piala Nirwasita Tantra. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 22 laporan/data informasi lingkungan hidup (DIKPLHD dan Laporan Inventarisasi GRK), sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 22 laporan (DIKPLHD dan Inventarisasi GRK), secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.48.717.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.46.517.000,00 atau 95,48%.
- 3) Kegiatan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah. Maksud Kegiatan adalah menyediakan data dan informasi terkait kepemilikan dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan tujuan kegiatan adalah tersedianya data kepemilikan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik yang telah memiliki maupun yang belum memiliki dokumen lingkungan. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada koordinasi di 8 kecamatan. Sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran adalah tersusunnya laporan inventarisasi kepemilikan dokumen lingkungan hidup, secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.30.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.550.000,00 atau 85,17%.

e.Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mengetahui kualitas udara perkotaan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri. Maksud kegiatan adalah untuk mengetahui kualitas udara ambien perkotaan. Sedangkan tujuan kegiatan adalah :
- 2) Terpantaunya kualitas udara ambien yang mewakili ruang dan waktu sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 3) Teridentifikasinya pencemaran udara. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 2 kali pengujian kualitas udara perkotaan/udara ambien, sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 2 kali pengujian kualitas udara perkotaan/udara ambien, 2 kali yang dimaksudkan itu 2 semester dalam 1 tahun (pengambilan sample dan uji kualitas udara), secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan nilai pagu anggaran Rp.60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.340.000,00 atau 83,90%.



f. Program Pengendalian Kebakaran Hutan.

Program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan tidak dianggarkan dan tidak dilaksanakan karena program dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh SKPD lain (BPBD).

g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Maksud program adalah meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, sekaligus meningkatkan nilai estetika kota. Sedangkan tujuan program adalah terciptanya keseimbangan antara lingkungan perkotaan, meningkatkan kualitas perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penataan RTH ,Maksud kegiatan adalah meningkatkan kenyamanan dan keindahan kota serta menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang. Sedangkan tujuan kegiatan adalah tertatanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan menunjang pelaksanaan peningkatan fungsi ruang terbuka hijau (RTH). secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 226.725.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.225.688.125,00 atau 99.54%.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan RTH , Maksud kegiatan adalah menjaga keseimbangan dan kelangsungan lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Sedangkan tujuan kegiatan adalah agar terpeliharanya dan terkelolanya taman/bundaran/ruang terbuka hijau, dan terselenggaranya pemeliharaan RTH dalam rangka meningkatkan kebersihan, kenyamanan dan keindahan RTH di perkotaan. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 2 aktivitas dan 2 unit (Operasional dan pemeliharaan RTH), sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 2 aktivitas (aktifitas operasional dan pemeliharaan RTH), secara fisik sudah terealisasi 99,45%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.317.055.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.2.135.136.073,60,00 atau 92,15%.

g. Program Pengawasan Penaatan Pemegang Perizinan Lingkungan Hidup.

Maksud program adalah terpantaunya kegiatan/usaha dalam pengelolaan lingkungan serta mendorong upaya pelaku usaha agar taat dalam pengelolaan lingkungan. Sedangkan tujuan program adalah terpantaunya kegiatan pengelolaan lingkungan dan terciptanya pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilaksanakan sejumlah kegiatan berikut :

- 1) Kegiatan Pengawasan Penaatan Pemegang Perizinan Lingkungan Hidup. Maksud kegiatan adalah terpantaunya kegiatan/usaha dalam pengelolaan lingkungan. Sedangkan tujuan kegiatan adalah terpantaunya kegiatan dalam pengelolaan lingkungan pada pemilik izin lingkungan, baik berupa Amdal/UPL/UKL meliputi : ketaatan terhadap izin pembuangan limbah cair, baku mutu udara, air, tanah dan limbah B3. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 25 pemegang perizinan LH (pelaksanaan pengawasan penaatan pemegang perizinan lingkungan hidup),



sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 15 Pemegang Perizinan LH dan terealisasi 15 Pemegang Perizinan Lingkungan Hidup (Pelaksanaan pengawasan penataan pemegang perizinan lingkungan hidup). Perbedaan target kegiatan pada renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran disebabkan oleh keterbatasan dari ketersediaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup. Secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.52.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.451.541,00 atau 98,55%.

- 2) Kegiatan Pembinaan Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Maksud kegiatan adalah terciptanya pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan. Sedangkan tujuan kegiatan adalah terciptanya ketaatan pelaku usaha untuk pengelolaan lingkungan. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 8 perusahaan (yang dinilai memenuhi standar administrasi dan teknis), sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 8 perusahaan (yang dinilai memenuhi standar administrasi dan teknis) dan terealisasi 12 (dua belas) perusahaan, secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.7.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.230.000,00 atau 68,10%. Kecilnya realisasi kegiatan karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaannya hanya sebagai pendamping tim dari DLH Provinsi Kalimantan Tengah dan KLHK. Perusahaan yang di verifikasi menyesuaikan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut menyebabkan serapan capaian kurang dari 80%.

i. Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang berkualitas dan meningkatkan dukungan masyarakat dalam menangani masalah lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maksud kegiatan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang berkualitas. Sedangkan tujuan kegiatan adalah terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 4 kali (pembinaan dan pelatihan lingkungan hidup) seperti Pembinaan sekolah adiwiyata, sosialisasi adiwiyata sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 1 kali (Pembinaan dan pelatihan lingkungan hidup). Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.150.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 127.343.100,00 atau 84,71%. Perbedaan target kegiatan pada renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran disebabkan oleh keterbatasan dari ketersediaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup.



- 2) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maksud kegiatan adalah meningkatkan dukungan masyarakat dalam menangani masalah lingkungan hidup. Sedangkan tujuan kegiatan adalah terwujudnya dukungan masyarakat dalam meningkatkan efisiensi penanganan masalah lingkungan hidup. Target kegiatan berdasarkan Renstra ada 3 aktivitas yakni Peringatan hari-hari penting lingkungan hidup (Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup Sedunia) dan Lomba-lomba lingkungan hidup, sedangkan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 3 aktivitas, seperti peringatan hari-hari penting lingkungan hidup (Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup Sedunia) dan Lomba-lomba lingkungan hidup, secara fisik sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.181.309.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.179.709.000,00 atau 99,12%.

j. Program Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi dan mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan kasus sengketa lingkungan. Sedangkan tujuan program adalah terselesaikannya permasalahan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan sengketa lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Pengaduan Kasus dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Maksud kegiatan adalah terwujudnya pelayanan kepada masyarakat secara maksimal sehingga bisa memberikan penyelesaian permasalahan atau sengketa lingkungan yang memuaskan. Sedangkan tujuan kegiatan adalah terfasilitasinya pelayanan kepada masyarakat atau perusahaan apabila ada laporan kasus pencemaran kerusakan lingkungan, melalui Pos Pengaduan DLH agar dapat langsung ditindaklanjuti baik secara jalur hukum atau melalui

k. Program Penanaman Pohon pada Lahan di Luar Kawasan.

Maksud program adalah meningkatkan kepedulian dari berbagai pihak akan pentingnya penanaman pohon. Sedangkan tujuan program adalah tersedianya konservasi lahan dan air di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari maksud dan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pada Lahan di luar Kawasan. Maksud kegiatan adalah untuk meningkatkan upaya Penghijauan dan pencegahan erosi pada lahan di luar kawasan. Sedangkan tujuan kegiatan adalah terwujudnya penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Target kegiatan belum ada di Renstra, ini merupakan kegiatan tambahan karena adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memprogramkan (program penanaman pohon pada lahan di luar kawasan), kegiatan bersumber dana SILPA DBR DR. Target dalam dokumen pelaksanaan anggaran ada 6 desa untuk pengadaan bangunan konservasi tanah dan air, realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan dengan pagu



anggaran Rp.779.740.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.775.116.960 atau 99,41%.

Tabel 2.73
Capaian program-program Tahun 2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan kualitas air, udara dan tanah. Cakupan titik pengawasan terhadap penataan di bidang lingkungan (air, udara, tanah) dan pengelolaan limbah	60%	100%
2.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan perlindungan dan konservasi SDA	60%	95,49%
3.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pembuatan kampung organik. Cakupan ketersediaan informasi SDA dan LH	60%	99,83%
4.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan kualitas udara	60%	100%
5.	Program Pengawasan Penuaan Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup	Cakupan pemenuhan penataan terhadap ketentuan perijinan lingkungan	60%	100%
6.	Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan lembaga pendidikan yang meraih adiwiyata. Cakupan wilayah yang telah berperan serta dalam mendukung kesadaran LH	60%	98,06%
7.	Program Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Cakupan terselesaikannya kasus - kasus lingkungan hidup	60%	95,82%

Sumber : LKPJ 2019

2.4.4. Urusan Pekerjaan Umum

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Maksud dari program ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan pembangunan jalan, peningkatan jalan dan pembangunan jembatan serta sarana dan prasarana penunjang jalan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan rasio panjang jalan terbangun terhadap target rencana panjang jalan dengan target rasio sebesar 0,8691 (target pembangunan sepanjang 8 Km pada tahun 2019) telah dilaksanakan sepanjang 9,037 Km sehingga rasio menjadi menjadi 0,8698. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 119.494.645.807,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 119.417.719.221,00 atau 99,93%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

- 1) Pembangunan Jalan Kegiatan pembangunan jalan dilaksanakan untuk membangun jalan dengan perkerasan aspal hotmix maupun pembukaan jalan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sebelumnya belum beraspal sehingga berdampak kepada aktivitas masyarakat. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 10.943.983.316,43,00 dengan capaian realisasi Rp. 10.929.227.098,43,00 atau 99,87%. Target kinerja kegiatan pada tahun 2019 yaitu pembangunan jalan sepanjang 8 Km dan terealisasi Km 9,037 Km atau 112,96% serta perencanaan dan pengawasan target 3 (tiga) dokumen terealisasi 3 (tiga) dokumen. (Panjang jalan Kabupaten yang sebelumnya sepanjang 1.222,845 Km



pada akhir tahun 2019, dilakukan penambahan ruas jalan baru sepanjang 207,888 Km, sehingga total panjang jalan Kabupaten menjadi sepanjang 1.430,733 Km).

- 2) Peningkatan Jalan ; Kegiatan peningkatan jalan dilaksanakan untuk meningkatkan kondisi jalan dengan perkerasan hotmix, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sebelumnya belum mantap menjadi mantap, baik dengan perkerasan kaku, perkerasan lentur maupun kombinasi keduanya. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 93.937.354.329,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 93.900.110.952,00 atau 99,96%. Target kinerja kegiatan ini pada tahun 2019 yang didanai melalui APBD yaitu peningkatan jalan kabupaten sepanjang 17,77 Km terealisasi 19,24 Km atau 108,28%, serta perencanaan dan pengawasan target 22 Dokumen terealisasi 22 Dokumen. Sedangkan dari dukungan dana DAK berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kapasitas jalan sepanjang 9,41 Km.
- 3) Pembangunan Jembatan ; Kegiatan ini dilakukan untuk membangun jembatan yang bertujuan membuka akses antar kecamatan dan desa. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 14.613.308.162,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.588.381.171,00 atau 99,83%.

b. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Maksud dari program ini untuk menambah panjang jalan yang memenuhi kondisi jalan baik dengan target 524,23 Km dan tercapai sepanjang 524,769 Km atau sekitar 100,1%. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.7.324.779.100,00 dan telah terealisasi Rp.7.299.105.866,00 atau 99,64%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

- 1) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan jalan dengan perkerasan hotmix. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sebelumnya telah beraspal sehingga mengembalikan kondisi jalan dalam keadaan baik. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 6.729.349.600,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 6.703.676.366,00 atau 99,62%. Target kegiatan ini pada tahun 2019 adalah melakukan rehabilitasi/pemeliharaan 32 ruas jalan dan terealisasi 33 ruas atau 103,13% serta perencanaan dan pengawasan dengan target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen.
- 2) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan . Kegiatan ini dilakukan untuk pemeliharaan jembatan yang telah dibangun sebagai penghubung antar kecamatan dan antar desa. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 595.429.500,00 dan terealisasi Rp. 595.429.500,00 atau 100%. Pada akhir tahun 2019, jumlah jembatan yang telah di rehabilitasi sebanyak 20 (duapuluh) unit dari target 14 (empat belas) unit jembatan atau terealisasi 142,86% dengan perincian rehab kondisi sedang menjadi kondisi baik sebanyak 5 unit jembatan, kondisi rusak menjadi kondisi baik sebanyak 3 unit, dan melakukan pemeliharaan jembatan guna mempertahankan kondisi tetap dalam kondisi baik sebanyak 12 unit, serta perencanaan dan pengawasan dari target 2 (dua) dokumen terealisasi 2 (dua) dokumen.



c. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan

Maksud dari program ini adalah untuk melaksanakan penyusunan data base jalan dan jembatan guna mendapatkan kondisi jalan dan jembatan terkini. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 197.252.000,00 atau 98,62%.Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi jalan pada akhir tahun 2018.Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 98.626.000,00 atau 98,63%. Target kegiatan ini pada tahun 2019 yaitu 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100% dengan data jalan kabupaten kondisi baik pada tahun 2018 sepanjang 502,786 Km.
- 2) Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jembatan Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi jembatan pada akhir tahun 2018. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 98.626.000,00 atau 98.63%. Target kegiatan ini pada tahun 2019 yaitu 1 (satu)dokumen dan terealisasi 1 (satu)dokumen atau 100% dengan data jembatan pada tahun 2018 dengan data kondisi baik 221 unit, sedang 8 unit, rusak ringan 5 unit dan rusak berat 4 unit.

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Maksud dari program ini adalah penataan, pengaturan, pembuatan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air pada daerah irigasi dan daerah rawa bertujuan dalam penyediaan infrastruktur untuk mendukung pertanian agar terpenuhinya kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air, tersedianya jalan inspeksi saluran di kawasan daerah irigasi/rawa. Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.865.417.497,00 dengan capaian Rp. 7.713.589.795,00 atau 98,06%. Dengan Capaian Kinerja Program 61,54 % (terrealisasi).

e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Maksud dari program ini adalah untuk menjaga ketersediaan air baku guna mencukupi kebutuhan air sehari-hari bagi masyarakat dan sebagai konservasi air. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.913.907.632,00 dengan capaian Rp. 3.800.003.300,00 atau 97,09%. Dengan Capaian Kinerja Program 51.730.961 m³ (terrealisasi).

- 1) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi bertujuan untuk memelihara jaringan irigasi yang telah dibangun dalam upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.395.037.497,00 dengan capaian Rp. 3.380.657.400,00 atau 99,58%. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan



jaringan irigasi/ rawa dan rehabilitasi jaringan irigasi/rawa sebanyak 21 DI/DIR dengan panjang total penanganan 114.626 meter (pemeliharaan rutin sepanjang 81.660m dan rehab saluran 32.966 meter),

- 2) Pembangunan Jaringan Irigasi Kegiatan pembangunan jaringan irigasi bertujuan untuk menunjang sarana dan prasarana infrastruktur dikawasan pertanian baik dalam memenuhi kebutuhan air pertanian, menambah debit air dan memudahkan akses kelahan pertanian. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.613.040.500,00 dengan capaian Rp. 1.605.939.390,00 atau 99,56%.
- 3) Peningkatan Jaringan Irigasi Kegiatan peningkatan jaringan irigasi bertujuan untuk meningkatkan fungsi kinerja jaringan irigasi dalam pelayanan memenuhi kebutuhan air pertanian dan mobilitas ke lahan pertanian guna menambah/meningkatkan lahan dan hasil pertanian. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.857.339.500,00 dengan capaian Rp. 2.726.993.005,00 atau 95,44%. Peningkatan jaringan irigasi pada tahun 2019 meliputi peningkatan jalan inspeksi, peningkatan saluran dan peningkatan embung.

f. Program Pengendalian Banjir

Program ini bertujuan mengelola sumber daya air terhadap daya rusak air dalam upaya untuk pengendalian banjir dilaksanakan dalam kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, normalisasi/pemeliharaan saluran sungai dan pengamanan garis pantai terhadap abrasi dan erosi. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 13.553.865.700,00 dengan capaian Rp. 13.015.246.151,00 atau 96,02%. Untuk Program Pengendalian Banjir menangani tiga kegiatan terdiri dari : Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan – Badan Sungai, Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai dan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai. Dengan 2 (dua) indikator capaian program: Persentase panjang drainase utama dan sungai yang ditangani sebesar 8,56% dan terealisasi sebesar 8,70% dan Persentase panjang kawasan erosi dan abrasi pantai yang ditangani sebesar 9,75% dan terealisasi sebesar 9,59 Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1) **Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan – Badan Sungai**
. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.4.782.582.500,00 dengan capaian Rp.4.675.921.500,00 atau 97,77%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembangunan / peningkatan saluran induk pengendali banjir dengan pemasangan batu / cor beton, rehabilitasi serta pemeliharaan rutin saluran induk pengendali banjir kawasan perkotaan, bertujuan untuk mengurangi kawasan daerah banjir baik dari hujan lokal maupun sungai yang melintas di dalam kota.
- 2) Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai Kegiatan normalisasi/pemeliharaan saluran sungai bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai dan membentuk profil sungai dengan normalisasi / rehabilitasi sungai menggunakan alat berat (exavator).Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.123.612.200,00 dengan capaian Rp. 5.100.889.803,00 atau 99,56%.



- 3) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.3.647.671.000,00 dengan capaian Rp.3.238.434.848,00 atau 88,78%. Kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai mempunyai tujuan mengamankan pantai dari daya rusak air yaitu erosi dan abrasi dengan membangun bangunan pemecah ombak (breakwater dan groin) dan Geobag dengan target panjang 172 meter dan terealisasi 213.6 meter atau terealisasi 124,18 %, dikarenakan bertambahnya tingkat abrasi mengakibatkan perubahan desain dengan mengurangi target panjang penanganan.

g. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Maksud dari program ini adalah melaksanakan pembangunan drainase/gorong-gorong di sisi kanan kiri jalan dan juga permukiman sebagai saluran air saat terjadi hujan. Tujuan dari program ini meningkatkan kualitas saluran drainase agar tidak terjadi genangan air pada jalan dan permukiman, terutama pada daerah-daerah rawan genangan air. Sistem drainase yang telah ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar berada di daerah perkotaan yang ada di sepanjang jaringan jalan dan permukiman.

Namun, pertumbuhan penduduk menyebabkan daerah resapan dan aliran air menjadi terganggu karena beralih fungsi menjadi perumahan dan permukiman sehingga berpotensi timbulnya titik genangan baru. Keberadaan sejumlah daerah cekungan juga merupakan kendala di dalam mengatasi aliran air sehingga masih ada daerah-daerah yang tergenang air atau banjir sesaat pada waktu turun hujan deras. Secara umum, layanan drainase di Kabupaten Kotawaringin Barat masih relatif lambat dalam mengurangi genangan. Ini dikarenakan pada titik-titik genangan tersebut harus melakukan penanganan yang secara teknis lebih rumit, dan membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2019 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.460.446.127,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 5.449.977.300,00 atau 99,81%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan realisasi drainase yang dibangun sepanjang 6,06 Km atau 109% dari target 5,55 Km.

h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Maksud dari program ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.307.436.000,00 dan terealisasi Rp. 7.302.620.946,00 atau 99,93%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

- 1) Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum Kegiatan ini bertujuan meningkatkan jumlah akses air minum yang aman bagi masyarakat. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.265.147.000,00 dan terealisasi Rp. 2.263.947.000,00 atau 99,95%. Hingga tahun 2019, capaian akses air minum sebesar 80,5%. Yang menjadi kendala dalam upaya pencapaian target pemenuhan akses air minum di Kabupaten Kotawaringin Barat salah satunya adalah perluasan penyebaran permukiman yang lebih besar jika dibandingkan dengan perluasan pengembangan dan jaringan air



minum yang dibangun. Pembangunan sistem pengolahan air minum dan jaringannya ini tentunya sangat membutuhkan anggaran yang sangat besar, dimana selama ini dalam pelaksanaannya sangat bergantung dari sumber Dana Alokasi Khusus.

- 2) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan air limbah terutama permasalahan air limbah domestik. Sarana air limbah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi cubluk/jamban tidak aman sebagai akses dasar, jamban dengan tanki septik aman dan MCK Komunal (SPALD Setempat) serta IPAL Komunal (SPALD Terpusat). Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.042.289.000,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 5.038.673.946,00 atau 99,93%. Cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik, hingga akhir tahun 2019 cakupan akses air limbah domestik sudah mencapai 90% dan capaian 47 desa/kelurahan yang sudah ODF (Open Defecation Free). Tahun 2020 ditargetkan permukiman bantaran Sungai Arut sudah terbebas dari praktek BABS atau sudah tidak ada lagi jamban terapung. Untuk pelayanan pengelolaan air limbah kedepannya akan semakin ditingkatkan dengan memaksimalkan fungsi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) dengan melaksanakan program Penyedotan Lumpur Tinja Terjadual (PLTT) pada infrastruktur yang sudah dibangun baik SPALD Setempat maupun SPALD Terpusat.

i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Maksud dari program ini adalah melaksanakan pembangunan dengan salah satu tujuan membangun estetika kawasan publik berstandar internasional. Program pengembangan wilayah strategis mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 34.189.066.012,00 dan telah terealisasi Rp. 34.130.419.800,00 atau 99,82%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu:

- 1) Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.219.297.500,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 1.219.297.500,00 atau 100% dan terealisasi sebanyak 6 dokumen.
- 2) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kegiatan ini membangun infrastruktur bernuansa modern meliputi pembangunan penataan estetika kota, prasarana pelayanan umum, prasarana penunjang wisata, prasarana olah raga, prasarana rumah ibadah dan prasarana bernuansa budaya. Pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 32.958.518.512,00 dan capaian realisasi sebesar Rp. 32.907.872.300,00 atau sebesar 99,85%

j. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Maksud dari program ini adalah pembangunan fisik untuk kesejahteraan dan keselamatan umum yang meliputi ketersediaan jalan, air bersih, sanitasi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 17.175.825.017,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 17.114.269.951,00 (99,64%).



k. Program Pembinaan Konstruksi

Maksud dari program dari kegiatan Bidang Bina Kontruksi adalah untuk mencapai tujuan sesuai Rencana Kerja dan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Bidang Bina Konstruksi adalah meningkatnya kompetensi jasa konstruksi di Kabupaten kotawaringin Barat. Pada tahun 2017 Bidang Bina konstruksi belum mendapatkan anggaran sehingga di tahun 2017 Bidang Bina Konstruksi belum bisa melaksanakan program dan kegiatan. Sedangkan pada tahun 2018 Bidang Bina Konstruksi Mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 1.028.165.500 dan terealisasi Penrepan anggaran sebesar Rp. 968.659.844,00 dan pada tahun 2019 Bidang bina konstruksi mendapatkan anggaran sebesar Rp. 893.644.200 dan terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.820.492.288. Capaian program persentase pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi target 100 % dan capaian programnya hanya mencapai 91,81 %.

Tabel 2.74
Indikator kinerja Urusan Pembinaan Kontruksi

NO	Indikator Kinerja	Capaian		2019		Status Capaian 2019
		2017	2018	Target	Realisasi	
A	INDIKATOR RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	Persentase Tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kab/kota pada SIPJAKI	-	60%	70%	90%	Tercapai
	Jumlah Aplikasi yang diadakan / dikembangkan	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Tercapai
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan terkait kelembagaan jasa konstruksi	-	120 orang.	75 orang	75 orang	Tercapai
	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek PJTBU	-	-	80 orang	80 orang	Tercapai
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi keterampilan konstruksi	-	120	185	185	Tercapai
	Jumlah Database tenaga kerja konstruksi	-	1 dok	1dok	1 dok	Tercapai
	Jumlah penyelenggara konstruksi yang mengikuti Bimtek / sosialisasi peraturan jasa Konstruksi	-	30 orang	60 orang	60 orang	Tercapai

Sumber : LKPJ 2018,2019

l. Keberhasilan Pelaksanaan Pembinaan Konstruksi

Dalam pelaksanaan pembinaan Jasa Konstruksi merupakan faktor yang sangat penting dalam pemenuhan Undang–Undang Jasa Konstruksi No 2 tahun 2017 terkait kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota pada Urusan Jasa Konstruksi.

Bidang Bina Konstruksi telah memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari tahun 2018 – 2019, dari uraian tersebut maka pada tahun 2018 – 2019 pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi dengan jumlah total peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah untuk tahun 2018 dengan jumlah peserta 120 orang sedangkan pada tahun 2019 jumlah 185 orang. Dari pelaksanaan pelatihan tersebut maka pada tahun tahun 2019 bidang Bina Konstruksi melaksanakan pelatihan dan seertifikasi dengan jumlah peserta 185 orang, dan dari yang mengikuti pelatihan setelah diadakan ujian/Assesmen yang dilaksanakan oleh tim dari LPJK provinsi maka dari peserta



pelatihan yang dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat berjumlah 152 orang. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 893.644.200,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 820.492.288,00 atau 91,81 %.Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 435.033.700,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 377.520.839,00 atau 86,78 % Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka Pembinaan Konstruksi sampai Tahun 2019 terealisasi yang sudah tersertifikasi adalah 152 orang dan 1 Dokumen dari target peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 185 orang dan 1 Dokumen yang di rencanakan atau terealisasi 100 %.
- 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 148.177.500,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 141.576.800,00 atau 95,55 % Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka Pembinaan Konstruksi sampai Tahun 2019 terealisasi 1 Sistem Aplikasi dan 3 kegiatan dari target 1 Sistem Aplikasi dan 3 kegiatan yang di rencanakan atau terealisasi 100 %.
- 3) Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 61.500.000,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 58.304.000,00 atau 94,80 % Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka Pembinaan Konstruksi sampai Tahun 2019 terealisasi 80 orang dari target 80 orang yang di rencanakan atau terealisasi 100 %.
- 4) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 248.933.000,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 243.090.649,00 atau 97,65 % Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka Pembinaan Konstruksi sampai Tahun 2019 terealisasi 60 orang dari target 60 orang yang di rencanakan atau terealisasi 100 %.
- 5)

2.4.5. Urusan Penataan Ruang

a. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Maksud dari program ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang umum dan rinci di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan informasi tata ruang. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.486.221.900,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 2.466.211.792,00 atau 99,20 %. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

- 1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan materi teknis dan draft ranperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pangkalan Bun. Penyusunan materi teknis dan draft ranperda tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan bahan peraturan perundangundangan yang akan dilegalisasi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pedoman untuk rencana pembangunan,



pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.023.282.300,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 1.012.143.660,00 atau 98,91%. Pada akhir tahun 2019 terealisasi 3 (tiga) buah dokumen yaitu dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kec. Arsel dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kec. Arsel dan Perencanaan RTH Kawasan Perkotaan Pangkalan Bun dari target 2 (dua) buah yang direncanakan dalam rangka pemenuhan dokumen rencana detail tata ruang kawasan atau terealisasi 100%. (Potensi Rencana rinci tata ruang sebanyak 39 dokumen)

- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang berkaitan dengan rapat-rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan terbentuknya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor 32 tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Agar dapat menciptakan tertib ruang sesuai dengan rencana tata ruang, maka pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara terpadu yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan otoritasnya. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 147.546.400,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 143.645.182,00 atau 97,36%. Sampai akhir tahun 2019 kegiatan telah terlaksana 100%.
- 3) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan pemanfaatan ruang dengan cara menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai penataan ruang di Kabupaten Kotawaringin Barat. Alokasi kegiatan ini sebesar Rp 1.315.393.200,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp 1.310.422.950,00 atau 99,62 %.

2.4.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini ditujukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan daerah dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator kinerja sasaran yang diampu adalah Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang targetnya melebihi atau sama. Dari ke 4 (empat) kegiatan capaian target indikator kinerja sasaran tercapai sebesar 46,34 % yang berarti capaian berada dalam kategori belum tercapai. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 487.704.900,00 terealisasi sebesar Rp. 417.669.254,00 atau 85,64%.

b. Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah & Lingkungan Hidup

Pelaksanaan program ini adalah sebagai upaya untuk mendukung perencanaan yang baik dengan menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan, sebagai dasar perumusan kebijakan daerah khusus perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah & lingkungan hidup. Indikator kinerja sasaran yang diampu adalah Persentase hasil evaluasi



analisa perencanaan pembangunan bidang Sarana Prasarana. Dari ke 3 (tiga) kegiatan capaian target indikator kinerja sasaran tercapai sebesar 80% yang berarti capaian berada dalam kategori berhasil. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 497.299.000,00 terealisasi sebesar Rp. 494.228.452,00 atau 99,38%.

c. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Maksud dan tujuan pelaksanaan program ini adalah sebagai upaya untuk mendukung perencanaan yang baik dengan menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah khusus perencanaan pembangunan bidang ekonomi. Indikator kinerja sasaran yang diampu adalah Persentase hasil evaluasi analisa perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dalam perumusan kebijakan bupati. Dari ke 3 (tiga) kegiatan, capaian target indikator kinerja sasaran tercapai sebesar 80% yang berarti capaian berada dalam kategori berhasil. Pelaksanaan kegiatan ini tahun 2019 meliputi rapat-rapat koordinasi untuk menunjang sinkronisasi perencanaan pembangunan semua SKPD, dalam lingkup bidang ekonomi dalam penyusunan Reviu RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya. Hasil dari rapat koordinasi tersebut adalah terfasilitasinya SKPD lingkup bidang ekonomi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2019 dan tahun 2020 serta fasilitasi koordinasi kegiatan lingkup bidang ekonomi. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 496.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 466.333.636,00 atau 93,91%.

D. Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan

Pelaksanaan program ini adalah sebagai upaya untuk mendukung perencanaan yang baik dengan menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah khusus perencanaan pembangunan Sosial dan Pemerintahan. Indikator kinerja sasaran yang diampu adalah Persentase hasil evaluasi analisa perencanaan pembangunan bidang Sosial Pemerintahan dalam perumusan kebijakan bupati. Dari ke 3 (tiga) kegiatan capaian target indikator kinerja sasaran tercapai sebesar 90% yang berarti capaian berada dalam kategori sangat berhasil. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 979.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 962.079.686,00 atau 98,27%.

E. Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan daerah

Pelaksanaan program ini untuk memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berkualitas, tepat waktu dan tepat sasaran. Indikator kinerja sasaran yang diampu adalah Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan. Dari ke 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan, capaian target indikator kinerja sasaran tercapai sebesar 80% yang berarti capaian berada dalam kategori berhasil. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 1.003.619.500,00 terealisasi sebesar Rp. 826.138.613,00 atau 82,32%.

2.4.7. Urusan Perumahan

- a. Program Pengembangan Perumahan Skanerio pembangunan perumahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan Rumah Tidak Layak Huni



(RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2024 adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.75
Realisasi Anggaran Urusan Perumahan

No	Tahun	Belanja Langsung	Program Pengembangan perumahan	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	TOTAL
1.	2017	Anggaran	829.980.000,00	0,00	829.980.000,00
		Realisasi	633.188.700,00	0,00	633.188.700,00
		Capaian (%)	76,28	0,00	76,28
2.	2018	Anggaran	704.957.500,00	1.297.350.000,00	2.002.307.500
		Realisasi	688.541.826,00	1.288.761.500,00	1.977.303.326
		Capaian (%)	97,87	99,34	98,61
3.	2019	Anggaran	733.904.000,00	1.448.535.000,00	2.182.439.000,00
		Realisasi	719.018.693,00	1.425.369.742,00	2.144.388.435,00
		Capaian (%)	97,97	98,40	98,26

Sumber : LKPJ 2018,2019

b. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Maksud dari program ini meningkatkan persentase lingkungan kawasan permukiman yang tertangani di Kabupaten Kotawaringin Barat .

Tabel 2.76
Indikator sasaran Rumah layak huni

Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	91	94,56	93	95,19	94	95,64	101,74

Sumber : LKPJ 2018,2019

2.4.8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.622.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.1.564.587.300,00 atau 96,46%, realisasi fisik sebesar 99,46% dengan target 15 kegiatan dan terealisasi sebanyak 14 kegiatan.

- a) Pembinaan Organisasi Lembaga Kepemudaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran pemuda dan pemudi untuk mengorganisasikan dirinya secara merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang



beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.175.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.143.135.000,00 atau 81,79% dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp.31.865.000,- Adapun realisasi fisik sebesar 81,79% atau target 10 (sepuluh) kegiatan dan terealisasi sebanyak 9 (sembilan) kegiatan. 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana adalah Kegiatan Pelantikan Pengurus DPD KNPI Periode 2019 – 2021 disebabkan karena belum keluarnya Surat Keputusan DPD KNPI tersebut dari KNPI Provinsi Kalimantan Tengah.

- b) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pemuda dalam menghadapi persaingan global dan pergaulan dengan bangsabangsa lain melalui berbagai aktivitas yang mendukung dengan mengedepankan semangat kemanusiaan yang berkeadilan, beradab dan demokratis dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.350.500.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi Rp.1.337.029.300,00 atau 99,00%. Adapun realisasi fisik 99,00% atau target 4 (empat) kegiatan dan terealisasi 4 (empat) kegiatan.
- c) Pengembangan dan Peningkatan Life Skill Kepemudaan Program ini bertujuan untuk memotivasi dan mengembangkan semangat kewirausahaan pemuda sehingga tercipta wirausaha muda yang mandiri, terampil dan kreatif. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.96.500.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi Rp.84.423.000,00 atau 87,48%. Adapun realisasi fisik 87,48% atau target 1 (satu) kegiatan dan terealisasi 1 (satu) kegiatan.

b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini memiliki 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.294.051.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.2.231.486.300,00 atau 97,27%. Realisasi fisik sebesar 97,27% dengan target 39 kegiatan dan terealisasi 38 kegiatan dengan sisa pagu anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak Rp.62.564.700,00

- 1) Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan minat dan semangat menggelorakan olahraga di semua kalangan usia. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.448.496.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi Rp.425.205.000,00 atau 94,81%. Adapun realisasi fisik 94,81% atau target sebanyak 4 (empat) kegiatan dan terealisasi 3 (tiga) kegiatan dengan sisa pagu anggaran Rp.23.291.000,00 . Adapun 1 kegiatan yang tidak terlaksana adalah kegiatan Festival Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat yang disebabkan karena waktu pelaksanaan festival olahraga tradisional bersamaan dengan padatnya event olahraga dalam rangka memperingati Hari Ke-60 Jadi kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.



- 2) Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga tingkat nasional ataupun provinsi. Pagu anggaran sebesar Rp.1.224.555.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi Rp.1.213.105.000,00 atau 99,06%. Adapun realisasi fisik sebesar 99,06% atau target 4 (empat) kegiatan dan terealisasi 4 (empat) kegiatan dengan sisa pagu anggaran Rp. 11.450.000,00.
- 3) Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga tingkat daerah. Pagu anggaran sebesar Rp.621.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi Rp.593.176.300,00 atau 95,52%. Adapun realisasi fisik sebesar 95,52% atau target 31 (tiga puluh satu) kegiatan dan terealisasi 31 (tiga puluh satu) kegiatan dengan sisa pagu anggaran Rp. 27.823.700,00

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Program ini bertujuan agar tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di setiap kecamatan maupun desa/kelurahan sehingga mampu mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana dalam meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga. Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan dengan pagu anggaran Rp.400.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.397.412.000,00 atau 99,35%. Realisasi Fisik sebesar 99,35% dengan target kegiatan 3 (tiga) kegiatan dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) kegiatan.

2.4.9. Urusan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat, 1 program yang penyerapan anggarannya rendah yaitu Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang hanya 74,31%. Salah satu penyebab rendahnya capaian adalah diakibatkan oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah, maka Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), tidak lagi diterbitkan dan dipersyaratkan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.77
Capaian program Urusan Penanaman modal

No	Program dan Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan Rp	%
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	492.313.685,00	100	484.472.594,00	98,41
1	Penyusunan Bahan Media Informasi Penanaman Modal	99.665.000,00	100	96.635.000,00	99,97



No	Progran dan Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan Rp	%
2	Penyelenggaraan Pameran Investasi	256.858.900,00	100	249.837.594,00	97,27
3	Pengelolaan Aplikasi dan Publikasi Informasi Promosi	138.789.785,00	100	38.000.000,00	99,43
II.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	318.889.100,00	90,59	266.647.100,00	83,62
1	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	4.749.000,00	100	4.749.000,00	100,00
2	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	102.890.100,00	100	1.026.231.000,00	99,74
3	Kajian Kebijakan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif Investasi	161.250.000,00	100	1.592.750.000,00	98,78
4	Pembinaan dan Pengembangan BUMD	50.000.000,00	40		0
III.	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	141.776.750,00	100	1.053.560.000,00	74,31
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha	45.150.000,00	100	23.100.000,00	51,16
2	Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	52.505.000,00	100	38.755.000,00	73,81
3	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan	44.121.750,00	100	43.501.000,00	98,59
IV.	Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	52.185.200,00	100	51.185.200,00	98,08
1	Pengumpulan dan Pengolahan Data	9.790.100,00	100	9.790.100,00	100,00
2	Pembinaan Penanaman Modal	25.515.000,00	100	24.515.000,00	96,08
3	Pemantauan, Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	16.880.100,00	100	16.880.100,00	100
	JUMLAH	1.005.164.735,00	100	907.660.894,00	90,3

Sumber : LKPJ 2018,2019

2.4.10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan Koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Program ini memiliki 6 (enam) kegiatan dengan pagu sebesar Rp.87.528.400,00 dan terealisasi Rp.84.812.100,00 atau 96,90% dengan realisasi fisik 100%.
 - a. Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Koperasi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Koperasi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.18.943.000,00 dan terealisasi Rp.18.801.800,00 atau 99,25% dengan realisasi fisik 100%.
 - b. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Perkoperasian Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang Perkoperasian di kalangan anak sekolah (SLTA) dalam rangka pengembangan Gerakan Permasyarakatan Koperasi (GEMASKOP). Pagu anggaran pada kegiatan ini



- sebesar Rp. 24.713.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.780.200,00 atau 92,18% dengan realisasi fisik 100%.
- c. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.21.237.400,00 dan terealisasi Rp.20.655.100,00 atau 97,26% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan langsung melalui pemantauan dan monitoring ke koperasi-koperasi binaan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 22.635.000,00 dan terealisasi Rp. 22.575.000,00 atau 99,73% dengan realisasi fisik 100%.
2. Program Pengembangan Usaha Koperasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dan pemasaran produksi koperasi. Pada tahun 2019 Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan dengan total pagu anggaran program sebesar Rp. 102.735.000,00 dan terealisasi Rp. 97.921.200,00 atau 95,31% dengan realisasi fisik 100%.
- a. Kegiatan Pengembangan Promosi Hasil Usaha Koperasi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar hasil usaha koperasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 86.835.000,00 dan terealisasi Rp. 82.021.200,00 atau 94,46% dengan realisasi fisik mencapai 100%.
 - b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan langsung ke koperasi-koperasi binaan dan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dihadapi pelaku koperasi simpan pinjam. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 15.900.000,00 dan terealisasi Rp. 15.900.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%.
3. Program Penumbuhan Wirausaha Baru Program ini bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.987.500,00 dan terealisasi Rp. 53.379.300,00 atau 86,11% dengan realisasi fisik 100%.
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di daerah. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 61.987.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 53.379.300,00 atau 86,11% dengan realisasi fisik 100%, serapan anggaran sebesar 86,11 % dikarenakan pada belanja akomodasi nara sumber yang dapat di efisiensi.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Usaha Mikro. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.068.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp.76.078.000,00 atau 93,84% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- a. Kegiatan Pengembangan Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro Kegiatan ini bertujuan untuk akses pemasaran bagi produk UMKM yaitu pelaksanaan Pasar Ramadhan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 81.068.000,00,00 dan terealisasi sebesar Rp.76.078.000,00 atau 93,84% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
5. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM dan Koperasi yang berasal dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Koperasi dan UMK. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 358.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 324.743.300,00 atau 90,71% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas pelaku UMKM dan Koperasi melalui pendampingan dan pelatihan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 358.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 324.743.300,00 atau 90,71% dengan realisasi fisik sebesar 100%

2.4.11. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Maksud dan tujuan program adalah terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan hasil terwujudnya peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 260.302.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 239.888.300,00 atau 92,16% realisasi fisik sebesar 100%.

- a. Kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dilaksanakan melalui kegiatan antara lain belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap sebanyak tiga orang selama satu tahun anggaran, cetak formulir permohonan KK, cetak blanko tanda bukti pengambilan KK, KIA, Akta Kelahiran, dengan hasil kelancaran sistem dan data administrasi kependudukan dengan baik dan lancar serta tersedia blangko dan formulir dengan pagu anggaran sebesar Rp.117.179.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.115.895.300,00 atau 98,90% realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan). Dilaksanakan melalui kegiatan antara lain belanja pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan Pagu Rp. 5.720.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 5.720.000,00 atau 100% realisasi fisik sebesar 100%.
- c. Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain belanja cetak buku data agregat



kependudukan semester I dan Semester II, Cetak Buku Profil Kependudukan untuk dokumentasi data kependudukan selama satu tahun pada bidang data dan informasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.850.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 43.700.000,00 atau 97,43% realisasi fisik sebesar 100%.

- d. Kegiatan peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan (Survei Kepuasan Masyarakat) dilaksanakan dengan kegiatan belanja penggandaan bahan dan laporan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan sebagai bahan perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan lebih lanjut, dengan hasil tersedia Laporan Survei Kepuasan masyarakat per semester dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.443.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.443.000,00 atau 100% realisasi fisik sebesar 100%.
- e. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dilaksanakan melalui sosialisasi dengan stake holder (pihak desa, kecamatan, SKPD, organisasi kemasyarakatan) pengguna pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kegiatan belanja bahan pelatihan, belanja publikasi kegiatan sosialisasi, belanja dekorasi, cetak spanduk dan buku panduan, penggandaan materi, sewa tempat, makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi, perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi, belanja transport dan akomodasi narasumber, honorarium pembawa acara, narasumber, moderator, pembaca doa sebanyak 2 (dua) kali kegiatan sosialisasi dengan hasil tersosialisasinya kebijakan administrasi kependudukan kepada stake holder dengan pagu anggaran sebesar Rp. 91.110.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 73.130.000,00 atau 80,26% realisasi fisik sebesar 100%. Capaian tersebut masih rendah (dibawah 85 %) disebabkan pembayaran transport / akomodasi narasumber diamprah sesuai dengan bukti pengeluaran (*at cost*) yang dilampirkan oleh narasumber.

f.

2.4.12. Urusan Ketenagakerjaan

Program dan kegiatan urusan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - 1. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja bertujuan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.010.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 963.243.550,00 atau 95,37% dan target kinerja mencapai 100%.



- b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja, pemuda putus sekolah, penganggur dan setengah penganggur di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga para pencari kerja siap untuk berwirausaha dan memasuki dunia kerja sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.113.724.000,00 dan realisasi mencapai Rp. 1.102.224.132,00 atau 98,96% dan target kinerja mencapai 100%.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana LLK. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana LLK merupakan faktor pendukung dalam pemeliharaan kebersihan LLK agar tetap terjaga dan terawat sepanjang tahun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pelatihan. Perawatan sarana dan prasarana pelatihan dilakukan agar tercipta kondisi fasilitas pelatihan yang memadai, dapat dimanfaatkan dan berdayaguna secara optimal. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 74.130.000,00 dan terealisasi Rp. 70.932.603,00 atau 95,69% dengan target kinerja tercapai 100%.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan :

- 1) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan informasi bursa tenaga kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 122.947.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 122.437.000,00 atau 99,59% dengan target kinerja mencapai 100%.
- 2) Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Perluasan Kesempatan Kerja Kegiatan perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui pelatihan pembuatan batako atau paving bagi pengangguran dan setengah pengangguran di pedesaan. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 190.756.200,00 dan realisasi mencapai Rp. 185.157.000,00 atau 97,06% dengan target kinerja tercapai 100%.

c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial
 - a. Sub Kegiatan Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial Kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan Pengusaha melalui penyelesaian secara musyawarah terhadap perusahaan untuk tercapainya hubungan industrial yang harmonis serta berkeadilan dapat terwujud. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 58.490.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 42.580.529,00 atau 72,80% dengan target kinerja tercapai 100%.



2.4.13. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Maksud dan Tujuan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Maksud: Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga, memberikan pelayanan pada korban kekerasan pada perempuan dan anak serta pengembangan Kabupaten Layak Anak. Tujuan: Melakukan Pembinaan, pelatihan ketrampilan, pelayanan bagi perempuan dan pendampingan bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak, Menuju Kabupaten Layak Anak.

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan melibatkan Pihak terkait di Kabupaten. Pagu anggaran Rp.68.500.000,00 realisasi Rp.50.273.358 (73,39%).
- 2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Dalam program ini memiliki satu kegiatan yaitu : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dengan Pagu anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasi Rp.17.928.000,00 (71,71%).
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Dalam program ini memiliki dua kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan dengan pagu anggaran Rp. 66.945.000,00 Realisasi Rp. 52.013.808,00 (77,7%)
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dengan pagu anggaran Rp. 170.500.000,00 Realisasi Rp. 152.569.794,00 (89,5%).
- 4) Program Penguatan Kelembagaan PUG Dalam program ini memiliki satu kegiatan yaitu Pendampingan Penyusunan Anggaran Responsif Gender dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 Realisasi Rp. 16.220.000,00 (81,1%).
- 5) Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kegiatan Pengembangan Wilayah/Kawasan Publik Yang Ramah Anak Pagu anggaran Rp.107.387.500,00 realisasi Rp.105.372.058 (98,12%).
- 6) Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak Pagu anggaran Rp.133.000.000,00 realisasi Rp.129.864.012,00 (97,64%)
- 7) Program Peningkatan Perlindungan Anak Pagu anggaran Rp50.000.000,00 realisasi Rp.48.655.500,00 (97,31%).

2.4.14 Urusan Ketahanan Pangan

Alokasi anggaran urusan ketahanan pangan tahun 2019 sebesar Rp.1.429.304.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.314.229.082,00 mencapai 91,95% dari rencana anggaran. Uraian realisasi program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:



- a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan) Maksud dari Program ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan distribusi pangan serta cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan tujuan dari program ini adalah meningkatnya ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Program peningkatan ketahanan pangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain :
- 1) Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun pekerjaan pokok dari kegiatan ini pada tahun 2019 adalah penyusunan PERDA cadangan pangan daerah dan disahkan pada tahun 2019. Dengan demikian, Perda Cadangan Pangan Daerah dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan cadangan pangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.41.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.33.179.800,00 atau 80,93% dengan realisasi fisik mencapai 87,80% (penjelasan ada pada permasalahan/hal.9)
 - 2) Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan lumbung pangan desa di 3 kecamatan dalam wilayah KOBAR. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.36.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.33.509.600,00 atau 93,08% dengan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 3) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam mengatasi isu – isu strategis Ketahanan Pangan Daerah, tantangan yang dihadapi ketahanan pangan melalui pelaksanaan rapat koordinasi dewan ketahanan pangan pada tanggal 4 Desember 2019 bertempat di Aula Bappeda Kotawaringin Barat dengan peserta semua anggota dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.23.005.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.756.000,00 atau 59,80% dengan realisasi fisik mencapai 69,90% (penjelasan ada dipermasalahan/hal.9)
 - 4) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. Kegiatan ini dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi kondisi ketahanan pangan terutama data kegiatan bidang-bidang di Dinas Ketahanan Pangan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyediakan data laporan progres ketahanan pangan serta inventarisir permasalahan dari kegiatan Ketahanan Pangan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.28.950.000,00 terealisasi sebesar Rp.26.990.000,00 atau 93,23% dengan realisasi fisik mencapai 100%.
- b) Program Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan serta meningkatkan kualitas makanan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) untuk konsumsi sehari-hari dengan

memanfaatkan sumber daya lokal. Program pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan konsumsi pangan non beras yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) bagi masyarakat . Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 71.695.000,00 terealisasi sebesar Rp.70.440.341,00 atau realisasi keuangan 98,25 % dengan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Kegiatan Diversifikasi Pangan dan Pengembangan Pangan Pokok Lokal Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan konsumsi pangan non beras, non terigu yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) bagi masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah TP PKK Kabupaten dan TP PKK Kecamatan, siswa SD/MI dan guru sekolah, kelompok wanita tani serta masyarakat umum Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.32.977.500,00 terealisasi sebesar Rp.28.146.600,00 atau realisasi keuangan 85,35 % dengan realisasi fisik mencapai 99,97%.
 - 3) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan makanan yang dikonsumsi masyarakat dengan melalui uji sampel pangan serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan. Sasaran kegiatan ini adalah siswa SD/MI, guru sekolah serta masyarakat umum Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.77.417.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.76.594.000,00 atau 98,94% dengan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 4) Kegiatan Promosi Potensi Pangan Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempromosikan hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah serta mempromosikan potensi sumber daya lokal sebagai upaya percepatan panganekaragaman konsumsi pangan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.85.833.800,00 dan terealisasi Rp.74.800.764,00 atau 87,15 % dengan realisasi fisik mencapai 100%.
- c) Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Maksud dari program ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan distribusi pangan serta menjaga kestabilan harga pangan. Sedangkan tujuan dari program ini adalah:
- 1) Kegiatan Pemantauan Harga Pangan dan Pasokan Pangan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan/menyiapkan data/informasi harga pangan pokok sebagai acuan dalam memantapkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pangan terutama pada momen hari-hari besar keagamaan dan nasional yang biasanya terjadi lonjakan/kenaikan harga pangan pokok yang dilaksanakan di pasar-pasar induk dalam kabupaten dan pasar kecamatan



- dalam wilayah Kotawaringin Barat. Kegiatan utama adalah penyediaan bahan pangan dengan penyelenggaraan pasar pangan murah di desa-desa pada 6 (enam) kecamatan yang mengalami gejolak harga. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.72.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.67.095.014,00 atau 92,87% dengan realisasi fisik mencapai 100%
- 2) Kegiatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan/menyiapkan data/informasi harga pangan pokok sebagai acuan dalam memantapkan kelancaran distribusi pangan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui petugas lapangan (pencatat data/enumerator harga pangan). Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.34.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.28.306.188,00 atau 82,77% dengan realisasi fisik mencapai 100%.
- d) Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Maksud dari program ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan pasokan pangan, mendeteksi dini (early warning) kerawanan pangan serta penanganan kerawanan pangan. Program pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :
- 1) Kegiatan Ketersediaan dan Analisis Neraca Bahan Makanan Kegiatan ini bertujuan untuk membuat laporan neraca bahan makanan (data tentang ketersediaan pangan). Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data-data ke desa-desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.35.564.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.33.453.100,00 atau 94,06% dengan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencegahan kerawanan pangan dengan memantau dan menganalisis akses pangan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.37.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.35.762.507,00 atau 95,37% dengan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 3) Kegiatan Pemantauan Kerawanan dan Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat rumah tangga maupun masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembinaan administrasi dan evaluasi pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam rangka memaksimalkan pengetahuan dan ketrampilan kelompok afinitas. Pembinaan dan evaluasi dilaksanakan di 3 (tiga) desa mandiri pangan dan replikasi dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (menyesuaikan ketersediaan anggaran) yaitu di Kecamatan Kumai 2 Desa dan di Kecamatan Arsel 1 Desa. Adapun pembinaan, pemantauan perkembangan dan kemajuan kelompok afinitas desa mandiri pangan dan

replikasi lama dilakukan berupa pelatihan kelompok afinitas dan perjalanan dinas monitoring. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 60.520.200,00 terealisasi sebesar Rp. 58.820.076,00 atau 97,19% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Tabel 2.78
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan

No	Tahun	Target/ Capaian	IKU RPJMD	Indikator Kinerja Utama/Indikator Renstra Dinas Ketahanan Pangan			
			SKOR PPH	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	persentase kestabilan harga bahan pokok <25 % harga Pangan	AKG Konsumsi	AKG Ketersediaan
1.	2017	Target	92,7	60%	<25%	96,0%	2.450Kkal/Kap/hr
		Realisasi	97,3	60%	<25%	109,4%	2.458Kkal/Kap/hr
		Status Capaian	104,9%	100%	100%	113,9%	100%
2.	2018	Target	92,9	60%	<25%	97,0%	2.460Kkal/Kap/hr
		Realisasi	96,80	60%	<25%	102,3%	2.501Kkal/Kap/hr
		Status Capaian	104,2%	100%	100%	105,2%	101,6%
3.	2019	Target	93,10	60%	<25%	97,0%	2.470Kkal/Kap/hr
		Realisasi	97,04	60%	<25%	113,8%	2.369Kkal/kap/hr
		Status Capaian	104,2%	100 %	100%	117,3%	95,9%

Sumber : LKPJ 2018,2019

2.4.15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kotawaringin Barat Maksud dan tujuan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Maksud:

- 1) Menurunkan Angka Total Fertility Rate (TFR)
- 2) Meningkatkan kesejahteraan keluarga

Tujuan:

- 1) Menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam pelaksanaan KKBPK dengan bimbingan tenaga Penyuluh Lapangan & Kader KKBPK.
- 2) Menyediakan data-data kependudukan, KB & Pembangunan Keluarga (KKBPK) di setiap Kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 3) Melaksanakan penyebaran informasi tentang KKBPK baik melalui penyuluhan, sosialisasi maupun seminar kependudukan.
- 4) Menggalang dukungan dari berbagai sektor yang terkait baik tingkat desa, kecamatan maupun SKPD, agar terlaksana sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan & program KKBPK. Memberikan pelayanan Keluarga Berencana bagi masyarakat. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Keluarga Berencana



- a) Program Keluarga Berencana Pagu Rp.85.380.000,00 realisasi Rp.70.569.500,00 (82,65%).
- 1) Kegiatan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi pada Keluarga Miskin. Dalam upaya meningkatkan akses dan pelayanan Keluarga Berencana dalam mendukung pencapaian sasaran program melalui keluarga berencana, maka dilakukan kegiatan pelayanan KB dan alat kontrasepsi pada keluarga miskin. Pada tahun 2019 target kinerja sebanyak 350 pasangan usia subur (PUS) pada keluarga miskin yang dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan (fisik 100%). Kegiatan dilaksanakan tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Kegiatan ini dimaksudkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi remaja melalui kegiatan penyuluhan bagi remaja (SLTA sederajat/mahasiswa) tentang Kesehatan Reproduksi, Bahaya Narkoba dan Generasi Terencana (Genre) diharapkan terjadinya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan remaja. Pada Tahun 2019 kegiatan dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan peserta sebanyak 75 orang (fisik 100%) bersumber APBD II Kab. Kotawaringin Barat.
- b) Program Pelayanan Kontrasepsi Pagu Rp.281.170.000,00 realisasi Rp.241.779.000,00 (85,99%)
- 1) Kegiatan Pelayanan Konseling KB Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang program KB bagi masyarakat dengan menyediakan alat/sarana bantu konseling berupa sarana komunikasi, informasi dan edukasi KIT (KIE KIT) fasilitas kesehatan, Bina Keluarga Balita KIT (BKB KIT) dan Generasi Terencana KIT (Genre KIT) bagi kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK/R) yang dibentuk di sekolah. Pada Tahun 2019 sarana konseling disediakan sebanyak 20 KIE KIT, 10 BKB KIT dan 10 Genre KIT dan semua sarana konseling ini telah diserahkan kepada pihak-pihak berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No.11.A Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah Genre KIT di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No.11.B Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah BKB KIT di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 11 c Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah KIE KIT di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat (Fisik 100%). Kegiatan ini pembiayaan bersumber DAK Non Fisik (BOKB) Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (PUS) Kegiatan ini di maksudkan untuk memenuhi Pelayanan Kegiatan ini di maksudkan untuk memenuhi Pelayanan Kontrasepsi KB dengan tujuan agar keluarga mampu mengatur jarak dan jumlah kelahiran. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dilaksanakan pada saat kegiatan Bakti Sosial KB Kes TNI dan



Organisasi lainnya dengan jumlah peserta akseptor yaitu pemasangan Inflan sebanyak 70 akseptor, PIL KB sebanyak 7 akseptor, suntik sebanyak 11 akseptor, kondom sebanyak 3 akseptor dan pemasangan IUD sebanyak 15 akseptor dengan total akseptor sebanyak 106 akseptor. Selain pelayanan langsung juga dilakukan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (Alokon) bagi fasilitas kesehatan baik swasta maupun pemerintah. Pada tahun 2019 didistribusikan Alakon kepada 50 fasilitas kesehatan baik swasta maupun pemerintah (fisik 100%). Kegiatan ini bersumber APBD II Kab. Kotawaringin Barat (BOKB) Kontrasepsi KB dengan tujuan agar keluarga mampu mengatur jarak dan jumlah kelahiran. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dilaksanakan pada saat kegiatan Bakti Sosial KB Kes TNI dan Organisasi lainnya dengan jumlah peserta akseptor yaitu pemasangan Inflan sebanyak 70 akseptor, PIL KB sebanyak 7 akseptor, suntik sebanyak 11 akseptor, kondom sebanyak 3 akseptor dan pemasangan IUD sebanyak 15 akseptor dengan total akseptor sebanyak 106 akseptor. Selain pelayanan langsung juga dilakukan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (Alokon) bagi fasilitas kesehatan baik swasta maupun pemerintah. Pada tahun 2019 didistribusikan Alakon kepada 50 fasilitas kesehatan baik swasta maupun pemerintah (fisik 100%). Kegiatan ini bersumber APBD II Kab. Kotawaringin Barat (BOKB) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

- c) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga , Pagu Rp.125.400.000,00 realisasi Rp.76.775.000,00 (61,22%)
- d) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pagu Rp.413.960.000,00 realisasi Rp.392.392.500,00 (94,79%).
- e) Program Pengendalian Penduduk Pagu Rp.1.629.345.600,00 realisasi Rp.1.071.607.283,00 (65,77%)

2.4.16. Urusan Perhubungan

- a) Program Pengendalian dan Pelayanan Angkutan
 - 1) Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
 - 2) Kegiatan Perijinan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 - 3) Kegiatan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor
- b) Program Pengembangan Moda dan Keselamatan Kendaraan Bermotor
 - 1) Kegiatan Sosialisasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 - 2) Kegiatan Study Pengembangan Teknologi/Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
 - 3) Kegiatan Pengadaan Penunjang Sarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
- c) Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



2) Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas dan APILL

Tabel 2.79
Capaian program Dinas Perhubungan

No	Tahun	Target & Realisasi	Indikator Kinerja Utama/Indikator Renstra Dinas Perhubungan		
			Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas Perhubungan yang lebih memadai	Tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab pelaku transportasi	Tersedianya sumber daya aparatur yang siap dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Perhubungan secara profesional
1.	2017	Target (%)	80	90	90
		Realisasi (%)	98,84	86	90
		Capaian (%)	123,56	95,24	100
2.	2018	Target (%)	80	90	90
		Realisasi (%)	83,34	92,30	90
		Capaian (%)	104,17	115,37	100

Sumber : LKPJ 2018,2019

Indikator sasaran Dinas Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2019 Perubahan menjadi :

Tabel 2.80
Capaian Target sasaran Dinas Perhubungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pelayanan publik sektor Lalu lintas dan Angkutan	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	81,11%	101,38%
2.	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Penurunan Angka Kecelakaan	40%	38%	95%
3.	Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan	Prosentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	70%	75%	107,14%

Sumber : LKPJ 2018,2019

Dilihat dari capaian kinerja Renstra untuk Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan publik sektor lalu lintas dan Angkutan
Realisasi : 81,11%
Capaian kinerja : 101,38%
Kategori : Sangat berhasil
- Meningkatkan keselamatan lalu lintas
Realisasi : 38 %
Capaian kinerja : 95 %
Kategori : Berhasil
- Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan



Realisasi	: 75 %
Capaian kinerja	: 107,14%
Kategori	: Sangat Berhasil

Untuk IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Perhubungan dan menjadi sasaran RPJMD adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diampu oleh bidang Lalu Lintas dan Angkutan dengan realisasi sebesar 81,11% sehingga capaian kinerja sebesar 101,38% dari target yang sudah ditentukan sebesar 80%.

2.4.17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah :

- a) Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi Dan Informatika Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase pengembangan infrastruktur, komunikasi dan informatika sehingga dapat meningkatkan pembinaan, penyiapan, perumusan, pengawasan, pengendalian terhadap infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, persandian dan keamanan informasi. Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan didalamnya dengan pagu sebesar Rp. 4.158.257.254,00 diantaranya pembangunan infrastruktur pendukung Smart City, sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar RP. 3.928.394.024,00 atau 94,47%, capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100%.
 - 1) Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk penyiapan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi serta penyiapan standarisasi infrastruktur teknologi diantaranya pembangunan infrastruktur pendukung Smart City, infrastruktur merupakan fondasi teknologi yang pertama, dengan prinsip konektivitas yang akan menjadi media pertukaran data dan informasi. Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan kegiatan untuk mendukung hal ini, dengan sudah terkoneksi Organisasi Perangkat Daerah dalam jaringan Fiber Optic sepanjang 4,9 KM melewati Jalan Sutan Syahrir, Jalan Pangeran Diponegoro, dan Jalan Pakunegara, juga dilakukan penataan di ruang Fiber Optic, dan telah terpasang CCTV sebanyak 5 titik di Simpang Samsat, Simpang Bank Kalteng, Simpang Gereja Imanuel, dan Bundaran Misbar, untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik disediakan Generator Diesel HD40KVA SILENT 1 unit dan ATA COS MOTORIZED 63A UP TO 40KVA 1 unit selain itu juga telah terpasang 1 unit Video Wall Dashboard Informasi 1 unit di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.815.257.254,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 3.592.704.084,00 atau 94,17%, realisasi fisik sebesar 100% dari target kinerja jumlah infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang disediakan, dikembangkan, dan dipelihara 94 unit dan realisasi 94 unit.



- 2) Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pengembangan aplikasi intra dan antar satuan kerja pemerintah daerah. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 343.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.335.689.940,00 atau 97,87%, realisasi fisik sebesar 100% dari target kinerja Jumlah aplikasi yang disediakan dan dikembangkan 5 buah dan realisasi 5 buah.
- b) Program Implementasi Dan Pengembangan E-Government Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan e-government dan pengelolaan data statistik. Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan didalamnya dengan pagu sebesar Rp.701.937.900,00 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp.618.548.644,00 atau 88,12%, capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100%.
- 1) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pengembangan ekosistem egovernment. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.60.465.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 59.863.113,00 atau 99,00%. Realisasi fisik sebesar 100% dari target kinerja jumlah sumber daya TIK daerah yang dikembangkan 68 orang dan realisasi 68 orang.
 - 2) Kegiatan Penerapan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan tata kelola e-government diantaranya Belanja Modal Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Master Plan Smart City, DED Ducting Fiber Optik untuk 4 ring, dan DED Comand Center/Dashboard Informasi. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.415.365.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 371.854.190,00 atau 89,52%. Realisasi fisik sebesar 100% dari target kinerja jumlah tata kelola informasi dan komunikasi yang diterapkan 4 (empat) rancangan peraturan dan realisasi 4 rancangan peraturan.
 - 3) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Kegiatan ini bertujuan untuk penyiapan, pembangunan dan pengembangan pengelolaan di bidang integrasi sistem informasi. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.226.107.900,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 186.831.341,00 atau 82,63%. Realisasi fisik sebesar 100% dari target kinerja jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan 1 (satu) sistem dan realisasi 1 (satu) sistem.
- c) Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase pembinaan, penyiapan, perumusan, pengawasan dibidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi publik dan



pengelolaan media publik. Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan didalamnya dengan pagu sebesar Rp.225.145.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp210.984.291,00 atau 93,71% dan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100%.

- 1) Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Kegiatan ini bertujuan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pengelolaan opini publik. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.39.742.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 26.186.800,00 atau 65,89%. Realisasi fisik sebesar 100% dari target kinerja jumlah monitoring opini dan aspirasi publik 1 (satu) kali dan realisasi 1 (satu) kali. Serapan anggaran sebesar 65,89% disebabkan karena tempat kegiatan sosialisasi di aula Bupati tidak ada biaya sewa, dan narasumber yang direncanakan didatangkan dari pusat diganti dari kabupaten sehingga belanja transportasi dan akomodasi narasumber tidak terserap.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan bahan pengelolaan informasi daerah dan melakukan penyebaran informasi kepada publik. Pagu anggaran pada kegiatan ini Rp.62.4.3.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 62.097.491,00 atau 99,51%. Realisasi fisik sebesar 100% dari target kinerja jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola 1 buah dan realisasi 1 buah.
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Konten Media Publik Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi, koordinasi, integrasi dan pemberdayaan di bidang pengelolaan media publik. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.123.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 122.700.000,00 atau 99,76%. Realisasi fisik sebesar 100% dari target kinerja jumlah konten media publik yang dikelola 2 (dua) buah dan realisasi 2 (dua) buah.
- d) Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase pembinaan, penyiapan, perumusan, pengawasan dibidang layanan informasi publik, kehumasan dan kemitraan komunikasi publik. Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan di dalamnya dengan pagu sebesar Rp.1.254.085.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.209.156.076,00 atau 96,42% dan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100%.
- 1) Kegiatan Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan, penyiapan, perumusan, pengawasan di bidang kemitraan komunikasi publik. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.84.135.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 70.148.680,00 atau 83,38%. Realisasi fisik sebesar 100% dari target



kinerja jumlah kemitraan komunikasi publik yang dikembangkan 6 (enam) kelompok dan realisasi 6 (enam) kelompok.

- 2) Kegiatan Pengembangan Layanan Hubungan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan, fasilitasi dan koordinasi di bidang hubungan masyarakat. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.133.485.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp1.107.017.396,00 atau 97,66% realisasi fisik sebesar 100% dari target kinerja jumlah layanan hubungan komunikasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah 1 (satu) buah dan realisasi 1 (satu) buah.
- 3) Kegiatan Layanan Penyediaan Informasi Pemerintah Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan terhadap layanan informasi publik. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 36.465.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 31.990.000,00 atau 87,73%. Realisasi fisik sebesar 100% dari target kinerja jumlah informasi pemerintah daerah yang disediakan 2 jenis dan realisasi 2 jenis.

2.4.18. Urusan Pertanahan

DISPERKIM

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 1) Pengendalian, Pemanfaatan, Penguasaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman ,Kegiatan Pengendalian pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah perumahan dan kawasan permukiman diarahkan pada kegiatan sosialisasi peraturan terkait pertanahan dan pemetaan pertanahan menggunakan anggaran sebesar Rp. 63.375.000,00 dan teralisasi Rp. 63.015.900,00 atau sebesar 99,43%.
 - 2) Pencegahan dan Penanganan Masalah Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya hukum dan peraturan terkait pertanahan. sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap hak dan kewajibannya selaku pemilik lahan/tanah/bangunan perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 58.500.000,00 dan terealisasi Rp. 57.274.100,00 atau sebesar 97,90%.

SETDA Bagian Pemerintahan dan Otda

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program ini diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan maksud untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun



target dan capaian indikator program Indikator persentase konflik-konflik pertanahan yang ditindaklanjuti diukur dengan menghitung perbandingan antara jumlah konflik-konflik pertanahan yang dapat ditindaklanjuti dibagi jumlah konflik pertanahan yang diajukan. Pada tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) konflik pertanahan yang diajukan melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk dapat difasilitasi penyelesaiannya. Namun sampai dengan akhir tahun 2019 hanya terdapat 5 (lima) konflik pertanahan saja yang mendapatkan tindak lanjut fasilitasi penyelesaiannya. Sehingga realisasi indikator program ini adalah sebesar 71,43%. Program ini dilaksanakan dengan pagu Rp.89.650.000,00 dengan realisasi fisik 86,78% dan realisasi keuangan sebesar Rp.77.792.616,00 atau 86,77%. Adapun kegiatan dalam program ini sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan , Anggaran yang tersedia sebesar Rp.89.650.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.77,792.616,00 atau 86,77%, yakni untuk belanja penggandaan, fasilitasi rapat penyelesaian konflik pertanahan serta perjalanan dinas luar kota. Konflik pertanahan yang masuk pada bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2019 yang telah difasilitasi adalah lahan dayak misik, Indra Prana Jaya dan RTH Pasir Panjang. Secara keseluruhan konflik pertanahan tersebut telah difasilitasi dalam bentuk pertemuan rapat, dengan produk notulen rapat. Hasil notulen rapat kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan, apabila masih memerlukan data dan informasi. Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, Sekretariat Daerah menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.81
Capaian dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Indikator	2019			2020	2021	2022
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Target	Target
Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	75%	100%	133,33%	75%	80%	80%

Sumber : LKPJ 2019

Indikator persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan diukur dengan menghitung perbandingan antara jumlah konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan dibagi jumlah konflik pertanahan yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2019 terdapat 5 (lima) konflik pertanahan yang difasilitasi melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan secara administrasi dapat diselesaikan permasalahannya. Sehingga realisasi indikator ini adalah sebesar 100%.

BPKAD

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. Program ini bertujuan untuk melaksanakan penataan kembali penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan



memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan penggunaan pemilikan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.548.070.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 765.089.476,00 atau 49,42%, realisasi fisik sebesar 79,10%.

- 1) Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penataan kembali penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan penggunaan pemilikan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.548.070.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 765.089.476,00 atau 49,42%, realisasi fisik sebesar 79,10%. Rendahnya realisasi keuangan karena sertifikasi tanah masih dalam proses di BPN dan terbatasnya tenaga ukur tanah sehingga dana untuk pengurusan sertifikat dan pengukuran ulang belum dapat dicairkan.

2.4.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

BAKESBANGPOL

Program dan kegiatan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terurai sebagai berikut:

- a) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal .Maksud dan tujuan dilaksanakannya program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal adalah menjaga dan memelihara situasi keamanan yang kondusif dan kewaspadaan dini masyarakat serta Pencegahan adanya Potensi Konflik Sosial. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sepanjang Tahun 2019 secara berkala dengan kegiatan sebagai berikut :
- b) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan .Maksud dan tujuan dilaksanakannya program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah mencegah terjadinya konflik yang bernuansa SARA dan mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, besarnya anggaran Rp. 494.090.100,00 terealisasi Rp.437.141.349,00 atau sebesar 88,47% .
- c) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan . Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada Tahun Anggaran 2019 tidak lagi dianggarkan karena adanya perampangan program dan kegiatan serta rasionalisasi anggaran, sedangkan



untuk sub-sub kegiatannya dialihkan ke Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

- d) Program Pendidikan Politik Masyarakat . Maksud dan tujuan dilaksanakan program ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pendidikan politik di masyarakat. Program Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri besar Anggaran Rp. 223.481.500,00 dan terealisasi Rp. 210.082.629.,00 atau sebesar 94,00%,
- e) Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan.Maksud dan tujuan dilaksanakannya program adalah meningkatkan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Program Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan, besarnya anggaran Rp.160.297.000,00 dan terealisasi Rp.97.417.800,00 atau 60,77%.

SATPOL PP DAN DAMKAR

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pagu anggaran pada program ini sebesar Rp. 3.391.425.000,00 dan terealisasi Rp. 3.377.331.096,00 atau 99,58%. Maksud dan tujuan program ini adalah untuk pengendalian operasional dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, mediasi dan fasilitasi kesiagaan, mengantisipasi, ketahanan masyarakat dan pengamanan lingkungan. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 445.130.700,00 terealisasi sebesar Rp 444.955.700,00 atau 99,96%. Maksud dan tujuan program ini adalah Pengendalian operasional dan pengendalian pengamanan dan pengawalan VVIP, cakupan patrol rutin dan menciptakan keamanan, ketertiban dan keindahan (K3)
- 3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp.141.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 133.240.000,00 atau 94,17%.
- 4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 1.117.430.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.115.915.701,00 atau 99,86%
- 5) Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pagu anggaran pada program ini adalah Rp. 161.402.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 160.372.900,00 atau 99,36 %.
- 6) Peningkatan Kerjasama/Sinergitas POLRI, TNI, Kejaksaan, PPNS dan Aparatur Lainnya Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk membentuk sekretariat PPNS Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan rencana kerja bidang penegakan



perda dengan tujuan dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 30.153.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.153.000,00 atau 100%.

- 7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk Monitoring kegiatan pada bidang Penegakkan Perda dan Perkada dengan tujuan untuk mengevaluasi Program Penegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 6.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.250.000,00 atau 100%.

2.4.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a) Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan . Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan, penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumberdaya di bidang administrasi pembangunan, serta pengelolaan dan pengadaan barang/ jasa secara elektronik. Indikator keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari seberapa tingkat capaian atas :
 - 1) Persentase Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan Perencanaan Anggaran SKPD
 - 2) Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
 - 3) Persentase Data Dukungan Kebijakan Nasional yang dapat terpenuhi
 - 4) Persentase capaian realisasi APBD yang sesuai dengan target Program ini memiliki 4 (empat) kegiatan dengan pagu total Rp.524.188.300,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.399.774.978,00 atau 76,27 dan realisasi fisik 83,53%.
- b) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum .Program ini diselenggarakan dengan tujuan :
 - a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan, penyusunan, penelaahan, proses meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.
 - b. Memberikan layanan dan konsultasi hukum dan HAM serta bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah dan yang tersangkut perkara dalam kedinasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
 - c. Mempublikasi atau melakukan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi Hukum
 - d. Penyerasian, penyelarasan, harmonisasi rancangan produk hukum daerah
 - e. Melaksanakan koordinasi pemenuhan hak asasi manusia



- f. Memberikan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum yang diuraikan ke dalam 5 (lima) kegiatan dengan pagu Rp.990.256.350,00 dengan realisasi fisik 99,79% dan realisasi keuangan Rp.947.057.996,00 atau 95,64%.
- c) Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Maksud dan tujuan program ini adalah untuk melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan sumber dana APBD/ APBN/ Hibah/ DLN di Kabupaten Kotawaringin Barat. Melalui program ini Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melaksanakan manajemen serta pengukuran terhadap kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2019 tingkat kematangan yang dituju atau ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah adalah berada pada level 2, dengan nilai persentase kematangan 55%. Anggaran untuk melaksanakan program ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.990.256.350,00 dengan realisasi fisik 96,18% dan realisasi keuangan sebesar Rp.796.417.294,00 atau 93,25%.
- d) Program Penyelenggaraan Keprotokolan dan Komunikasi Publik. Program ini diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi untuk melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengembangan dan pembinaan administrasi dan sumberdaya di bidang penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi publik guna pemantapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah yang berkualitas, keberhasilan dari program ini diukur dari seberapa besar persentase kegiatan pimpinan daerah, kunjungan tamu daerah serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terpublikasi dan terdokumentasi. Indikator program penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi publik berupa persentase kegiatan pimpinan daerah, kunjungan tamu daerah serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terpublikasi dan terdokumentasi ditetapkan target sebesar 85 %. Dari target tersebut menghasilkan realisasi sebesar 100 % dengan capaian 125 %. Capaian sebesar 125% disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah kegiatan pimpinan daerah dari tahun sebelumnya, baik yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah. Demikian juga dengan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan komunikasi publik dalam bentuk pendokumentasian dan publikasi. Anggaran untuk melaksanakan program ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.293.045.000,00 dengan realisasi fisik 91,12% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.086.994.375,00 atau 91,01%.
- e) Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Program ini diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan maksud untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan



hubungan kerja sama. Dalam pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah ditetapkan 5 (lima) indikator keberhasilan program, yakni : Program ini dilaksanakan pada tahun 2019 dengan pagu Rp.3.633.097.900,00 dengan realisasi fisik 98,08% dan realisasi keuangan Rp.3.513.704.926,00 atau 96,71%

- f) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan. Maksud dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah dengan cara pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mental spiritual, pembinaan sosial, pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan kesehatan dan kesejahteraan. Pada tahun 2019 Program ini dilaksanakan dengan pagu Rp.5.835.429.700,00 dengan realisasi fisik 90,13% dan realisasi keuangan Rp.5.131.695.911,00 atau 87,94%.
- g) Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah melalui pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi daerah dan potensi daerah. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan SDA dengan pagu Rp.120.488.800,00. Adapun besaran realisasi fisik yang dicapai pada tahun 2019 adalah 94,75% dan realisasi keuangan Rp.111.819.297,00 atau 92,80%.
- h) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah .Program ini diselenggarakan dengan maksud untuk menyusun bahan pelaksanaan, pembinaan dan pelayanan administrasi bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta terpenuhi tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya aparatur yang memadai pada setiap instansi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dengan pagu Rp.341.494.000,00. Adapun besaran realisasi fisik yang dicapai adalah 99,17% dan realisasi keuangan Rp.338.048.056,00 atau 98,99%.
- i) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Program ini diselenggarakan dengan maksud untuk menyusun bahan pelaksanaan, pembinaan dan pelayanan administrasi bidang kelembagaan dan tatalaksana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dengan pagu pada APBD Perubahan sebesar Rp.829.451.500,00. Adapun besaran realisasi fisik yang dicapai adalah 59,30% dan realisasi keuangan Rp.476.249.856,00 atau 57,42%.



Sekretariat DPRD

A. Program Dan Kegiatan

Alokasi anggaran Belanja Langsung (BL) urusan pemerintahan khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 sebesar Rp.13.959.658.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.12.858.206.173,57,00 atau 92,11%.

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program ini bertujuan untuk menunjang peningkatan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Program ini memiliki 8 kegiatan didalamnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.526.799.900,00,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 4.973.182.009,00 atau 89,98%, realisasi fisik sebesar 91,53%.
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan penyusunan/pembahasan ranperda produk hukum dewan. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp.337.500.000,00 dan terealisasi Rp.336.000.000,00 atau 99,56%. Adapun realisasi fisik sebesar 100%.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin barat tahun 2019 adalah:

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah . Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi terkini di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Program ini memiliki 9 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.301.565.462,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dan terealisasi Rp.1.085.302.806,00 atau 83,38%, realisasi fisik sebesar 100%.

Badan Pendapatan Daerah A. Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran Belanja Langsung (BL) urusan keuangan khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 sebesar Rp. 3.818.841.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 3.251.549.280,00 atau 85,14%, realisasi fisik sebesar 87,59% Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin barat tahun 2019 adalah:

- 1) Program Ekstensifikasi Pajak Daerah .Ekstensifikasi bertujuan menambah jumlah wajib pajak ataupun objek pajak daerah, dilaksanakan dengan anggaran Rp. 796.162.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 461.678.980,00 atau sebesar 57,99 % dan realisasi fisik 67,98%.
- 2) Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat .Program ini bertujuan memverifikasi hasil pendataan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memfasilitasi keberatan yang dialami masyarakat terhadap hasil



penilaian yang telah ada, sehingga setelah data diverifikasi akan dikeluarkan ketetapan pajak daerah terhadap objek pajak. Program ini dilaksanakan dengan anggaran Rp. 701.261.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 615.792.400,00 atau sebesar 87,81% dan realisasi fisik 89,73%.

- 3) Program Intensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah. Program ini bertujuan mengintensifkan upaya penagihan dan pembinaan objek pajak agar taat dalam melakukan pembayaran pajak dan melaporkan pajak daerah. Program ini dilaksanakan dengan anggaran Rp. 1.264.418.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 1.194.134.300,00 atau sebesar 94,4 4) Program Peningkatan Penerimaan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah .Program ini bertujuan memastikan tidak ada penyimpangan dari aparatur pajak di lapangan dan melakukan pengembangan terhadap aplikasi pajak daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah. Program ini dilaksanakan dengan anggaran Rp. 1.057.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 979.943.600,00 atau sebesar 92,71% dan realisasi fisik 97,12%4% dan realisasi fisik 95,51%.

Tabel 2.82
Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi ke-3 : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup									
1.	Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD)	Meningkatkan Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	18,63 %	19,76 %	42,05 %	67,59 %	84,27 %	118,16 %
		Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6,53 %	16,29 %	36,53 %	55,94 %	70,98 %	95,56 %

Sumber : LKPJ 2019

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.83
Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan 2019

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	3.848.247.250,00	3.230.466.316,00	83,95
	a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	111.059.000,00	66.532.180,00	59,91
	b. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan	2.941.228.250,00	2.460.654.231,00	83,66
	c. Seleksi Penetapan Tugas Belajar / Izin Belajar dan Kerjasama Aparatur	740.100.000,00	662.195.033,00	89,47
	d. Pengembangan Teknologi Informasi Data Kepegawaian	55.860.000,00	41.084.872,00	73,55
2	Program Pengembangan Karir	807.323.600,00	739.570.908,00	91,61



No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
	a. Penyusunan Rencana Penjurangan Karir	382.250.000,00	366.857.753,00	95,97
	b. Seleksi Pengadaan Calon ASN dan Penempatan	263.253.600,00	217.204.800,00	82,51
	c. Penyelenggaraan Seleksi Ikatan Dinas	24.320.000,00	24.253.324,00	99,73
	d. Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat	137.500.000,00	131.255.031,00	95,46
3	Program Pembinaan Aparatur	337.350.000,00	317.043.959,00	93,98
	a. Penyelenggaraan Administrasi Hak – Hak Kepegawaian	111.900.000,00	103.393.016,00	92,40
	b. Pemberian Penghargaan Bagi ASN Beprestasi	26.000.000,00	25.962.900,00	99,86
	c. Proses Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin	88.250.000,00	81.037.043,00	91,83
	d. Pembinaan Jiwa Korsa Anggota KORPRI	111.200.000,00	106.651.000,00	95,91

Sumber : LKPJ 2019

- a. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur, Maksud dan tujuan dilaksanakannya program peningkatan kompetensi aparatur adalah untuk meningkatkan kemampuan, profesionalisme, keahlian dan kualitas sumber daya aparatur melalui pelaksanaan diklat penjurangan, Bimtek Kepegawaian maupun diklat teknis dan fungsional. Dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan ini diharapkan aparatur yang ada di instansi mampu berkerja lebih efisien dan mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik, sehingga aparatur yang kompeten dapat terwujud.
- b. Program Pengembangan Karir , Maksud dan tujuan dilaksanakannya program pengembangan karir adalah untuk mendukung dan meningkatkan manajemen PNS agar tercapai PNS yang profesional dan kompeten di bidangnya.
 - 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Penjurangan Karir Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan karir bagi PNS baik berupa pengangkatan/pelantikan dalam jabatan struktural & fungsional, uji kompetensi maupun lelang terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sepanjang tahun 2019 ada 471 orang PNS yang di angkat, dipindahkan maupun diberhentikan dalam dan dari jabatan struktural. Sementara untuk jabatan fungsional tertentu ada 151 orang PNS yang di angkat, dipindahkan maupun diberhentikan. Pada triwulan IV 2019 dilaksanakan uji kompetensi untuk pejabat eselon III.a yang di ikuti sebanyak 36 orang peserta dan dilanjutkan dengan seleksi lelang terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Akan tetapi lelang terbuka ini baru sampai pada tahap pendaftaran dan penyerahan berkas peserta. Tahap selanjutnya akan dilakukan pada tahun anggaran 2020. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 366.857.753,00 dari pagu sebesar Rp 382.250.000,00. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: Terlaksananya pelantikan Sekretaris Daerah Definitif Kabupaten Kotawaringin Barat. Terlaksananya pelantikan pejabat administrator dan pengawas sebanyak tiga kali.
 - 2) Kegiatan Seleksi Pengadaan Calon ASN dan Penempatan Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangan pegawai di sejumlah instansi. Untuk tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerima kuota sebanyak 141 formasi dengan rincian 61 tenaga pendidikan, 57



tenaga kesehatan dan 23 tenaga teknis lainnya. Tes seleksi CPNS baru sampai pada tahap seleksi berkas/administrasi dan pengumuman hasil verifikasi berkas, sedangkan Seleksi Kemampuan Dasar dan Seleksi Kemampuan Bidang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) akan dilanjutkan di tahun anggaran 2020. Dari 1954 pelamar, ditetapkan 1837 pelamar yang memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi dan 117 tidak memenuhi syarat (TMS). Untuk CPNS formasi 2018 yang telah mendapatkan NIP, diberikan pembekalan sekaligus penyerahan SK pengangkatan sebagai CPNS. Kegiatan pembekalan di ikuti sebanyak 213 CPNS. Sepanjang tahun 2019, terdapat 146 usul mutasi yang di terima terdiri dari 45 mutasi keluar daerah, 41 mutasi masuk ke dalam daerah dan 60 mutasi dalam daerah Kotawaringin Barat. Dari sejumlah usul mutasi tersebut, 83 usulan selesai di proses dan diterima, 18 usulan di tolak serta 45 usulan masih berproses di Pejabat Pembina Kepegawaian. Anggaran yang terserap sebesar Rp 217.204.800,00 dari pagu sebesar Rp 263.253.600,00. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya formasi dan dsitribusi pegawai untuk mengisi kekurangan PNS di lingkungan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat.

- 3) Penyelenggaraan Seleksi Ikatan Dinas , Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaring putra – putri terbaik Kotawaringin Barat untuk mengikuti sekolah kedinasan. Sekolah yang di maksud yaitu Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Untuk IPDN, terdapat 48 pelamar dan 6 orang di antaranya dinyatakan lulus. Sedangkan untuk STTD dari 11 peserta yang melamar, 4 peserta dinyatakan lulus. Anggaran yang terserap sebesar Rp 24.253.324,00 dari pagu Rp 24.320.000,00. Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penerimaan siswa melalui sekolah kedinasan.
- 4) Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat ,Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya usul kenaikan pangkat serta pencantuman gelar dan peninjauan masa kerja PNS serta ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas. Untuk tahun 2019 ini terdapat 668 PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat untuk periode April dan Oktober 2019. Selain usul kenaikan pangkat, juga terdapat usul pencantuman gelar sebanyak 15 PNS dan peninjauan masa kerja sebanyak 1 PNS. Seleksi ujian dinas di ikuti 32 PNS dan ujian penyesuaian ijazah di ikuti 4 PNS. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 131.255.031,00 dari pagu sebesar Rp 137.500.000,00. Hasil dari kegiatan ini adalah telah diterbitkannya pertimbangan teknis untuk usul dimaksud yang telah disetujui oleh BKN dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Program Pembinaan Aparatur

- 1) Penyelesaian Administrasi Hak – Hak Kepegawaian Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan hak kepegawaian terhadap PNS yang telah mengabdikan dalam jangka waktu tertentu. Pelayanan hak kepegawaian yang dimaksud yaitu pengurusan dan penerbitan SK Pensiun



sebanyak 123 PNS, pengusulan pembuatan Taspen sebanyak 42 PNS, pengusulan pembuatan Karis/Karsu sebanyak 56 PNS dan pengusulan pembuatan Karpeg sebanyak 71 PNS. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 103.393.016,00 dari pagu sebesar Rp 111.900.000,00. Hasil dari kegiatan ini adalah terjaminnya pemenuhan hak – hak kepegawaian PNS dengan diterbitkannya kartu dan SK untuk PNS yang melakukan pengusulan.

- 2) Pemberian Penghargaan Bagi ASN Berprestasi Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap PNS yang telah mengabdikan dalam jangka waktu tertentu berupa pemberian piagam satyalencana. Piagam satyalencana diberikan kepada 63 PNS. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 25.962.900,00 dari pagu sebesar Rp 26.000.000,00.
- 3) Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menangani dan memproses setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS. Setiap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan ini diharapkan bisa memberikan efek jera dan sebagai peringatan bagi PNS lain. Dari sejumlah dugaan kasus pelanggaran disiplin, ada 15 PNS yang telah menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah menjadi ditetapkan SK penjatihan hukuman disiplinnya. Rincian untuk 15 SK penjatihan hukuman disiplin yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - 1 PNS di jatuhkan hukuman disiplin berat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
 - 3 PNS di jatuhkan hukuman disiplin berat pembebasan dari jabatan PNS
 - 5 PNS di jatuhkan hukuman disiplin berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
 - 6 PNS di jatuhkan hukuman disiplin sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahunAnggaran yang diserap untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 81.037.043,00 dari pagu sebesar Rp 88.250.000,00. Hasil dari kegiatan ini adalah telah terbitnya SK penjatihan hukuman disiplin PNS.
- 4) Pembinaan Jiwa Korsa Bagi Anggota KORPRI Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan PNS terhadap almamater KORPRI melalui keikutsertaan dalam kegiatan KORPRI dan pembinaan kerohanian. Kegiatan yang diikuti antara lain peringatan HUT KORPRI dan siraman rohani untuk PNS. Selain upacara peringatan HUT KORPRI, juga dilaksanakan beberapa lomba untuk sesama anggota KORPRI. Acara ini diikuti 1500 anggota KORPRI se Kotawaringin Barat. Untuk siraman rohani dilaksanakan sebanyak 7 kali, bergiliran di setiap kecamatan di Kotawaringin Barat dan diikuti 875 PNS.



Anggaran yang terserap sebesar Rp 106.651.000,00 dari pagu Rp 111.200.000,00. Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya PNS yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan KORPRI dan siraman rohani. • Pada kegiatan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat, penghapusan CPNS menjadi PNS tidak terlaksana karena CPNS belum selesai melaksanakan Pelatihan Dasar.

Inspektorat Kabupaten

A. Program dan Kegiatan

Program kerja dan kegiatan prioritas Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah:

- a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pada Wilayah I;
 - 1) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah I;
 - 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala pada wilayah I;
 - 3) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah pada wilayah I;
 - 4) Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya pada wilayah I;
 - 5) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada wilayah I.
- b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pada Wilayah II;
 - 1) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah II;
 - 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala pada wilayah II;
 - 3) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah pada wilayah II;
 - 4) Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya pada wilayah II;
 - 5) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada wilayah II.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pada Wilayah III;
 - 1) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah III;
 - 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala pada wilayah III;
 - 3) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah pada wilayah III;
 - 4) Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya pada wilayah III;
 - 5) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada wilayah III.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pada Wilayah IV;
 - 1) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah IV;
 - 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala pada wilayah IV;
 - 3) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah pada wilayah IV;



- 4) Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya pada wilayah IV;
 - 5) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada wilayah IV.
- e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
 - f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Tabel 2.84
Total Belanja Langsung

NO.	Tahun	Pagu Belanja Langsung	Realisasi	%
1.	2017	Rp. 3.742.419.000	Rp. 3.633.701.741	97,10
2.	2018	Rp. 3.696.819.000	Rp. 3.586.089.375	97,00
3.	2019	Rp. 3.640.314.000	Rp. 3.230.644.216	88,75

Sumber : LKPJ 2019

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pengawasan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah I.

Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah I merupakan program prioritas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mengutamakan pencegahan, pembinaan dan pembenahan terhadap penyimpangan dan resiko kesalahan yang terjadi baik dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada wilayah I dengan total pagu anggaran Rp.. 446.390.600,00 realisasi Rp. 425.989.827,00 dengan capaian 95,43%. sebesar Rp. 93.831.464,00.

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah II.

Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah II merupakan program prioritas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mengutamakan pencegahan, pembinaan dan pembenahan terhadap penyimpangan dan resiko kesalahan yang terjadi baik dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada wilayah II dengan total pagu anggaran Rp. 367.334.000,00 realisasi Rp. 298.504.195,00 dengan capaian 81,26%.

c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah III.



Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah III merupakan program prioritas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mengutamakan pencegahan, pembinaan dan pembenahan terhadap penyimpangan dan resiko kesalahan yang terjadi baik dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada wilayah III dengan total pagu anggaran Rp. 483.344.600,00 realisasi Rp. 384.535.884,00 dengan capaian 79,56%.

d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah IV.

Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah IV merupakan program prioritas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mengutamakan pencegahan, pembinaan dan pembenahan terhadap penyimpangan dan resiko kesalahan yang terjadi baik dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada wilayah IV dengan total pagu anggaran Rp. 410.217.800,00 realisasi Rp. 354.435.352,00 dengan capaian 86,40%.

e. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan.

Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan merupakan program prioritas untuk menyusun dokumendokumen yang diperlukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan maksimal, total pagu anggaran program ini adalah Rp. 32.710.000,00 dengan realisasi Rp. 32.686.263,00 dan capaian 99,93%

f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Dilaksanakan dalam rangka agar APIP mempunyai pengetahuan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan. Karena hal tersebut diperlukan sebagai pedoman APIP dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan aturan yang terbaru dan untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Total pagu anggaran program ini adalah Rp. 405.458.200,00 dengan realisasi Rp. 339.234.412,00 dan capaian 83,67%.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022, saran RPJMD salah satunya adalah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana”. Salah satu indikator kualitas lingkungan hidup diantaranya adalah Indeks Risiko Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Data dasar/awal yang dipakai adalah



nilai risiko bencana kabupaten yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2013, nilai Indeks Risiko Bencana untuk Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 144. Target penurunan secara nasional yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013) adalah 30% dalam 5 tahun, sedangkan target penurunan untuk Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebesar 25 % dalam 5 tahun atau penurunan nilai Indeks Risiko Bencana setiap tahun rata-rata sebesar 7 poin. Berdasarkan perhitungan tersebut berarti target penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 adalah turun sebesar 43 poin atau pada nilai 101. Target dan Realisasi Capaian Indikator RPJMD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.85
Capaian indikator BPBD

	Sasaran RPJMD	Penurunan 2019		Tahun 2019		Kinerja	
		Nilai	Poin	Nilai	Poin		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana	Indek Risiko Bencana	101	43	113	31	71,8%	Sedang

Sumber : LKPJ 2019

Kantor Kecamatan Kecamatan Arut Selatan

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik di kecamatan salah satunya kegiatan PATEN untuk mendukung pelayanan tersedianya informasi sarana dan prasarana pengukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Salah satu pelayanan publik yang meningkat adalah permintaan IMB untuk hunian rumah tempat tinggal. Pada tahun 2017, berjumlah 871 hunian, tahun 2018 meningkat menjadi 959 hunian dan untuk tahun 2019 menurun menjadi 901 hunian, untuk Realisasi Pendapatan IMB dan Kontribusi meningkat melebihi target mencapai 107 % dikarenakan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan No.10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan IMB dan Retribusi Izin mendirikan Bangunan Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mendapatkan Dana tambahan dan telah teralisasi tahun 2019 antara lain:

- 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - a) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman pagu anggaran sebesar Rp.1.554.170.000,00 dengan realisasi Rp. 1.372.094.600,00 atau 88,28 % ;
 - b) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi , pagu anggaran sebesar Rp. 186.000.000,00



- dengan realisasi sebesar Rp. 127.038.600,00 atau 68,3 % ; dikarenakan kelebihan jumlah meter panjang jalan yang diperbaiki sehingga lebih anggaran.
- c) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan pagu anggaran sebesar Rp. 365.338.000,00 dengan realisasi Rp. 257.993.611,00 atau 70,62 % ; dikarenakan sebagian kegiatan tidak teranggarkan upah tukang sehingga tidak bisa tersajikan untuk pembangunan posyandu.
 - d) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan pagu anggaran sebesar Rp. 294.305.000,00 dengan realisasi Rp. 254.425.000,00 atau 86,45 %.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- a) Pengelolaan kegiatan Kesehatan Masyarakat pagu anggaran sebesar Rp. 55.840.000,00 realisasi sebesar Rp. 49.110.300,00 atau 87,95 %
 - b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan pagu anggaran sebesar Rp. 7.900.000,00 realisasi sebesar Rp. 7.400.000,00 atau 93,67 %
 - c) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah pagu anggaran sebesar Rp. 117.600.000,00 realisasi sebesar Rp. 101.447.000,00 atau 86,26 %
 - d) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan pagu anggaran sebesar Rp. 53.880.000,00 realisasi sebesar Rp. 43.400.000,00 atau 80,55 %
 - e) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pagu anggaran sebesar Rp. 193.017.000,00 realisasi sebesar Rp. 88.168.000,00 atau 45,68 %; dikarenakan beberapa pembangunan poskamling terkendala aset yang belum dihibahkan dari masyarakat sehingga tidak bisa di spjkan.
 - f) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya pagu anggaran sebesar Rp. 9.950.000,00 realisasi sebesar Rp. 8.250.000,00 atau 82,92 % Kecamatan Kotawaringin Lama Program dan kegiatan

Kecamatan Kotawaringin Lama

- 1) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa dan belanja desa.
- 2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, terdiri dari :
 - Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
 - Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi



- Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
 - Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, terdiri dari :
- Kegiatan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
 - Kegiatan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam
 - menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

- 1) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Program dan Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan kembali, karena pada prinsipnya sasaran dari program kegiatan tetap dapat dicapai dengan menggunakan anggaran kegiatan rutin. Dengan realisasi sebagai berikut : Pada tahun 2017 pagu anggaran sebesar Rp. 32.347.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.20.910.000,00 atau 64,64% Sedangkan pada tahun 2018 pagu anggaran sebesar Rp.9.600.000,00 dengan realisasi Rp.9.510.000,00 atau 99,06 %.
- 2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - a. Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman pagu anggaran sebesar Rp.644.300.000,00 dengan realisasi Rp. 625.888.100,00 atau 97,14 % ;
 - b. Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi , pagu anggaran sebesar Rp. 63.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 63.700.000,00 atau 100 % ;
 - c. Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan pagu anggaran sebesar Rp. 4.900.000,00 dengan realisasi Rp. 4.900.000,00 atau 100% ;
 - d. Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,00 dengan realisasi Rp. 500.000,00 atau 100%.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - a. Kegiatan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan pagu anggaran sebesar Rp. 33.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 31.800.000,00 atau 96,36 %
 - b. Kegiatan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya pagu anggaran sebesar Rp. 21.600.000,00 realisasi sebesar Rp. 21.350.000,00 atau 98,84 %
- 4) Selain tiga program diatas, pada penyesuaian Renstra 2017-2022 Kecamatan Kotawaringin Lama menambahkan program dan kegiatan baru, namun belum diakomodir/di danai di dalam DPASKPD Tahun Anggaran 2019 yakni Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan



para Kepala Seksi di Kecamatan Kotawaringin Lama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Kecamatan Kumai

Program dan kegiatan

- 1) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
- 2) Program Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran pendapatan desa dan belanja desa.
- 3) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan
 - Optimalisasi Bidang Pelayanan Umum (PATEN)
 - Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
- 4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, terdiri dari :
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, terdiri dari :
 - Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
 - Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
 - Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
 - Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

- 1) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran pendapatan desa dan belanja desa. Program dan Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan kembali tetapi digantikan oleh Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan. Dengan realisasi sebagai berikut : Pada tahun 2017 pagu anggaran sebesar Rp. 37.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.950.000,00 atau 100,00% Sedangkan pada tahun 2018 pagu anggaran sebesar Rp. 21.500.000,00 dengan realisasi Rp. 21.403.000,00 atau 99,55%.



- 2) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan
- Optimalisasi Bidang Pelayanan Umum (PATEN) pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 3.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.750.000,00 atau 91,64%
 - Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 19.390.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.049.890,00 atau 87,63%. Realisasi kurang dari 90% karena anggaran belanja perjalanan dinas dalam kota tidak direalisasikan dikarenakan menggunakan Tambahan Penghasilan Pegawai dan perjalanan dinas kurang dari 8 jam
 - Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 40.620.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.405.000,00 atau 99,47%
 - Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 8.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.100.000,00 atau 81,70%. Realisasi kurang dari 90% karena anggaran belanja perjalanan dinas dalam kota tidak direalisasikan dikarenakan menggunakan Tambahan Penghasilan Pegawai perjalanan dinas kurang dari 8 jam
 - Pembinaan Kesejahteraan Rakyat pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 7.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.075.000,00 atau 79,00%. Realisasi kurang dari 90% karena anggaran belanja perjalanan dinas dalam kota tidak direalisasikan dikarenakan menggunakan Tambahan Penghasilan Pegawai perjalanan dinas kurang dari 8 jam
- 3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman pagu anggaran sebesar Rp.1.063.530.000,00 (termasuk dana Bantuan Provinsi sebesar Rp 40.000.000,00) dengan realisasi Rp. 1.008.812.931,00 atau 94,86 % ;
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan pagu anggaran sebesar Rp. 303.000.000,00 yang bersumber dana Bantuan Keuangan Provinsi dengan realisasi Rp. 294.000.000,00 atau 97,03% ;
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan pagu anggaran sebesar Rp. 37.500.000,00 dengan realisasi Rp. 37.500.000,00 atau 100%.
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pagu anggaran sebesar Rp 26.687.000,00 dengan realisasi Rp 25.467.000,00 atau 95,43 %
 - Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah pagu sebesar Rp 25.800.000,00 dengan realisasi Rp 24.580.000,00 atau 95,27%



- Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan pagu anggaran sebesar Rp. 29.277.000,00 realisasi sebesar Rp. 28.487.000,00 atau 97,30 %.
- Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya pagu anggaran sebesar Rp. 34.206.000,00 realisasi sebesar Rp. 33.686.000,00 atau 98,48 %.

Kecamatan Pangkalan Banteng

Program Kegiatan

1. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum, dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 - b. Kegiatan Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan
 - c. Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
 - d. Kegiatan Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Rakyat

Realisasi Program Dan Kegiatan

Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan para Kepala Seksi di Kecamatan Pangkalan Banteng dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Realisasi Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Pangkalan Banteng ada 2 (dua) jenis pelayanan yakni:

- a) Perizinan, terdiri dari :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 4. Gangguan Umum (HO)
 5. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- b) Non Perizinan, terdiri dari : Surat Rekomendasi Nikah/Catatan Sipil Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- c) Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
- d) Pengantar Surat Pindah Penduduk
- e) Pengantar Akte Kelahiran
- f) Perubahan Elemen Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- g) Validasi Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
- h) Registrasi Surat Keterangan Tanah (SKT)
- i) Surat Izin Keramaian
- j) Legalisir Dokumen
- k) Kepengurusan Dokumen Lainnya



Tabel 2.86
Realisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pangkalan Banteng

No.	Jenis Dokumen	Tahun 2017 (dokumen)	Tahun 2018 (dokumen)	Tahun 2019 (dokumen)	Ket
PERIZINAN					
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15	45	112	
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	2	1	5	
3.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	10	1	4	
4.	Gangguan Umum (HO)	8	1	-	
5.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	478	298	222	
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2	-	4	
NON PERIZINAN					
7.	Surat Rekomendasi Nikah/Catatan Sipil	66	45	30	
8.	Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian	409	369	405	
9.	Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	7.544	3.828	2.585	
10.	Pengantar Surat Pindah Penduduk	249	276	234	
11.	Pengantar Akte Kelahiran	561	393	222	
12.	Perubahan Elemen Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)	380	127	79	
13.	Validasi Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	1.680	245	331	
14.	Registrasi Surat Keterangan Tanah (SKT)	766	138	273	
15.	Surat Izin Keramaian	29	67	45	
16.	Legalisir Dokumen (SKTM, Pengantar KK, Pengantar KTP, dll)	418	377	223	

Sumber : LKPJ 2019

Kecamatan Pangkalan Lada

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik di kecamatan salah satunya kegiatan PATEN untuk mendukung pelayanan tersedianya informasi sarana dan prasarana pengukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Salah satu pelayanan publik yang meningkat adalah permintaan IMB untuk hunian rumah tempat tinggal. Pada tahun 2017, berjumlah 26 hunian, tahun 2018 meningkat menjadi 195 hunian dan untuk tahun 2019 menurun menjadi 108 hunian, untuk Realisasi Pendapatan IMB untuk Tahun Anggaran 2019 dari target Rp. 16.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 13.263.240,00 atau 82.89% dari target yang sudah ditetapkan



Kecamatan Arut Utara

Program dan Kegiatan

Program kegiatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Arut Utara pada tahun 2019 antara lain :

1. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum di Kecamatan, maksud dan tujuan program tersebut adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Optimalisasi pelayanan Paten, Pembinaan Tata kelola pemerintahan desa/ kelurahan, pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan Kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Program /Kegiatan diatas dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Optimalisasi peningkatan Pelayanan Paten
 2. Pendampingan musyawarah desa dalam rangka penyusunan Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).
 3. Monitoring pelaksanaan pembangunan melalui dana transfer desa.
 4. Pembinaan dan Monitoring kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat
 5. Monitoring Kesejahteraan Masyarakat melalui penyaluran Rastra, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

2.4.21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

DINAS PMD

a) Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Alokasi Anggaran Program ini Rp. 696.444.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 663.708.888,00 atau 95,30%. Tujuan dan Sasaran .Program ini adalah Mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional yang ditandai dengan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.

b) Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal

Alokasi Anggaran Program ini Rp. 328.937.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 322.006.741,00 atau 97,89%. Tujuan Program ini adalah terbentuknya lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat yang sehat

c) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Alokasi Anggaran Program ini Rp. 1.454.415.350,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.389.653.035,00 atau 95,55%. Tujuan Program ini adalah meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Desa



d) Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Alokasi Anggaran Program ini Rp. 404.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 402.560.600,00 atau 99,43%. Maksud tujuan program ini adalah untuk menumbuh kembangkan penguatan sistem inovasi di masyarakat.

2.4.22 Urusan Sosial

a) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Kegiatan seleksi pilar-pilar yang dilaksanakan oleh dinas sosial khususnya bidang pemberdayaan sosial dimana pesertanya merupakan perwakilan dari kecamatan, Pemenang dari tiap pilar ini akan dikirim untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi mewakili Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan ini terealisasi dengan melaksanakan penyaluran insentif kepada 6 (enam) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebesar Rp.300.000,00/bulan dan 13 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebesar Rp.100.000,00/bulan, Pemberdayaan TKSK dan PSM melalui pemberian insentif sebagai penghargaan dan motivasi bagi mereka melaksanakan tugas sebagai pendamping penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan selama 1 tahun. S

b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- 1) Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yang berupa ialah :
 - Memfasilitasi bantuan berupa uang dari APBN (Kemensos RI) kepada penerima ASLUT sebanyak 40 orang Lansia bekerjasama dengan pihak Bank yang dalam hal ini melalui BRI sebesar Rp. 200 ribu/orang setiap bulan selama 1 tahun dengan dua kali pencairan yaitu bulan Juni dan bulan Desember dengan jumlah Rp. 96.000.000,00. Dari Program yang ada dibidang rehabilitasi sosial jumlah Lansia yang diberikan bantuan berjumlah 40 orang dari APBN (Kemensos RI) dari jumlah Lansia 6201 orang sesuai data BDT sedangkan sisanya dialihkan ke PKH mulai tahun 2018 yang sekarang masuk dalam bidang Linjamsos.
 - Memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan jumlah 48 orang anak dari 64 orang anak dengan bermacam kasus yang terjadi.
 - Melaksanakan kegiatan Parenting Skill untuk memberikan pemahaman kepada keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tentang bagaimana memperlakukan dan merawat pasien ODGJ yang baik dan sewajarnya.
 - Melaksanakan sunatan massal untuk anak yang orangtuanya tidak mampu yang dilaksanakan pada bulan oktober dengan jumlah anak 50 orang yang berasal dari kelurahan dan desa di Kecamatan Arut Selatan



- 2) Kegiatan Pembinaan Penyandang Masalah Penyakit Sosial/ (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Gepeng), Korban Perdagangan Orang dan Penyakit Sosial Lainnya. Kegiatan ini terealisasi dengan melaksanakan Pengantaran/ perujukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)/ Psikotik sebanyak 3 orang, yaitu 1 orang rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya dan 2 orang rehab sosial ke Panti Budi Luhur Bina Laras Banjarbaru setelah sebelumnya mendapat rujukan dari RSJ Sambang Lihum Banjarmasin

c) Program Pembinaan Anak Terlantar

- a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar. Kegiatan ini dengan terlaksana dengan kegiatan pelatihan keterampilan barbershop/ potong rambut kepada 15 orang bagi anak yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, kebutuhan rohani dan kebutuhan sosial. selama 10 hari di Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan Bun dan dibentuk menjadi 3 kelompok anak dengan disediakan stimulan berupa peralatan potong rambut. Dengan waktu pelaksanaan selama 10 hari, mulai dari tanggal, 28 juni s/d 09 juli 2019 dan pengiriman anak putus sekolah sebanyak 6 orang untuk mengikuti pelatihan ke Panti Sosial Bina Remaja Karya Wanita (PSBR/KW) di Palangka Raya Provinsi Kalteng

d) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- 1) Kegiatan Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eksrauma. Pada kegiatan ini telah dilaksanakan Berupa pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dilingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan dilaksanakan kegiatan pendataan penyandang

e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Bencana Sosial. Kegiatan ini terealisasi dengan melakukan kegiatan pemberian bantuan pemulangan kepada 157 orang pekerja migran yang mengalami keterlantaran, 7 eks narapidana, dan 20 orang yang terjaring razia gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat. Ada 14 kebakaran rumah yang di bantu logistik. Dengan besaran bantuan pemulangan untuk tujuan ke pulau Jawa sebesar Rp.304.000,00/orang, ke Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp.180.000,00, ke Kabupaten Lamandau sebesar Rp.170.000,00, dan ke Kabupaten Sukamara sebesar Rp.220.000,00
- 2) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Kegiatan ini direalisasikan dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti cetak stiker untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat bantuan PKH sebanyak 4000 lembar stiker untuk dipasang/ditempel pada rumah KPM penerima bantuan sosial PKH. Kegiatan rapat bulanan evaluasi pelaksanaan bansos PKH dengan 4 kegiatan. Pengadaan seragam pakaian kerja lapangan untuk pendamping PKH



(sekretariat PPKH KOBAR) sebanyak 40 set. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PKH dan penyaluran Bansos PKH

- 3) Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Bencana Alam. Kegiatan ini direalisasikan dengan kegiatan pengambilan logistik kebencanaan sebanyak 2 (dua) kali yang merupakan bantuan dari kementerian sosial RI, kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka ketagamaan diantaranya mengikuti jambore nasional & bakti sosial tagana di Jawa Timur. Kegiatan pendataan, penyaluran hingga monitoring kebencanaan

f) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya

- 1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pelatihan SDM pemutakhiran data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) tahun 2019 yang dilaksanakan dalam 2 angkatan : angkatan pertama, dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 14 s/d 16 Nopember 2019, angkatan kedua dilaksanakan pada hari Senin s/d Rabu tanggal 18-20 Nopember 2019. Tempat pelaksanaan kegiatan di aula Hotel Andika Pangkalan Bun. Adapun peserta pada angkatan pertama terdiri dari aparatur kecamatan sebanyak 6 orang dan pendamping sosial sebanyak 34 orang. Peserta angkatan kedua terdiri dari aparatur desa dan kelurahan sebanyak 94 orang. Total keseluruhan peserta angkatan satu dan dua sebanyak 134 orang.

Tabel 2.87
Data Keuangan Kegiatan

No	Pagu	Realisasi Fisik (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	240.300.000	234.554.200	97,61%	234.554.200	97,61%

Sumber : LKPJ 2019

- 1) Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin. Dengan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pemantapan bagi pengurus KUBE Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019. Sasaran kegiatan bimtek adalah KPM pengurus KUBE dan pendamping KUBE dilingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 144 orang. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di aula kantor kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun.



Tabel 2.88
Data Keuangan Kegiatan

No	Pagu	Realisasi Fisik (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	57.750.000	50.200.000	97,61%	50.200.000	86,93%

Sumber : LKPJ 2019

- 2) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Kebutuhan Dasar dan Rekomendasi Jaminan Sosial serta Penataan Lingkungan bagi Fakir Miskin. Dengan melaksanakan kegiatan yang memiliki 2 sub kegiatan ialah : pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran BPNT dengan kegiatan berupa
- Monitoring pelaksanaan program BPNT/pendampingan ke desa dan keluarahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Kegiatan survey lokasi dan monitoring pelaksanaan rutilahu di 5 kecamatan yaitu kecamatan arut selatan, pangkalan lada, pangkalan banteng, kumai, arut utara.
 - Kegiatan pemasangan sticker keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT oleh 7 orang pendamping BPNT

Tabel 2.89
Data Keuangan Kegiatan

No	Pagu	Realisasi Fisik (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	138.948.800	137.324.110	98,83%	137.324.110	98,83%

Sumber : LKPJ 2019

Tabel 2.90
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2017)	2018		2019	
			Target	Real.	Target	Real.
Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	%	15,27	17	13.03	15,75	15.08

Sumber : LKPJ 2019

Dalam tabel diatas disebutkan realisasi di tahun 2019 sebesar 15.08 dari target 15,75% dimana capaian tersebut **Berhasil** karena nilai dibawah target. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbandingan antara jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 295.349 jiwa (berdasarkan data dinas penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Kotawaringin Barat) dan jumlah PMKS yang dilayani sebesar 38.074 jiwa.

2.4.23. Urusan Kebudayaan

DIKBUD

- a) **Program Pengembangan Nilai Budaya** Maksud dan tujuan program ini adalah pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya untuk kelompok seni budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memberikan bantuan pengadaan alat-alat seni budaya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya Maksud dan tujuan program ini adalah tersedianya dana untuk pengadaan alat-alat seni budaya untuk kelompok seni budaya. Pagu tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 280.745.000,00 dan terealisasi Rp. 274.400.600,00 atau 97,74%.
- b) **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** Maksud dan tujuan program ini adalah terakomodir dan terpeliharanya jumlah juru pelihara situs dan budaya. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Maksud dan tujuan program ini adalah tersedianya dana untuk honor juru pelihara situs budaya. Pagu tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 882.358.700,00 dan terealisasi Rp. 838.913.750,00 atau 95,08%.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air Maksud dan tujuan program ini adalah terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air. Pagu tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.412.000,00 atau 23,53%. rendahnya serapan anggaran dikarenakan pagu alokasi dana yang di anggarakan hanya untuk pembayaran listrik untuk lokasi anjungan kotawaringin barat yang berada di palangkaraya, dan penggunaan listrik disesuaikan dengan pemakaian , sehingga terdapat efisiensi anggaran.
 - 3) Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Maksud dan tujuan program ini adalah terlaksananya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Pengelolaan Kekayaan Budaya. Pagu tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 32.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 31.487.100,00 atau 98,40%
- c) **Program Pengelolaan Keragaman Budaya**, Maksud dan tujuan program ini adalah kelompok seni dan budaya mendapat bantuan festival budaya serta terlaksananya festival budaya dan festival seni. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Maksud dan tujuan program ini adalah terfasilitasinya perkembangan keragaman budaya

daerah. Pagu tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.960.917.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 792.815.000,00 atau 82,51%.

- 2) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Maksud dan tujuan program ini adalah terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah. Pagu tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.437.193.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.257.917.600,00 atau 92,64%. 3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya Maksud dan tujuan program ini adalah terlaksananya monitoring kegiatan kebudayaan dan kesenian. Pagu tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.55.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.45.548.372,00 atau 82,82%.

2.4.24 Urusan Statistik dan Persandian

Statistik

Alokasi anggaran urusan Statistik tahun sebesar Rp 44.615.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.824.800,00 atau 93,75%, realisasi fisik sebesar 100%. Program dan kegiatan urusan statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah:

- a) **Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah**, Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan *E-Government* dan pengelolaan data statistik. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 44.615.000,00 dan terealisasi Rp. 41.824.800,00 atau 93,75% serta capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100%.
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik daerah Kegiatan ini bertujuan untuk penyiapan, pembangunan dan pengembangan pengelolaan di bidang data statistik. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 44.615.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp 41.824.800,00 atau 93,75% realisasi fisik sebesar 100%.

Persandian

Realisasi Program dan Kegiatan urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah:

- a. **Program Pengamanan Informasi Daerah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase pembinaan, penyiapan, perumusan, pengawasan, pengendalian terhadap infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, persandian dan keamanan informasi. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dengan pagu sebesar Rp.37.715.000,00 dan terealisasi Rp. 31.771.090,00 atau 84,24% serta capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100%.



- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berkualifikasi Kegiatan ini bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan persandian dan keamanan informasi terhadap pemerintah dan publik. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.37.715.000 dan terealisasi Rp. 31.771.090,00 atau 84,24% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Tabel 2.91
Indikator Kinerja Urusan Persandian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	INDEKS SPBE	NA	NA	1,8	1,8	2,3	2,47
Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 55%)	NA	NA	1,3	1,3	1,3	1,55
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government,	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 17%)	NA	NA	0,19	0,19	0,36	0,32
Data Statistik dan Pengamanan Data	Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 28%)	NA	NA	0,4	0,4	0,64	0,60

Sumber : LKPJ 2019

2.4.25 Urusan Kearsipan

a) Program pengelolaan dan layanan arsip

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk menyelenggarakan fungsi dari pelaksanaan urusan pengelolaan dan Layanan arsip statis dan Inaktif yang autentik dan terpercaya. Pelaksanaan program berdasarkan Review Renstra 2019 – 2022 dengan indikator Jumlah Layanan Kearsipan dengan target sejumlah 3 kegiatan dapat terealisasi 100%, Alokasi pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp. 123.190.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 123.129.060,00 (99,95%),

b) Program pembinaan dan pengawasan kearsipan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan dalam menata arsip statis dan dinamis yang autentik dan terpercaya, demi terselenggaranya *good goverment* sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sesuai ketentuan UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pelaksanaan program berdasarkan Review Renstra 2019 – 2022 dengan indikator Jumlah Pembinaan dan Pendampingan kepada perangkat daerah untuk menerapkan standar pengelolaan arsip menetapkan target sejumlah 14



SKPD dan realisasi kinerja 19 SKPD (135,71%), dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 166.499.900,00 dengan realisasi anggaran Rp. 163.165.300,00 (97,99%), terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.334.600,00 yang merupakan upaya efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan program.

2.42.6 Urusan Perpustakaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Program pengembangan, pengolahan bahan pustaka dan layanan

Maksud dan tujuan program ini adalah menyelenggarakan fungsi dari pelaksanaan urusan pengembangan, pengolahan bahan pustaka, pelaksanaan urusan pelestarian bahan pustaka, pelaksanaan urusan layanan dan kerjasama perpustakaan, dan pelaksanaan pengendalian, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengembangan, pengolahan bahan pustaka dan layanan. Pelaksanaan program berdasarkan Review Renstra 2019 – 2022 dengan indikator Persentase pengembangan koleksi bahan perpustakaan dengan target sebesar 20% dan realisasi 5.59% maka capaian program sebesar 27,95%, ini dikarena ketersediaan kemampuan anggaran untuk pengadaan bahan pustaka TA. 2019. Adapun Alokasi pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan, pengolahan bahan pustaka dan layanan sebesar Rp. 1.154.189.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.109.444.690,00 (96,12%)

b) Program pembinaan Perpustakaan dan pembudayaan Kegemaran Membaca

Tujuan utama dari program pembinaan Perpustakaan dan pembudayaan Kegemaran Membaca adalah meningkatkan layanan perpustakaan yang prima baik bagi pengguna diperpustakaan baik pada perpustakaan khusus dan perpustakaan umum. Pelaksanaan program berdasarkan Review Renstra 2019 – 2022 dengan indikator Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang di bina dengan target berjumlah 30 unit perpustakaan dengan realisasi berjumlah 35 unit perpustakaan (116,7%) yang artinya capaian program sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan Alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 203.274.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 173.301.000,00 (85,25%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 29.973.000,00 yang merupakan upaya efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan program

2.5. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

2.5.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya. Indikatornya adalah persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target sasaran di tahun 2019 mencapai 11,16% (7.092 ton/tahun). Sampai dengan akhir tahun

